

AL-ZAYTUN: OBOR DEMOKRASI MASA DEPAN

BERITA INDONESIA[®]

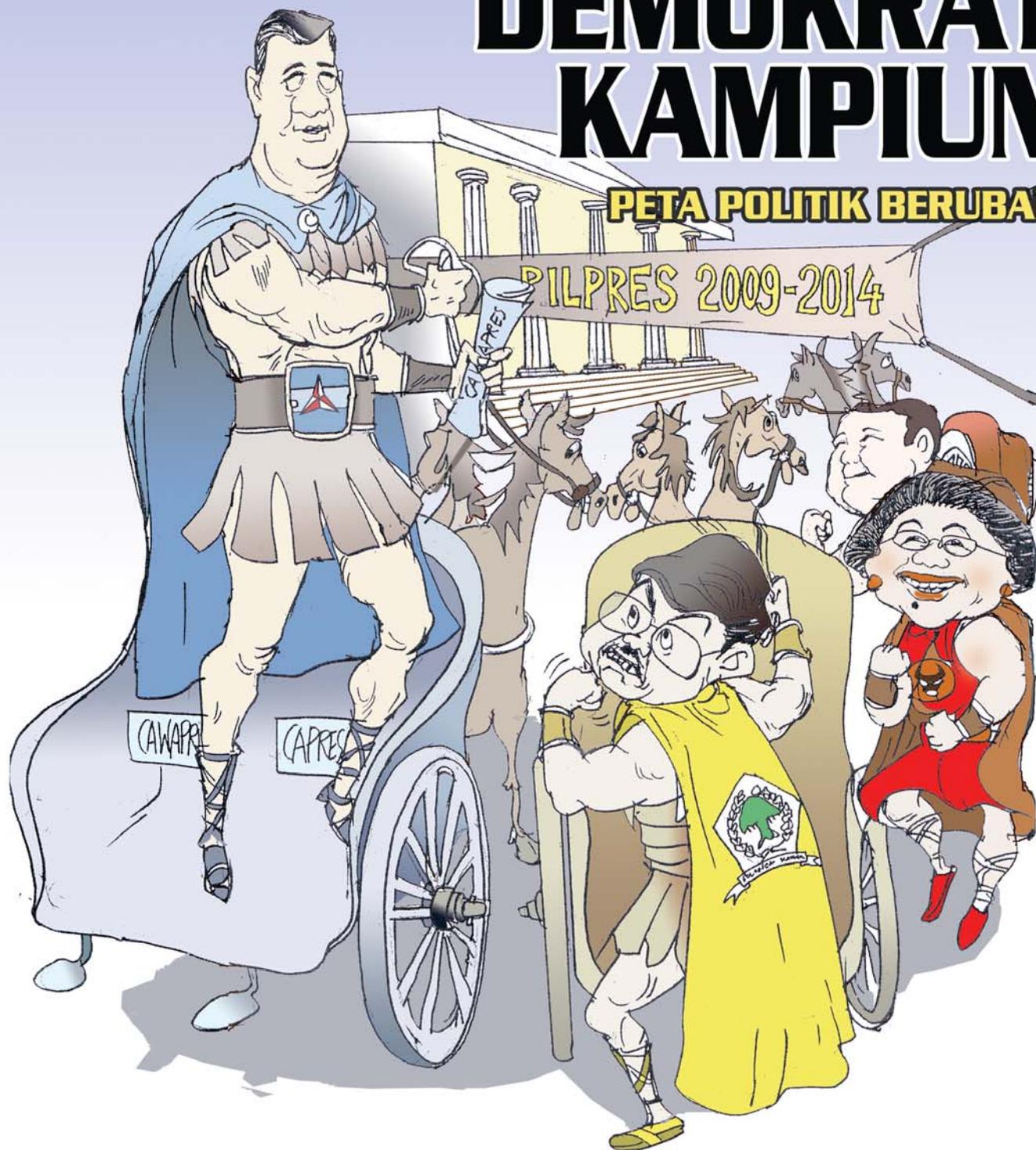
EDISI 66 TAHUN IV ★ APRIL - 15 MEI 2009

Rp 16.000 (Luar Jabodetabek Rp 17.500)

PEMILU KACAU DEMOKRAT KAMPIUN

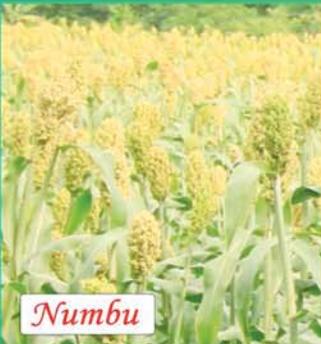
PETA POLITIK BERUBAH

PILPRES 2009-2014



Tersedia

BIBIT SORGUM VARIETAS NASIONAL DI AL-ZAYTUN

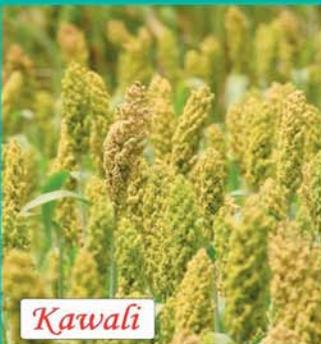


VARIETAS : NUMBU

Umur : 105 - 110 hari

Harga :

1. Packing 5 kg : Rp. 100.000
2. Packing 1 kg : Rp. 30.000
3. Packing 250 gr : Rp. 15.000
4. Packing 100 gr : Rp. 10.000

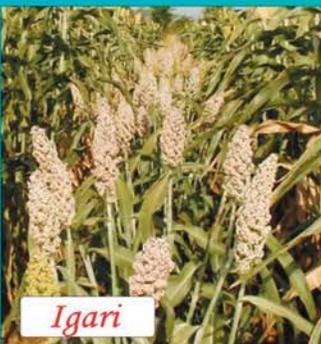


VARIETAS : KAWALI

Umur : 110 Hari

Harga :

1. Packing 5 kg : Rp. 100.000
2. Packing 1 kg : Rp. 30.000
3. Packing 250 gr : Rp. 15.000
4. Packing 100 gr : Rp. 10.000



VARIETAS : IGARI

Umur : 75 - 80 hari

Harga :

1. Packing 5 kg : Rp. 100.000
2. Packing 1 kg : Rp. 30.000
3. Packing 250 gr : Rp. 15.000
4. Packing 100 gr : Rp. 10.000



Sampul
desain: esero
karikatur: denny

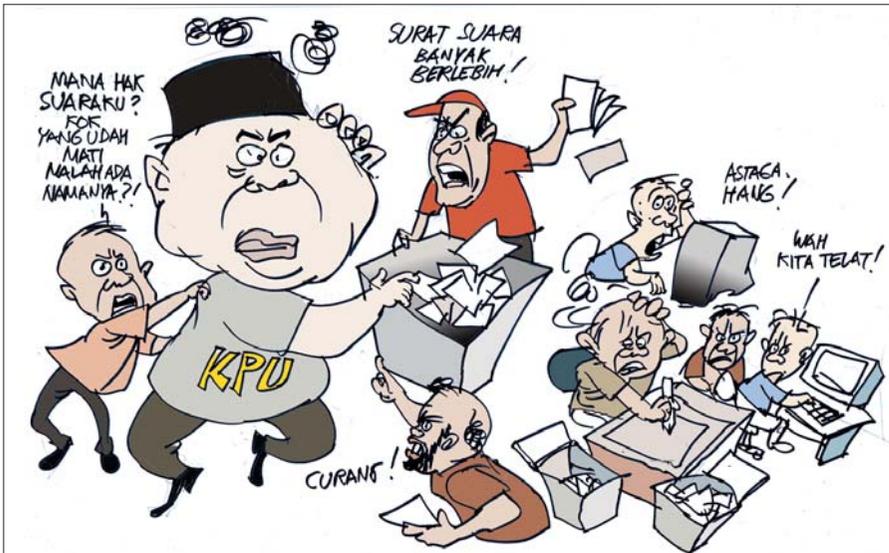
Edisi No.66/Th.IV/April - 15 Mei 2009

DARI REDAKSI 4
 VISI BERITA 5
 SURAT PEMBACA 6
 BERITA TERDEPAN 8
 HIGHLIGHT/KARIKATUR BERITA 9

BERITA UTAMA

PEMILU KACAU-BALAU | 12

Pemilu Legislatif 9 April 2009 dinilai merupakan Pemilu terburuk sejak reformasi. Selain pimpinan dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai berpihak juga tidak memiliki kapasitas memadai. Akibatnya, penyelenggaraan Pemilu kacau-balau.



Lahirkan Peta Politik Baru 18
 Kekalahan Partai Golkar 20
 PDIP Jadi Oposan Lagi 22
 Gula Demokrat dan Perpecahan Partai 24

BERITA EKONOMI
 Emas Itu Belum Digenggam 26

BERITA KHAS
 Krisis yang Tak Pernah Hinggap 27

BERITA TOKOH
 Lima Sosok di Balik Quick Count 30

BERITA HUKUM
 Menguak Misteri Kematian David 32
 Tatkala Barang Bukti Jadi Komoditi 33

BERITA NASIONAL
 Akibat Kejar Kursi 42
 Mencari Solusi Krisis Listrik 44
 Musibah Karena Kealpaan 46



UN untuk Masa Depan 48

BERITA MEDIA
 Terdepan Dalam Liputan Pemilu 49

BERITA POLITIK
 DPT, Potret Kesalahan Kolektif 50



Carut Marut Pemilu 2009 52

BERITA HUMANIORA
 Mari Berhitung Secepat Kilat 54

BERITA IPTEK
 Menerabas Ulah Conficker dan Sality 55

LENTERA



**Al-Zaytun Sumber Inspirasi (04)
 OBOR DEMOKRASI MASA DEPAN**

Syaykh Al-Zaytun: Indonesia harus masuk dalam zone of peace and democracy kalau ingin menjadi negara yang kuat, beradab dan bermoral di muka bumi ini bersama-sama dengan negara-negara lain.41

BERITA PUBLIK
 Memacu Pembangunan Perkeretaapian 60



"Outlet" Pelayanan Jemput Bola 61

BERITA DAERAH
 Jangan Alergi Terhadap Wartawan 62
 Menyedot Lumpur Sungai Kayan 63



BERITA PEREMPUAN
 Perempuan Melukis Perempuan 64



BERITA BUKU
 Olok-olok Pemanasan Global 65
 Micheal Crichton yang tak Pernah Jeri 66

► Demokrasi, Toleransi dan Perdamaian

PEMIMPIN UMUM:

Syaykh Dr AS Panji Gumilang

PEMIMPIN REDAKSI:

Ch Robin Simanullang

REDAKTUR SENIOR:

MYR Agung Sidayu
Imam Prawoto
Dendy Hendrias
Suryo Pranoto

IN HEADNEWS (LIPUTAN, LITBANG & PUSDAT):

Mangatur Lorieclide Paniroy (Redaktur Eksekutif)

REDAKTUR:

Samsuri, Marjuka Situmorang, Dian Gina Rahayu

SEKRETARIS REDAKSI

Bantu Hotsan

STAF REDAKSI:

Nawawi, Ikhwani Triatmo, Sarjiman,
Doan Adikara Pudan, Budi Rahardjo

WARTAWAN FOTO:

Wilson Edward

KARIKATURIS:

Dendy Hendrias

KONTRIBUTOR:

Syahbuddin Hamzah, Anis Fuadi, Chusnato,
Retno Handayani

DESAIN GRAFIS:

ESERO Design, Arief Maulana

BIRO REDAKSI:

Medan: Bontor Simanullang, Jawa Barat: Ade Wiharyana (Kepala), Bernard Sihite, Prana Citra, Herman Efendy, Tarakan: Sudirman Leonard Pohan, Amerika Serikat: Mibsam Bahanan (Maryland), Rukyal Basri (Philadelphia)

PENERBIT:

PT Berita Satria Wiratama

Bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Indonesia dan PT. Asasira

KOMISARIS:

Syaykh Dr AS Panji Gumilang

DIREKTUR/PEMIMPIN PERUSAHAAN:

Ch Robin Simanullang

WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN:

Samsuri

IKLAN DAN PROMOSI:

Imam Prawoto, Dian Gina Rahayu, Budi Rahardjo

KEUANGAN DAN UMUM:

Mangatur Lorieclide Paniroy

SIRKULASI DAN DISTRIBUSI:

Abdul Halim, Marjuka Situmorang, Bantu Hotsan

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:

Jl. Bukit Duri Tanjakan IX No. 8A Jakarta Selatan.
Telp. (021) 8292735, 8293113, 70930474
Fax. (021) 83787235

IKLAN: Gedung Dewan Pers Lt.1, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat, Telp. (021) 34830840 - 32195353

E-MAIL:

redaksi@berindo.com - iklan@berindo.com

WEBSITE:

www.beritaindonesia.co.id

ISSN: 1907-977X

MEREK: Ditjen HAKI Sertifikat IDM No. 000.108.028

PERCETAKAN:

PT Gramedia (Isi di luar tanggung jawab percetakan)



Susilo Bambang Yudhoyono berpeluang besar menduduki kembali jabatan RI 1

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera,

Sidang pembaca,

Pemilu 2009, pesta demokrasi terakbar lima tahunan banyak diprotes setelah banyak warga yang tidak memilih karena tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Polemik mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kacau balaunya DPT tersebut masih terus berlanjut. Di sisi lain, proses pemilihan presiden 8 Juli terus berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dalam rangka itu, suhu politik pun kembali memanas. Partai-partai politik kembali sibuk 'membaca langkah politik' partai lainnya, guna menentukan sikap dengan siapa harus berkoalisi dan dengan siapa harus beroposisi.

Di tengah situasi itu, sebagian partai atau tokoh politik memperlihatkan diri kalau mereka condong menganut politik pragmatis. Sebagian masih malu-malu menunjukkan diri, dan sebagian lagi masih tetap menunggu ke arah mana harus berpaling. Dengan alasan itu pula, pada edisi ini kami mengangkat topik pemilu presiden sebagai *Berita Utama* kali ini.

Masih dalam rangka pelaksanaan pemilu sekarang ini, di rubrik *Lentera* kami menulis bagaimana Al-Zaytun mengapresiasi demokrasi. Syaykh Al-Zaytun secara konsisten mengajarkan dan menyalakan obor demokrasi di kampus yang diasuhnya.

Di rubrik *Berita Khas*, kami mengangkat mengenai pasar barang bekas dan kuno di Jakarta yang ternyata masih eksis di tengah gempuran canggihnya perkembangan zaman sekarang ini.

Calon-calon legislatif yang mengalami depresi karena tidak menang, dan mengenai solusi krisis listrik yang semakin mengganggu perekonomian nasional belakangan ini kami angkat dalam rubrik *Berita Nasional*.

Dalam rubrik *Berita politik*, kami menulis tentang carut marut pemilu legislatif 9 April. Sedangkan di rubrik *Berita Hukum*, kami tampilkan soal kasus dugaan penggelapan barang bukti oleh dua orang jaksa pengadilan negeri.

Seperti biasa, pada edisi ini kami menampilkan beberapa berita dari daerah, seperti pengerukan Sungai Kayan di Kabupaten Bulungan yang diduga bermasalah, alergi beberapa pejabat daerah di Purwakarta kepada pemburu berita.

Selain itu, masih ada topik menarik lainnya seperti *Berita Tokoh*, *Berita Media*, *Berita Buku*, yang kami antarkan ke hadapan pembaca dengan harapan semoga bisa memuaskan minat baca Anda.

Akhir kata, kami ucapkan selamat membaca dan semoga pembaca berkenan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Saling Lempar Kewenangan

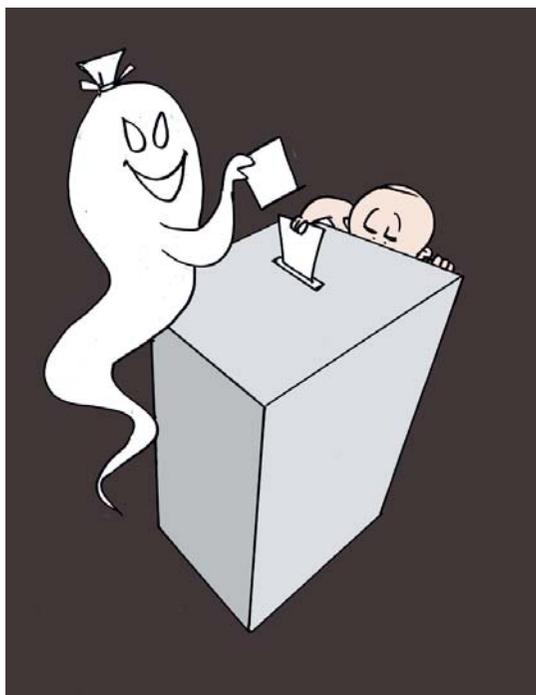
Di tengah suasana relatif damai saat penyelenggaraan Pemilu Legislatif 9 April 2009 lalu, rupanya terjadi kemunduran kualitas Pemilu. Banyak pihak menilai bahwa Pemilu ini merupakan Pemilu terburuk sepanjang sejarah pascareformasi.

Penilaian itu dikemukakan setelah melihat berbagai kenyataan buruk penyelenggaraan Pemilu. Mulai dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah, bahkan nyaris amburadul. Banyak warga negara yang kehilangan hak pilih karena tidak terdaftar dalam DPT. Sebaliknya banyak DPT (terdaftar) ganda, orang mati dan anak di bawah umur. Ditambah lagi pengadaan logistik Pemilu yang juga bermasalah. Surat suara tertukar ke daerah lain, sebagian sudah dicontreng. Kotak suara tak bersegel dan lain sebagainya.

Masalah kacau-balaunya DPT mungkin menjadi salah satu hal yang paling buruk dan paling perlu segera diperbaiki. Sebab masih akan ada Pemilu Presiden 9 Juli 2009. Puluhan juta warga negara yang kehilangan hak pilih karena tidak terdaftar dalam DPT pada Pemilu Legislatif jangan lagi kehilangan hak asasi pada Pilpres mendatang.

Sehingga rekomendasi, tuntutan para petinggi partai dan beberapa warga negara supaya pihak yang bertanggung jawab segera memberi penjelasan dan sekaligus menunjukkan usaha keras untuk memperbaikinya. Tetapi, sangat disayangkan, pihak pemerintah (Presiden dan Menteri Dalam Negeri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) justru dari awal mengambil sikap defensif dan terkesan membiarkannya dan saling lempar kewenangan.

Pihak KPU menyatakan carut-marutnya DPT itu berawal dari daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang dibuat Departemen Dalam Negeri. Jadi itu tanggung jawab Mendagri. Tapi Mendagri menolak dituduh paling bertanggung jawab. Mendagri Mardiyanto dalam rapat dengan Komisi II DPR menyebutkan, kewenangan DP4 ada pada KPU



untuk memutakhirkannya. Sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selaku penanggung jawab Pemilu mengatakan, kompleksibilitas pelaksanaan Pemilu tidak dapat dijadikan alasan pembena atas tidak baiknya kinerja KPU.

Presiden SBY malah meminta para petinggi partai yang ingin menjernihkan masalah DPT dan segala macam kemungkinan kecurangan Pemilu diselesaikan, untuk tidak galak-galak berbicara tentang kecurangan Pemilu. Ia malah menyebut punya memori yang banyak tentang Pemilu 2004 dan tentang masa lalu pribadi orang-orang itu. Mengapa presiden sebagai penanggung jawab Pemilu begitu defensif dan bahkan mencari-cari kesalahan masa lalu?

Pantas saja pihak kepolisian dengan perasaan tak bersalah menolak pengaduan Badan Pengawas Pemilu tentang dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang dilaku-

kan KPU. Padahal UU Nomor 10/2008 tentang Pemilu Legislatif, dengan jelas menyebut kewenangan Bawaslu menyampaikan pelanggaran administrasi kepada KPU dan menyalurkan pelanggaran pidana kepada kepolisian untuk diteruskan ke peradilan umum.

Paling ironis, kemudian KPU melempar kesalahan kepada warga yang tidak proaktif mendaftarkan diri supaya terdaftar dalam DPT. Waduh, kalau begini, apakah mereka tidak menyadari posisi sebagai pejabat publik, pelayan publik?

Kita berharap, pemerintah, KPU, Bawaslu dan Kepolisian menjalankan tugas kepelayananpubliknya sehingga kekacau-balaunya Pemilu Legislatif tidak terulang pada Pilpres mendatang. Jika pemerintah dan KPU memperlihatkan tanggung jawab dan keseriusan memperbaiki penyelenggaraan Pemilu Presiden, kita yakin kepercayaan publik atas kejujuran dan keadilan penyelenggaraan Pemilu akan pulih. Juga kepercayaan para petinggi politik yang merasa dirugikan juga akan pulih dan akan mengikuti Pilpres dengan nyaman dan bermartabat. Dengan demikian, legitimasi anggota legislatif dan presiden terpilih pun akan semakin tinggi. *Redaksi*



Surat atau komentar tentang apa saja baik berkenaan dengan isi majalah Berita Indonesia maupun ide/gagasan/pandangan tentang isu-isu aktual dapat dikirimkan ke Redaksi Berita Indonesia, dengan alamat sebagai berikut:

- email : redaksi@berindo.com
- surat : Jl. Bukit Duri Tanjakan IX No. 8A Jakarta Selatan 12840
Telp. (021) 8292735, 8293113, 83701736, 70930474 Fax. (021) 83787235

Dimana Hati Nuranimu?

Tragedi kemanusiaan terkait dengan jebolnya tanggul Situ Gintung memunculkan fakta baru, yaitu hati nurani telah hilang dari kehidupan kita. Lokasi bencana berubah menjadi daerah tujuan wisata dan ajang kampanye. Orang-orang dari seluruh penjuru Jakarta berbondong-bondong datang ke lokasi bencana hanya untuk

melihat-lihat. Dengan sigap para caleg berbagai parpol, termasuk dari parpol yang selalu mengatakan hati nurani dalam sosialisasi (kata halus untuk kampanye) mendirikan tenda-tenda untuk memberikan bantuan. Namun, mereka selalu menyangkal bahwa kegiatan mereka adalah bagian dari kampanye untuk mendapat simpati. Kalau memang benar demikian, mengapa ada nama parpol dan caleg di depan tenda mereka. Bahkan pada 'bantuan' yang diberikan? Aduh Gusti, kok ada yang tega berkampanye di tempat bencana? Dimanakah hati nurani? Bayangkan, jika para caleg itu yang jadi korban lalu dijadikan komoditas kampanye.

ARISTIADI TJ IRKHAMNI
aristiadiirkhamni@yahoo.com

Atasi DPT Bermasalah

Kalau ingin membenahi administrasi negara dan kependudukan, langkah pertama adalah tersedianya data ke-

pendudukan yang akurat, valid, dan transparan. Banyaknya warga yang memiliki KTP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, kacau balaunya data DAK2, DP4, DPS, dan DPT merupakan salah satu bukti betapa kacanya sistem administrasi kependudukan di negeri ini. Di dalam sensus, sebaiknya semua penduduk harus membubuhkan sidik jari di formulir khusus. Sidik jari ini dikumpulkan di dalam bank sidik jari lengkap dengan rumusnya. Di dunia ini tidak mungkin ada orang yang memiliki sidik jari yang identik. Gunanya untuk menghindari adanya NIK ganda. Kalau perlu di KTP dilengkapi *microchip* yang berisi segala data yang berhubungan dengan pemegang KTP. Lebih bagus lagi dilengkapi *barcode* NIK dan kode pos untuk kepentingan pemilu *online* ataupun layanan publik. Pemerintah harus memiliki pusat data kependudukan *online* yang bisa dipantau masyarakat setiap saat. Tiap perubahan data (ada warga baru, pindah alamat, meninggal, pensiun, menikah, dan lain-lain), aparat di desa, kecamatan atau di dispenduk tinggal melakukan data *entry* sehingga database kependudukan di pusat data selalu *up to date*, valid, dan transparan.

HARIYANTO IMADHA
indodata@yahoo.com

Kartu Tanda Pengenal Pengurus Jasa Keimigrasian Sarat Pungli

Saya pembaca setia BI, ingin menyampaikan keluhan atas pelayanan Publik Keimigrasian. Pada saat saya akan mengurus Surat keimigrasian rekanan kerja perusahaan saya, di salah satu kantor imigrasi, saya melihat banyak orang menggunakan kartu Pengurus Jasa Keimigrasian yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, DKI Jakarta. Kata mereka jika kita tidak memiliki kartu tersebut kita tidak akan dilayani. Mendengar hal itu, saya menanyakan caranya dan mendapat informasi bagaimana mendapatkan kartu tersebut. Pertama kita harus mengisi formulir, lalu kita minta rekomendasi dari Kanim.

Untuk mendapatkan rekomendasi, kita harus membayar Rp 100.000. Setelah itu kita ajukan ke kantor wilayah, di sini kita harus membayar Rp 250.000 untuk menunggu dua minggu kartu jadi. Jika kita melihat bentuk kartu yang dikeluarkan kanwil DEPKUMHAM sudah barang tentu kita akan bertanya-tanya. Pada bagian sisi depan kartu tersebut terdapat logo Pengayoman dan Imigrasi, di bawahnya bertuliskan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan tampilan itu terlihat jelas kewibawaan kartu tersebut. Sementara di sisi belakang kartu berisi tiga poin peraturan dan ditandatangani oleh pejabat eselon II atas nama kepala kantor wilayah kepala Divisi Keimigrasian.

Jika dilihat dari bentuk kartu, pemegang kartu mempunyai kesamaan dengan karyawan PNS Imigrasi. Lalu apa dasar pemungutan biaya pembuatan kartu tersebut. Saya pernah mendengar pembicaraan salah seorang wartawan di kantor pusat imigrasi dengan Bpk Nugroho Anung Nindito, yang per 2 April 09 menandatangani kartu tersebut. Dia mengatakan hanya melanjutkan tugas dan berpedoman pada keputusan Dirjen Imigrasi tahun 1987, yang kita ketahui dalam keputusan Dirjen Imigrasi tersebut tidak ada ketentuan biaya. Lalu ke mana dana itu mengalir sebab hingga saat ini tercatat 800 orang pengurus?

Apakah Dirjen Imigrasi Bapak Basyir A Barmawi mengetahui tentang hal ini? Karena menurut hemat saya jika salah seorang pengurus pemegang kartu tersebut melakukan pelanggaran maka yang bertanggung jawab adalah Dirjen Imigrasi. Saya mohon Bapak Dirjen Imigrasi segera melakukan evaluasi tentang hal ini. Demikian keluhan dan temuan saya di lapangan, semoga bermanfaat serta menjadikan layanan imigrasi lebih profesional.

BURHAN ADIL, JAKARTA

Golput Cermin Apatisme Rakyat

Pemilu legislatif telah berlangsung. KPU yang selama ini dikritik dan dipertanyakan kesanggupannya dalam melaksanakan pemilu sesuai jadwal ternyata dapat menunaikan tugasnya. Dengan kekurangan di sana-sini, terutama menyangkut logistik, tepat 9 April lalu pesta demokrasi dilaksanakan. Hasil pun didapat. Sembilan partai berhasil melampaui angka 2,5% yang ditetapkan. Sayangnya, angka golput pada Pemilu 2009 mencapai lebih dari 30%. Tingginya angka golput pada pemilu legislatif ini membuktikan apatisme rakyat terhadap pelaksanaan pemilu di Indonesia. Sikap apatis ini bukan tanpa sebab. Rakyat belum melihat perubahan mendasar dalam kepemimpinan terutama yang mengedepankan kepentingan rakyat. Parpol-parpol lebih sibuk mengejar materi dan kekuasaan dibanding menyusun program yang mensejahterakan rakyat kecil.

MEDIANA
mediana@plasa.com



Tempat Anda untuk Berlangganan Majalah BERITAINDONESIA

Anda yang berada di luar Pulau Jawa dapat menghubungi alamat di bawah ini :

BANDA ACEH : BTN Ajuen, Lr Melati No. 118 Kec, Peukan Bada, Banda Aceh 23351. Tlp (0651)41093, **MEDAN** : Komplek Vila Palm Kencana Blok R No. 10 KM 12, Medan-Binjai 20351. Tlp (061)8460646, **SIANTAR** : Jl. Rambung No. 18, Pematang Siantar, **LABUHAN BATU** : Jl. Padang Bulan No. 28, Rantau Prapat. **KARO** : Jl. Sangab Enlrau No. 51 Kaler Jahe. **RIAU** : Jl. Ababil No. 15B Rt 07 Rw. 07, Kel. Kampung Melayu, Kec. Sukajadi Pekanbaru 28124, Riau. Telp (02761) 26578, **RIAU UTARA** : Perum Beringin Patra Gg. Poros No. 3 Rt 02/09, Bukit Datuk, Dumai 28825. Telp (0765)36219. **RIAU SELATAN** : Jl. Pattimura No. 28C Rt. 06/02, Kel. Skip Hillir, Rengat Timur, INHU, Riau. Telp (0769)21932, **RIAU KEPULAUAN** : Jl. Sri Pulau Gg. Kayu Manis No. 129W Rt. 03/02, Kel. Bengkalis Riau. Telp (0766)22924, **PADANG** : Jl. Pamancangan I No. 1Rt. 006/02 Kel. Pasar Gadang, Padang Selatan, Sum-Bar 25210. Telp (0751)27289, **JAMBI** : Jl. Depati Purbo, Komplek Karya Telawai Permai II No. 06 B, Kel. Pematang Sulur RT 16, Kec. Telanaipura, Kota Jambi. Telp 081366106709, **BENGKULU** : Jl. Kemang Manis No. 8 Rt. 08/Rw. 2, Kel. Sawah Lebar, Kec. Gading Cempaka, Kodya Bengkulu 38228. Telp (0736)20663, **PALEMBANG** : Perum Mas Karebet Blok A1 No. 15 Palembang 30154. Telp (0711)416545, **MUARA ENIM** : Perum Gunung Ibul Blok C2 No. 8 Kab. Prabumulih Sumatera Selatan Telp (0713)322420, **PANGKAL PINANG**: Achmad Effendi, Jl. Sriwijaya RT.001/001, Gedung Nasional, Taman Sari. **LAMPUNG** : Jl. Wiraswasta No. 23 Rt. 02 Lk. I Kel. Gedong Meneng, Kec. Kedaton, Bandar Lampung 35145. Telp (0721)701281, **KOTABUMI** : Jl. Jend. Sudirman No. 49 Kota Gapura Kotabumi Lampung Utara. Telp (0724)328369, **PONTIANAK** : Jl. Karimata No. 19, Kelurahan Sui Bangkong Pontianak 78116, **SINGKAWANG** : Jl. Pembangunan Gg. Sukaramah No. 27A Singkawang Kal-Bar, **SINTANG** : Jl. Imam Bonjol No. 54 Sintang 78611. Telp (0562)21544, **KETAPANG** : Jl. Kol. Sugiono No. 48 Ketapang, **BALIKPAPAN** : Jl. Sepinggan XI, Rt 33 No. 6, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kodya Balikpapan 76115. Telp (0542) 764365, **PASIR** : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 12 Rt. 05 Rw. 02 Tanah Grobot Kab. Pasir, Kal-Tim. Telp (0543)22335, **SAMARINDA** : Jl. Latsitarada III, Perum Bukit Indah Blok B No. 6, Kel. Sel Kunjang Samarinda. Telp (0541)273035, **BERAU** : Jl. SM Aminuddin No. 749 Tanjungredep Kab. Berau Kal-Tim. Tlp (0554)23130, **BANJARMASIN** : Komplek Kayu Tangi I No. 28 Rt. 45, Kec. Banjar Utara Banjarmasin 70123. Telp (0511)304396, **PALANGKARAYA** : Jl. Karanggen No. 1 Kelurahan Tanjung Pinang, Kec. Pahandut, Kodya Palangkaraya 73113, Kalimantan Tengah. Telp (0536)38958, **PANGKALAN BUN** : Jl. Perwira No. 1 Rt/Rw 05, Kel. Mendawai, Kec. Arsel, Pangkalan Bun Kal-Teng. Telp (0532)24452, **KAPUAS** : Jl. Seroja No. 2 Selat Dalam, Kuala Kapuas, Kal-Teng. Telp (0513)24082, **BUNTOK** : Jl. Ampah Buntok, No. 24 Rt. 40. Ampah, Barito Selatan, Kal-Teng. Telp (0622)31334, **MANADO** : BTN Nusantara Permai Blok C No. 11 Mapanget Barat, Manado 9524, **MAKASSAR** : Komplek Mangasa Permai Jl. Tallasalapang II Blok J1 No. 12, Makassar, Sul-Sel. Telp (0411)863655, **PAREPARE** : Jl. Wakke'e No. 5 Parepare Sul-Sel. Telp (0421)22785, **GOWA** : Jl. Syekh Yusuf V/I Gowa. Telp (0411)861661, **BONE** : Jl. Hussain Jeddawi Baru No. 9A, Bone, Sul-Sel. Telp (0481)2000041, **PALOPO** : Jl. Imam Bonjol No. 3 Palopo. Telp (0471)24310, **PALU** : Jl. Tulip II No. 1, Perumnas Balaroa, Palu, Sul-Teng. Telp (0451)460717, Fax. (0451)460717, E-mail: ypi_calebaswustho@yahoo.com. **KENDARI** : Jl. A. Yani 204 Kendari, Telp (0401) 390913, HP. 081320696320 a/n. S. Edi Nurrahman. **BUTON** : Jl. MH. Thamrin No. 32A, **AMBON** : BTN Kanawa Indah Blok C-3 No. 12 Air Kuning, Ds. Batumerah Kodya Ambon, Maluku 97128. Telp (0911)310427, **TIMIKA** : Jl. Pendidikan No. 10, Desa Kopro Kopa, Kec. Mimika Baru, Kab. Mimika/Timika, Irian Jaya, **KUPANG** : Jl. Trikora No. 16 Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Air Mata, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang NTT 85000, **BELU** : Perum Ray Belu Permai A/9, Belu. Telp (0389)22408, **MATARAM** : Jl. R. Suprpto No. 37 Ampenan, Kodya Mataram 83000. Telp (0370)632331, **LOMBOK** : Jl. Pejanggih No. 66 Pancor. Lombok. Telp (0376)21718, **SUMBAWA** : Jl. Hasanuddin Gg. Teratai, Sumbawa. Telp (0371)21070, **BALI** : Jl. Buana Raya Gg. Buana Kerti No. 3 Pd.Sambian Denpasar Barat 80117. Telp (0361)485890, **MALAYSIA** : 32 Jalan Tengku Ampuan Zabedah 9/A, 40100 Shah Alam, Selangor. Telp (03)55137009. **JAWA BARAT** : , Ade Wiharyana, Jl. Purnawarman No.5, Bandung – **TARAKAN** : S.L. Pohan, Jl. Gereja Rt.17 No.59, Markoni, Tarakan - Kaltim 771211 – **PURWAKARTA** : Bernard Sihite, Kantor Perwakilan PWI, Jl. KK Singawinata No.23, Purwakarta, Tlp. (0264) 205081

Gempar Flu Babi

Setelah menjangkiti ribuan dan menewaskan ratusan orang di Meksiko, virus yang disebut cocktail virus (gabungan antara flu babi Asia, flu babi Eropa, dan influenza pada manusia, yang bermutasi) mulai meluas hingga Amerika Serikat, Eropa (termasuk Inggris, Swedia, dan Italia), Afrika (Kenya), Selandia Baru, Israel dan Asia Timur.

Flu babi menjadi ancaman paling ditakuti di seluruh dunia saat ini. Setelah membunuh lebih dari 100 rakyat Meksiko, jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah. Berbagai negara mulai Selandia Baru hingga Spanyol memperingatkan warganya untuk tidak bepergian ke Amerika Utara. Pemerintah negara-negara lain sudah siap siaga melakukan karantina, memperketat aturan impor daging babi, dan memeriksa suhu tubuh penumpang pesawat.

Melihat perkembangan virus flu babi yang kian mengkhawatirkan dunia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, dan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadillah Supari (27/4). Presiden meminta semua departemen terkait tidak menganggap ringan penyakit flu babi meskipun sampai saat ini belum terjadi penyebaran di kawasan Asia.

Menkes Siti Fadillah Supari usai bertemu dengan presiden mengimbau masyarakat untuk tidak panik terhadap kemungkinan munculnya penyakit flu babi di Indonesia. Menurutnya, tingkat kematian karena flu babi jauh lebih rendah daripada flu burung. Tingkat kematian karena flu burung mencapai lebih dari 80%. Adapun tingkat kematian karena flu babi berkisar 6,4%. Jadi, virus H5N1 masih lebih ganas dibandingkan virus H1N1 atau lebih dikenal sebagai virus flu babi. Menkes juga menambahkan, virus flu babi hanya berkembang di negara empat musim (subtropis) sehingga agak sulit untuk berpotensi menyebar di wilayah tropis seperti Indonesia. Berdasarkan konfirmasi WHO, flu babi yang menjangkiti sejumlah negara adalah *cocktail virus* yang merupakan gabungan antara flu babi Asia, flu babi Eropa, dan influenza

pada manusia, yang bermutasi.

WHO menginformasikan, flu babi adalah penyakit sistem pernapasan akut yang terjadi pada babi. Sebagian besar virus flu babi merupakan turunan virus H1N1, namun ada beberapa turunan virus ditemukan pada babi seperti H1N2, H3N1, H3N2. Babi juga dapat terinfeksi

menyebutkan, virus ini menular dari orang ke orang. Penularannya melalui bersin, batuk atau ketika seseorang terkena virus ini dari tangan mereka yang tidak dicuci bersih.

Tanda awal terkena flu babi mirip flu biasa yakni demam lebih dari 37,77 derajat Celcius, lelah, nafsu makan hilang dan batuk. Dalam beberapa kasus, penderita mengalami hidung berlendir, tenggorokan sakit, muntah-muntah dan diare. Virus dapat menyebar melalui udara, kontak langsung atau tidak langsung melalui babi pembawa virus yang tidak menunjukkan gejala flu. Jika virus ini menular antarmanusia, pandemi influenza bisa terjadi.

Apakah virus flu babi bisa menular lewat konsumsi daging babi? CDC mementahkan kemungkinan itu. Sebab, babi yang masuk ke tempat pemotongan hewan harus dipastikan bebas dari flu. Selain itu, proses pemasakan daging akan membunuh virus.

Untuk mewaspadai munculnya penyakit tersebut di Indonesia, pemerintah telah memasang alat *thermal scanner* di 10 bandara internasional di Indonesia. *Thermal scanner* adalah alat yang dapat mendeteksi suhu tubuh manusia yang bertemperatur tinggi. Jika tubuh manusia yang diperiksa lebih dari 38 derajat Celcius, alat akan berbunyi. Pemerintah juga mengeluarkan *travel advisor* bagi warga negara Indonesia yang akan bepergian ke kawasan Amerika Utara. Seluruh penumpang tanpa kecuali akan ditanyakan apakah pernah ke Meksiko, Amerika Serikat, Kanada, dan sebagainya.

Departemen Kesehatan (Depkes) telah meminta pihak terkait untuk menghentikan impor daging babi. Selain itu, Depkes melakukan pengawasan pada

sejumlah peternakan babi di Indonesia yang jumlahnya kini 9 juta ekor. Pemerintah sudah menyiagakan 30.000 orang tenaga kesehatan dan relawan terlatih, 100 rumah sakit rujukan, dan stok tamiflu yang banyak. Virus H1N1 yang menjadi penyebab flu babi sejauh ini dilaporkan punya sifat mirip H5N1 penyebab flu burung.



WASPADA: Para penumpang pesawat internasional diperiksa suhu tubuhnya dengan *thermal scanner* saat tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta, 28 April 2009

virus flu burung dan flu manusia. Virus-virus itu dapat menyerang secara bersamaan dan menciptakan mutasi rantai baru.

Pada beberapa kasus flu babi yang muncul di Meksiko terdapat strain baru virus H1N1 yang belum pernah ditemukan. Badan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS atau Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Situ Gintung Jebol

28/03 - Akibat hujan deras yang turun selama lima jam pada Kamis (26/3) malam, tanggul Situ Gintung, Cirendeu, Tangerang Selatan, jebol, Jumat sekitar pukul 05.00. Wilayah seluas 10 hektar di Cirendeu menjadi porak-poranda diterjang air bah yang datang seperti tsunami. Data di Posko Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dan Posko Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Achmad Dahlan menunjukkan jumlah korban tewas mencapai 65 orang, 98 orang hilang, 52 orang cedera, dan 25 orang dirawat di Rumah Sakit Fatmawati. Sebagian besar korban yang tewas adalah perempuan dan anak-anak. Jebolnya tanggul buatan Belanda tahun 1932-1933 ini menghancurkan perumahan warga di Kampung Poncol dan Kampung Gintung. Sekitar 300 rumah yang ada di wilayah itu rusak dan hancur. Sementara itu, banjir melanda Perumahan Bukit Pratama dan Perumahan Cirendeu Permai yang terletak di tepi Kali Pesanggrahan.

Ryan Dihukum Mati

06/04 - Hakim akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Very Idam Henyansyah alias Ryan bin Ahmad (30), terdakwa kasus pembunuhan dengan mutilasi, pada sidang pembacaan putus-

an yang digelar di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Ia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana terhadap Heri Santoso (40). Hakim ketua Suwidya mengatakan berdasarkan dakwaan primer, yakni pasal 340 tentang pembunuhan berencana, Ryan terbukti telah memenuhi empat unsur yang terkandung di dalamnya yaitu unsur barang siapa, dengan sengaja, dengan direncanakan, dan menghilangkan nyawa orang lain. Hakim mempertimbangkan hal-hal berikut yaitu terdakwa melakukan perbuatan yang sadis, perbuatannya meresahkan masyarakat, terdakwa mengaku telah melakukan 11 pembunuhan di Jawa Timur, dan terdakwa tidak tunjukkan rasa penyesalan.

Pilot Garuda Divonis 2 Tahun

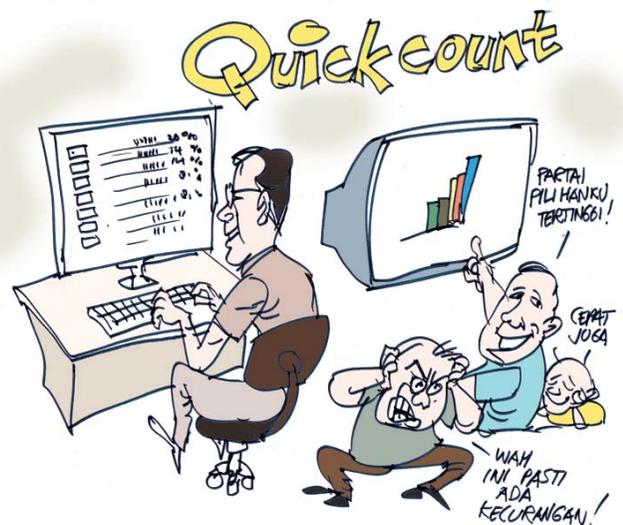
06/04 - Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan vonis dua tahun penjara potong masa tahanan kepada pilot Garuda, Marwoto Komar. Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Sri Andini SH menilai Marwoto terbukti secara sah dan meyakinkan lalai dalam menjalankan tugas sehingga menyebabkan pesawat Garuda GA 200 mengalami kecelakaan di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, 7 Maret 2007 lalu.

Marwoto dianggap melanggar pasal 479 g huruf (b) dan huruf (a) KUHP. Akibat kealpaan atau kelalaian itu, pesawat celaka, rusak dan hancur tidak dapat dipakai lagi serta menyebabkan orang lain meninggal dunia. Kecelakaan tersebut mengakibatkan 21 penumpang tewas, lima diantaranya warga Australia, dan puluhan penumpang lainnya terluka. Sejumlah saksi mata menuturkan adanya kejanggalan sebelum kecelakaan terjadi, misalnya kecepatan pesawat tidak berkurang saat akan mendarat.

Pesawat AU Jatuh, 24 Anggota Paskhas Tewas

07/04 - Tewasnya 17 siswa Pendidikan Kualifikasi Khusus Para Lanjut Tempur TNI Angkatan Udara beserta enam pembina TNI AU dan seorang instruktur pada saat latihan penerjunan di Lapangan Udara Husein Sastranegara, Bandung, Senin (6/4), merupakan kehilangan besar bagi bangsa Indonesia, terutama TNI AU. Demikian ditegaskan Kepala Staf TNI AU Marsekal Subandrio. Musibah jatuhnya pesawat Fokker F-27 TS seri A-2703 milik Skadron Udara 2 Lanud Halim Perdanakusuma terjadi sekitar pukul 12.30 diakibatkan kondisi cuaca buruk, hujan badai disertai angin kencang.

Karikatur Berita



Partai Demokrat Ungguli PDI-P dan Golkar

09/04 - Tiga partai papan atas, yaitu Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Golkar, mengungguli perolehan suara dalam pemilihan umum legislatif, Kamis (9/4). Meski demikian, konfigurasi politik kini berubah karena Partai Demokrat berhasil menggeser dominasi PDI-P dan Golkar yang berjaya dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Dua partai baru, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), berhasil menembus parliamentary threshold bersama Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Penyelenggaraan pemilu kali terkesan kurang lancar, menyusul banyaknya persoalan yang muncul, baik sebelum maupun pada hari pemungutan suara. Masalah yang paling mencolok adalah semrawutnya daftar pemilih tetap (DPT) yang menyebabkan sebagian rakyat Indonesia tak bisa menggunakan hak pilih. Ditambah lagi, ribuan calon pemilih yang terdaftar dalam DPT pada hari pemungutan suara berada di rumah sakit, rumah tahanan/lembaga pemsayarakatan, dan tempat lain yang membutuhkan perlakuan khusus tidak bisa memberikan suara karena KPU tidak menyediakan TPS khusus atau TPS keliling. Secara umum, pelaksanaan



Sebanyak 17 siswa Pendidikan Kualifikasi Khusus Para Lanjut Tempur TNI Angkatan Udara beserta enam pembina TNI AU dan seorang instruktur yang tewas saat latihan penerjunan di Lapangan Udara Husein Sastranegara, Bandung, Senin (6/4) diantar dalam peti mati oleh rekan-rekannya.

pemilu berlangsung aman.

Prabowo-Wiranto Bentuk Sekber Gugat Pemilu

13/04 - Kedua tokoh parpol Jenderal (Purn) Wiranto (Hanura) dan Letjen (Purn) Prabowo Subianto (Gerindra), bertemu di Kantor DPP Partai Hanura di Jakarta. Mereka sepakat membentuk Sekretariat Bersama Kebenaran untuk Perubahan. Sekber yang diperkuat lembaga hukum itu akan menginvestigasi sejumlah kecurangan dan ketidakberesan sepanjang proses pemilu legislatif, yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk gugatan hukum. Saat datang dan menghampiri Wiranto yang menjemputnya di lobi gedung DPP Hanura, Prabowo memberi hormat ala

militer dengan sedikit membungkuk kepada Wiranto. "Penyikapan kami sama, ada yang tidak beres dengan pemilu legislatif. Kami akan ungkap apa yang sebenarnya terjadi pada pemilu legislatif yang kami nilai cacat ini," kata Wiranto. Pernyataan keras juga dilontarkan Prabowo terhadap pelaksanaan pemilu legislatif. Ia menilai ada kecurangan sistematis dalam prosesnya. Ini adalah pemilu terjelek sepanjang sejarah dan juga sangat memalukan.

Bank IFI Ditutup

17/04 - Penutupan Bank IFI yang dilakukan secara mendadak membuat nasabah Bank IFI mengaku kaget dan segera mendatangi kantor pusat Bank IFI yang terletak di Office Park Plasa Asia, Jalan Sudirman, Jakarta. Bank

Karikatur Berita



milik pengusaha Bambang Rachmadi itu gagal mencari tambahan modal sehingga terpaksa ditutup. "Sebelumnya memang sudah di bawah pengawasan khusus. BI telah meminta pemegang saham pengendali untuk menginjeksi tambahan modal tapi tidak dipenuhi sehingga BI memutuskan likuidasi bank tersebut," kata Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan BI, Wimboh Santoso dalam jumpa pers di gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta. Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati di Jakarta menjelaskan keputusan untuk menutup operasional Bank IFI dilakukan karena dampaknya tidak sistemik ke sistem perbankan secara nasional. Ini adalah langkah terbaik karena tidak ada alternatif lain untuk menyelamatkan Bank IFI. Ketua Tim Persiapan Likuidasi sekaligus Kepala Divisi Likuidasi LPS Robert Hutabarat menjelaskan nasabah Bank IFI merasa tenang dan tidak khawatir dengan penutupan Bank IFI karena sudah memahami bahwa dana pihak ketiga akan diganti oleh pemerintah.

Lima Kriteria Calon Wapres Versi SBY

19/04 - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang mencalonkan diri sebagai presiden kembali, menyebutkan lima kriteria calon wakil presiden yang akan mendampingi dalam Pemilu Presiden 2009. Lima kriteria yang dimaksud adalah memiliki integritas, kepribadian, karakter

moral, termasuk moral politik yang baik; memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai pembantu presiden sesuai dengan UUD 1945; memiliki loyalitas yang penuh kepada pemerintah dan bebas dari konflik kepentingan; memiliki akseptabilitas dalam arti diterima dan lekat di hati rakyat; serta dapat meningkatkan kekokohan dan efektivitas koalisi yang dibangun. "Sampai sekarang, saya belum menemukan," ujar Yudhoyono di Puri Cikeas Indah, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Partai Demokrat membentuk Tim Sembilan yang dipimpin Ketua Umum Hadi Utomo untuk mencari calon wapres sesuai dengan kriteria itu. Sudah banyak parpol yang diajak bicara tentang kebersamaan dan koalisi di pemerintahan dan parlemen pada periode 2009-2014.

Pengawasan UN Ketat

20/04 - Pelaksanaan ujian nasional (UN) untuk siswa tingkat SMA/SMK/MA berlangsung selama 5 hari, 20-24 April 2009 dan untuk SMP/MTs 27-30 April 2009, diawasi secara ketat. Di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menjamin ujian nasional yang diikuti 120.130 siswa di DKI Jakarta tidak akan bocor. "Kami melakukan pengawasan ketat di semua lini," katanya saat meninjau pelaksanaan UN (20/4). Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah tindak kecurangan oleh peserta UN maupun pengawas. Mulai dari menambah jumlah pengawas di ruangan

pelaksanaan UN, jumlah pemantau, larangan membawa telepon seluler, hingga larangan hadir di dalam ruang ujian bagi kepala sekolah dan guru mata pelajaran yang diujikan. Kepala sekolah dilarang mengawasi UN dan harus terus bersama anggota tim pemantau.

Kampanye Cinta Indonesia

22/04 - Kampanye Cinta Indonesia dan logo "100% Cinta (gambar hati, Red) Indonesia" dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka pameran tahunan produk kerajinan Inacraft di Jakarta Convention Center. Kampanye yang bertujuan meningkatkan apresiasi dan kebanggaan menggunakan produk nasional ini tidak bersifat proteksionistik. Industri kerajinan nasional memberikan kontribusi sekitar 30 persen dari total produk industri kreatif di Indonesia dan melibatkan sekitar 700.000 usaha kecil menengah (UKM), serta menyerap 1,8 juta tenaga kerja. Menurut Presiden, pemerintah berkomitmen mengembangkan industri kreatif karena kontribusinya relatif signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Fasilitas pemerintah melalui kredit usaha rakyat (KUR) pada tahun 2009 dialokasikan mencapai Rp 20 triliun. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan gerakan cinta produk nasional tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga butuh dukungan semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan daya beli.



Pemilu Kacau



Pemilu Legislatif 9 April 2009 dinilai merupakan Pemilu terburuk sejak reformasi. Selain pimpinan dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai berpihak juga tidak memiliki kapasitas memadai. Akibatnya, penyelenggaraan Pemilu kacau-balau.

Pemilu legislatif 9 April lalu yang dimenangkan Partai Demokrat memunculkan sejumlah persoalan, mulai soal jutaan pemilih yang tidak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi di lain pihak ada yang ganda, orang mati dan anak di bawah umur

Kacau-Balau



masuk DPT (pemilih siluman), pengadaan logistik kacau dan kurang serta sebagian surat tertukar (amburadul), KPU terkesan kurang netral, politik uang makin marak, dan penghitungan hasil Pemilu yang lamban dan kacau-balau. Sangat terasa bahwa kualitas Pemilu 2009 tidak

lebih baik dari Pemilu 2004. Namun, pemerintah dan KPU terkesan membiarkan dengan tidak terlihat usaha sungguh-sungguh untuk menjelaskan duduk soalnya dan memperbaikinya sehingga Pilpres akan berjalan lebih baik, jujur, adil dan bermartabat.

Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang datang menggunakan hak pilihnya juga menurun. Sekarang mungkin 60-an persen pemilih yang mencontreng. Pada Pemilu Legislatif 2004, pemilih yang nyoblos mencapai 79 persen.

Penurunan ini bisa mungkin disebabkan banyaknya nama pemilih siluman, sebagai akibat dari verifikasi data yang memang jelek. Atau karena pemilih (DPT) tak datang, yang berarti masyarakat tak percaya pemilu bawa perubahan. Belum lagi akibat sistem yang buruk atau jangangan memang disengaja, yakni masalah jumlah pemilih tak terdaftar dalam DPT ternyata amat besar. Berakibat hak politik warga negara terabaikan.

Sehingga kekacauan Pemilu 9 April 2009 mendapat sorotan dalam pertemuan 23 petinggi partai politik di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri, Selasa (14/4/09). Mereka menandatangani pernyataan bersama dan menyimpulkan bahwa pemilu legislatif 9 April lalu itu merupakan pemilu terburuk sejak reformasi. Karena itu, mereka akan melakukan upaya hukum.

Pada intinya mereka mempersoalkan daftar pemilih tetap (DPT) yang bermasalah. Mereka juga menilai Pemerintah, KPU dan KPUD tidak netral dan mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menindaklanjuti semua kecurangan pemilu dan menegakkan hukum atas pelanggaran yang terjadi.

Pertemuan dan deklarasi sejumlah pimpinan partai politik dan tokoh nasional pada 14 April lalu di Teuku Umar itu ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDI-P), Wiranto (Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat), Prabowo Subianto (Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra), Abdurrahman Wahid (Ketua Umum Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa), Rizal Ramli, Sutiyoso, Ferry B Regar (Partai Damai Sejahtera), Bursah Zarnubi (Partai Bintang Reformasi), Idham Cholied (Partai Kebangkitan Nasional Ulama), Yusril Ihza

Mahendra (Partai Bulan Bintang), Totok Daryanto (Partai Amanat Nasional), Syahrir MS (Partai Republika Nusantara), Zulfan Lindan (Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia), Amelia A Yani (Partai Peduli Rakyat Nasional), Rusdi Hanafi (Partai Persatuan Pembangunan), dan Ryaas Rasyid (Partai Demokrasi Kebangsaan).

Kecurangan Sistematis?

Disoroti, kasus Daftar Pemilih Tetap (DPT) fiktif bukan disebabkan kesalahan administratif semata, tapi diduga sengaja dimanipulasi. Jika DPT fiktif yang banyak dijumpai di berbagai TPS itu memang sengaja dimanipulasi, maka hal itu bisa dianggap sebagai suatu bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi.

Direktur Eksekutif Lingkaran Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, menilai kisruh DPT dalam pemilu legislatif ini bukanlah semata-mata kesalahan administrasi. Menurutnya, negara harus bertanggung jawab. "Kesalahan massif seperti DPT saat ini tidak bisa disebut kesalahan administrasi biasa. Ini disengaja," tegasnya. Menurutnya, dengan anggaran dan waktu yang panjang, seharusnya pemerintah dan KPU dapat menghadirkan DPT yang jauh lebih berkualitas dibanding Pemilu sebelumnya. Menurut Ray, DPT Pemilu saat ini justru jauh lebih buruk dibanding DPT Pemilu 2004.

Sementara itu, aktivis pro demokrasi, Fadjroel Rahman menyebut pemalsuan DPT sebagai kelalaian administrasi yang disengaja dan direncanakan adalah upaya machiavelistik mempertahankan kekuasaan.

Penyelenggaraan Pemilu yang karut-marut, selain telah membuat banyak masyarakat bingung saat masuk di bilik suara, juga telah menimbulkan kekecewaan berbagai pihak. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan tegas menuding penyelenggaraan Pemilu kali ini kacau balau. "Ini pemilu paling buruk selama sejarah republik," kata Prabowo, usai bertemu Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, di kantor DPP Hanura, Jl Diponegoro, Jakarta, Senin (13/4/2009).

Menurut Prabowo, ada kecurangan sistematis yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk tujuan tertentu dalam pemilu kali ini. "Saya menilai ini ada

kecurangan sistematis. Bagaimana ada anak kecil masuk DPT, tapi orang yang sudah tinggal bertahun-tahun tidak masuk? Ini memalukan,” tegasnya.

Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengaku kecewa dengan kinerja KPU. “Saya kecewa sekali. Tapi kita tidak boleh langsung begitu saja mengganti anggota KPU atau memundurkan pemilu. Yang penting kesalahan-kesalahan saat ini jangan diulangi kembali pada Pilpres nanti,” katanya.

Begitu pula Rizal Ramli yang memotori Blok Perubahan menilai pemilu legislatif kali ini merupakan pemilu terburuk sepanjang reformasi. Ia juga menilai KPU kurang profesional dan kurang independen dalam bekerja.

Rizal Ramli membandingkan anggota KPU Pemilu 1999, ada mantan Mendagri Rudini dengan anggota Adnan Buyung Nasution yang mengerti hukum. KPU Pemilu 2004, diisi oleh dosen-dosen yang tahu politik dan hukum. “Meski ada cacat uang, Pemilu 2004 berhasil,” kata Rizal dalam konferensi pers di Rumah Perubahan, Jalan Panglima Polim V, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, (11/4/2009).

Kekacauan penyelenggaraan Pemilu 9 April 2009 sebenarnya sudah diprediksi akan mungkin terjadi sejak awal seleksi anggota KPU. Tim yang ditunjuk dan dibentuk pemerintah tidak meloloskan beberapa nama yang oleh publik dinilai memiliki kapasitas lebih baik daripada calon anggota KPU yang diloloskan mengikuti *fit and proper test* oleh DPR. Entah sengaja atau tidak! Tapi yang jelas, lima orang anggota tim penyeleksi KPU 2009, tidak ada yang mendalami pemilu dan pekerjaan KPU. Sehingga sangat mungkin mereka tidak paham kriteria anggota KPU. Seleksi terkesan dilakukan terlalu politis dan seperti sekadar membuka lowongan pekerjaan.

Hasilnya, tidak satu pun anggota KPU yang mempunyai keahlian khusus (ilmuwan) di bidang politik apalagi keahlian khusus pemilu. Juga tidak ada ahli hukum pidana atau hukum ketatanegaraan. Ketua KPU Prof Dr Abdul Hafiz Anshary berlatar belakang pendidikan S-1, Peradilan Agama, IAIN Antasari, Banjarmasin (1982), S-2, Sejarah Peradaban Islam, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1992) dan S-3, Sejarah Peradaban Islam, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (2000). Guru Besar IAIN Antasari ini memang punya pengalaman sebagai Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan (2003-April 2005).

Begitu pula anggota KPU lainnya, Sri Nuryanti, Sip, MA, Dra Endang Sulastri, Msi, I Gusti Putu Artha, Sp, Msi, Prof Dr Ir H Syamsulbahri, MS, Dra Andi Nurpati, MPd dan H Abdul Aziz, MA tidak ada yang punya keahlian khusus mengenai Pemilu.



CONTRENG: Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan suaranya pada Pemilu 9 April 2009

Namun dalam seleksi awal oleh tim seleksi bentukan pemerintah yang diketuai Sarlito Wirawan, mereka inilah yang terpilih dengan nilai terbaik.

Sementara mantan Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti dan mantan anggota KPU Valina Singka tidak lolos. Tentang hal ini, Ramlan mengatakan bahwa ia dan Valina awalnya berat hati untuk mengikuti seleksi, tetapi atas desakan berbagai pihak yang meminta mereka maju lagi agar ada kesinambungan antara KPU 2009 dengan 2004, akhirnya mereka ikut. Ternyata, kata Ramlan, saya tidak lulus karena dianggap IQ rendah dan tidak loyal pada Pancasila.

Ketika penurunan kualitas Pemilu ini ditanyakan, Ramlan mengatakan jika pencapaian Pemilu 2009 setara dengan Pemilu 2004 itu sudah dianggap jalan di tempat. “Ternyata, kualitas pemilu sekarang menurun. Penurunannya lebih parah dari perkiraan saya,” kata Ramlan, sebagaimana dirilis Kompas, Minggu, 12 April 2009.

Ramlan Surbakti menyebut beberapa faktor yang membuat kualitas Pemilu kali ini menurun. *Pertama*, KPU Pemilu 2009 tidak punya kesinambungan dan pengembangan dari KPU sebelumnya. Semua mulai dari nol. Selain anggotanya baru, komisi juga tak berupaya menggunakan arsip pengalaman lama untuk menyempurnakan pemilihan sekarang. Kesalahan lama terulang, bahkan lebih buruk.

Kedua, anggota KPU sekarang dipersiapkan tidak memenuhi kualifikasi mengurus pemilu. Dari tujuh anggota, tak ada ilmuwan politik yang mendalami



Mantan anggota KPU 2004 Ramlan Surbakti

pemilu. Juga tak ada ahli hukum pidana atau hukum ketatanegaraan. Ia membandingkan dengan KPU Pemilu 2004, dari sembilan anggota, Hamid Awaludin memahami hukum; Nazaruddin Sjam-suddin ilmuwan politik yang punya pengalaman kenegaraan; Chusnul Mar'iyah punya keahlian politik dan kependudukan; dan Ramlan ilmuwan politik yang mendalami pemilu.

Ketiga, di antara ketujuh anggota KPU sekarang, tidak ada yang punya kepemimpinan baik. Semestinya anggota komisi menciptakan kebijakan makro-manajemen, sedangkan sekretariat jenderal membuat perencanaan operasional mikro. Namun, pembagian tugas itu sering tertukar.

Menurut Ramlan, KPU itu seharusnya mampu membuat peraturan pelaksanaan Pemilu yang menjabarkan dan menegakkan pasal multitafsir, meluruskan pasal



Ketua Umum Partai Hanura Wiranto



Fadjroel Rahman

kontradiktif, dan mengisi hal yang kosong agar Pemilu dapat dilaksanakan secara umum. "Soalnya, UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 punya banyak kekosongan hukum," katanya.

Selain itu, kata Ramlan, KPU juga bertugas membuat kebijakan perencanaan pemilu, harus bekerja transparan, mendengarkan, dan merespons pandangan publik. Juga harus punya kemampuan menghadapi parpol peserta pemilu yang punya logika berpikir sendiri.

Ramlan juga menilai KPU tak sepenuhnya mandiri, terutama dalam hal anggaran. KPU diperintahkan membuat tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu beserta anggaran dan sarana logistiknya, tetapi anggaran dikendalikan Departemen Keuangan dan DPR yang belum tentu sinkron dengan jadwal Pemilu.

Walaupun, Ramlan melihat hal itu tidak

bisa menjadi alasan bagi KPU untuk melimpahkan kesalahan ke pihak lain. Di sini anggota KPU harus punya kemampuan melakukan pendekatan dan koordinasi dengan instansi terkait.

Selain itu, Ramlan memberi contoh tentang perencanaan detail distribusi logistik KPU yang dinilai lemah. Sejak DPT ditetapkan Oktober 2008, ada lima bulan untuk menyiapkan, mendesain, dan mencetak surat suara. "Daerah terpencil mestinya diprioritaskan, bukan malah diakhirkan," jelasnya.

Ia mengatakan bahwa kasus surat suara tertukar pada Pemilu 2009 lebih banyak ketimbang Pemilu 2004, bahkan sampai antardaerah. Menurutnya, ini membuktikan ketidaktepatan KPU kabupaten/kota/kecamatan saat menyortir, melipat, menghitung, dan mendistribusikan surat suara.

Namun, menurut Ramlan, kekacauan dan menurunnya kualitas Pemilu 2009, tak bisa ditimpakan kepada KPU saja. "Sebagian pemilih tak proaktif mengecek Daftar Pemilih Sementara (DPS). Daftar kependudukan dari pemerintah daerah sebagai basis data penyusunan DPS juga tak akurat," ujarnya.

Ia menyarankan perlu diselidiki, di mana akar persoalan ini. Kalau KPU penyebabnya, komisi itu harus menyatakan bersalah dan menerima konsekuensinya. Kalau pemerintah dan pemda yang salah, harus ada pengakuan dan segera memperbaiki.

Demokrat Tak Curang

Menanggapi berbagai isu miring ten-

ting kekacau-balauan penyelenggaraan Pemilu, Presiden yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, mempertanyakan adanya tuduhan terhadap pemerintah dan partainya yang disebut telah melakukan kecurangan dalam Pemilu Legislatif 9 April lalu. Kemenangan yang diraih murni kemenangan rakyat.

SBY berharap agar berhati-hati mengklaim. "Bagaimana caranya curang, tak pernah terlintas sedikitpun untuk melakukan kecurangan, kan ada Bawaslu, Panwaslu, dan KPU. Bagaimana bisa curang?" kata SBY, Senin pagi 20 April 2009.

Perihal menurunnya perolehan suara beberapa partai, terutama Partai Golkar dan PDIP, SBY menjelaskan, barangkali yang memilih memang segitu. Partai Golkar meraih sekitar 74% suara pada pemilu 1997, turun menjadi berkisar 22% pada Pemilu 1999 dan 21,6% pada Pemilu 2004 serta sekarang turun menjadi 14,4% (perhitungan perolehan suara sementara KPU). "Barangkali yang memilih Golkar memang segitu," ujarnya.

Sedangkan penurunan suara PDIP, yang hanya meraih 3% di Pemilu 1997 bisa melonjak menjadi 33,8% persen pada Pemilu 1999. Ketika itu popularitas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memang tinggi. Kemudian pada Pemilu 2004, perolehan suara PDIP turun menjadi sekitar 19% dan turun lagi menjadi sekitar 14% (perhitungan perolehan suara sementara KPU). "Barang kali memang seperti itu. Bisa saja terjadi *It could be happen*," kata SBY.

Perihal perolehan suara Partai Demokrat (PD) yang hanya meraih suara sekitar 7% di Pemilu 2004 dan kini naik hampir 300 persen dengan meraih lebih 20 persen, SBY mengatakan PD bersyukur dengan hasil tersebut. "Mungkin sekarang rakyat mau pilih Demokrat," ujarnya.

Menanggapi hal itu, ketua dewan pakar Lembaga Pemantau Pemilu dan Pemerintahan Sumatera Utara (LP3SU), Avian E Tumengkol berpendapat, kemungkinan Demokrat curang itu ada. Avian menilai, dengan maraknya kecurangan dan sikap pemerintah yang kurang peduli dengan jalannya pemilu tahun ini, masyarakat yang menilai partai SBY curang tidak bisa disalahkan (Waspada Online, 20/4/09).

Menurut Avian, kemungkinan SBY atau partainya curang tidak tertutup. "Suara Demokrat melejit jauh dan tak tertandingi. Wajar bila ada opini yang menyoal pihak SBY curang," nilai Avian. Avian berpendapat, ketidakpedulian pemerintah terhadap buruknya penyelenggaraan pemilu tahun ini menjadi indikasi bahwa kecenderungan pemerintah sengaja membiarkan kecurangan terjadi. Ia juga menilai KPU sepertinya mendapat perlindungan dari pemerintah,

meski sudah jelas kinerja pemilu sangat buruk dan tak terkendali. Hal ini mengundang pertanyaan apakah ada kemungkinan konspirasi pemerintah-KPU sengan mengacaukan Pemilu untuk kepentingan partai tertentu?

Kinerja KPU Mengecewakan

Berbagai saran dan kritik yang ditujukan kepada pemerintah dan KPU tampaknya kurang mendapat respon positif. Terlihat dari nyaris tidak adanya upaya perbaikan dari pihak pemerintah dan KPU. Mulai dari masalah amburadulnya DPT sampai kinerja pelaporan hasil penghitungan suara secara elektronik.

Hingga berakhirnya proses tabulasi nasional di Pusat Tabulasi Nasional Pemilu di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (20/4), penghitungan elektronik, jumlah suara yang masuk hanya 13 persen dari seluruh tempat pemungutan suara yang ada. Setelah berlangsung selama 12 hari (pukul 19.00), hanya mampu menampilkan data penghitungan suara elektronik dari 68.023 TPS, atau 13,08 persen dari 519.920 TPS yang ada. Jumlah suara yang masuk mencapai 13.143.913 suara dari total jumlah pemilih 171.265.442 pemilih. Sangat jauh dari target KPU harus masuk dari 80 persen TPS atau 80 persen hasil perolehan suara. Padahal KPU telah menghabiskan dana besar untuk penghitungan elektronik ini.

Bukan hanya kecilnya data hasil penghitungan suara yang masuk, tetapi juga belum meratanya suara yang masuk dari semua provinsi. Sampai penutupan Pusat Tabulasi Nasional Pemilu di Hotel Borobudur, belum ada satu pun data hasil penghitungan suara dari TPS di Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua yang masuk ke pusat tabulasi.

Bahkan data TPS di DKI Jakarta, sebagai daerah yang paling dekat dengan KPU serta memiliki kualitas sumber daya manusia dan jaringan teknologi informasi yang memadai, baru masuk 2.537 TPS dari 16.982 TPS yang ada atau 14,94 persen.

Setelah Pusat Tabulasi Nasional Pemilu di Hotel Borobudur ditutup, KPU melanjutkan penghitungan suara secara elektronik yang ditayangkan di Media Centre KPU mulai Selasa (21/4). Hasil tabulasi nasional bisa diakses melalui website resmi KPU di <http://tnp.kpu.go.id/tab2009/>.

Perihal lambatnya penghitungan suara secara elektronik itu, anggota KPU Sri Nuryanti, mengatakan pihaknya berusaha mempercepat penghitungan secara elektronik. "Kami tidak bicara persentase, tapi bicara maksimal yang bisa diinfokan kepada masyarakat," kata Yaani, panggilan akrab Sri Nuryanti, setelah rapat pleno KPU di gedung KPU, Jakarta, 20/

4.

Disebutkan salah satu penyebab kelambatan penghitungan secara elektronik ini akibat dikonsentrasikannya tabulasi nasional Pemilu di tingkat kabupaten/kota. Pengiriman data dari kabupaten/kota ke pusat menjadi bertumpuk-tumpuk. Konsentrasi data yang tinggi itu mengakibatkan data yang masuk dari daerah ke pusat terhambat.

Selain itu, data antara scanner dan formulir tidak klop. Sebab, kualitas formulir C1 IT, ternyata buruk sehingga scanner kesulitan untuk memindai data angka hasil perolehan suara ke bentuk digital.

Tabulasi nasional Pemilu 2009 menyedot anggaran dua ratusan miliar rupiah. Sebanyak 471 kabupaten/kota menyedot anggaran Rp 94,2 miliar, khusus untuk pengadaan barang dan jasa serta honorarium operator tabulasi. Masing-masing KPU kabupaten/kota mendapatkan anggaran Rp 200 juta. 942 scanner untuk 471 kabupaten/kota menyedot anggaran Rp

an suara. Presiden pun mengukuhkan Menteri Dalam Negeri untuk berkomunikasi intensif dengan KPU dan memberikan bantuan yang dibutuhkan. Mendagri juga diminta untuk memastikan apakah tenggat penghitungan suara manual nantinya dapat dipenuhi. "Meskipun ini wilayah KPU dan kita tidak hendak mengintervensi, namun bagaimana rakyat mendapatkan *certainty* bahwa perhitungan suara itu akan selesai tepat pada waktunya," ujar Presiden.

Namun anggota KPU Andi Nurpati menggaransi tidak akan ada jadwal pengunduran penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ia menyatakan, tabulasi nasional pemilu hanyalah info awal yang diberikan KPU kepada publik. KPU tidak akan menjadikan itu sebagai pedoman untuk penghitungan. "Kami masih punya waktu untuk penghitungan manual," jelasnya. Sesuai UU Pemilu, hasil penghitungan manual itulah yang sah dan akan diumumkan 9 Mei nanti. Dia



TERPENCIL: Banyak daerah yang terlambat menerima logistik Pemilu 2009

21,1 miliar. KPU menetapkan harga satu scanner yang dilengkapi *software* ICR (*identity character recognizing*) sebesar Rp 22,5 juta.

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Pramono Anung mengatakan, ditutupnya Pusat Tabulasi Nasional Pemilu yang baru mencapai 13 persen suara, padahal pelaksanaan Pemilu sudah lewat duabelas hari, semakin menunjukkan bahwa Pemilu Legislatif 2009 ini banyak persoalan.

Bukan hanya kader partai dan masyarakat yang kecewa atas kinerja KPU, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga memprihatinkan kelambatan penghitung-

menyatakan, beberapa provinsi saat ini sudah menyelesaikan rekapitulasi. Yang telah selesai itu akan diprioritaskan untuk direkapitulasi di tingkat pusat.

KPU Jadi Pesakitan

Di satu sisi, kasihan juga melihat para anggota KPU yang kini jadi seperti pesakitan. Mereka dinilai gagal, tak becus, dan berpihak. Berbagai kritikan keras datang bertubi-tubi dari berbagai pihak. Bahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melaporkan KPU kepada Mabes Polri akibat pelanggaran pidana Pemilu terkait pengalihan surat suara



GUGAT: 23 petinggi partai politik sepakat menyatakan penyelenggaraan Pemilu 2009 terburuk sejak reformasi

yang tertukar ke perolehan suara partai politik yang disahkan KPU dalam surat edarannya Nomor 676/KPU/IV/2009 tertanggal 9 April lalu.

Beruntung, KPU terlindungi dengan penolakan Mabes Polri atas pengaduan Bawaslu itu. Kepolisian menilai KPU tidak bisa dipidanakan terkait dengan kebijakannya (surat edaran) tentang surat suara tertukar yang berakibat tidak bernilainya suara pemilih dalam konteks sistem suara terbanyak. Sebelumnya Mabes Polri telah menolak laporan Bawaslu tentang indikasi pelanggaran Pemilu oleh KPU dengan alasan, bukti yang dibawa oleh Bawaslu dinilai belum cukup. Namun setelah bukti disampaikan, kepolisian juga menolak dengan alasan KPU tidak bisa dipidanakan terkait dengan kebijakannya.

Dalam jumpa pers yang sengaja dilakukan Mabes Polri, di Jakarta Senin 20/4/09, Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim), Komjen Susno Duaji mengatakan unsur Pasal 288 UU No.10/2008 yang diajukan oleh Bawaslu tidak terpenuhi karena subjek hukumnya harus perorangan bukan lembaga.

Dalam laporannya, sesuai dengan pasal 288 Undang-undang No 10 tahun 2008, Bawaslu menganggap KPU memiliki indikasi melakukan tindakan pelanggaran Pemilu. Menurut Anggota Bawaslu Wir-dyaningsih hal ini berawal ketika KPU mengeluarkan surat edaran untuk meres-

pon ratusan laporan KPU kabupaten/kota perihal banyaknya surat suara tertukar baik antardaerah pemilihan maupun antarkabupaten/kota. Berdasarkan data Bawaslu, terdapat 312 kasus surat suara tertukar.

Melalui surat edaran itu, KPU mele-galisasi surat suara tertukar yang terlanjur digunakan pemilih. Tetapi, suara pemilih yang mencontreng calon legislator dialihkan ke perolehan suara partai politik. Bawaslu menilai tindakan itu sebagai pidana Pemilu karena membuat suara pemilih tidak bernilai karena mereka tak dapat memilih caleg yang diinginkan.

Advokasi Pemilu

Kendati penyelenggaraan Pemilu 2009 terlihat amburadul, namun terlaksana juga dengan damai. Nyaris tidak ada keributan (anarkis) yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Ketidakpuasan berbagai pihak atas proses penyelenggaraan dan hasil Pemilu, disalurkan melalui jalur hukum.

Pertemuan dan kesepakatan 23 petinggi partai politik yang menilai pemilu legislatif kali ini merupakan pemilu terburuk sepanjang reformasi, juga menyepakati penyelesaian masalah melalui jalur hukum.

Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Jenderal TNI (Purn) Wiranto, yang bertindak sebagai juru bicara pada pertemuan 23 petinggi parpol itu, Senin (20/4), kembali menemui Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno-

putri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat untuk menindaklanjutinya melalui proses hukum.

Wiranto mengatakan bahwa dalam Pemilu 2009 ini banyak pelanggaran hukum yang harus diselesaikan. Badan Pengawas Pemilihan Umum sudah melaporkan berbagai pelanggaran kepada kepolisian, tetapi kepolisian menolak. Menurut Wiranto, kesepakatan pada 14 April lalu perlu ditindaklanjuti untuk menjernihkan pelaksanaan Pemilu sebelum masuk ke tahap selanjutnya. "Kalau tidak diselesaikan, ini akan mencederai langkah hukum berikutnya, memcederai Pemilu berikutnya, yaitu Pemilu Presiden," kata Wiranto.

Blok Perubahan yang dimotori Rizal Ramli juga membentuk tim advokasi bernama Komite Advokasi Suara Rakyat (KASR) untuk menyelidiki kecurangan Pemilu. Beberapa partai peserta Pemilu 2009 ikut serta dalam tim ini antara lain Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Kedaulatan.

Rizal menegaskan, pihaknya sedang menyelidiki keterkaitan pembagian bantuan langsung tunai (BLT) di suatu tempat dengan kemenangan suatu parpol. Selain itu dia juga menyelidiki korelasi antara kekalahan suatu parpol di suatu TPS dengan pengurangan suara lewat DPT. ■
CRS, MLP, BHS



TEBAR PESONA: Susilo Bambang Yudhoyono ikut bernyanyi saat kampanye Partai Demokrat Maret lalu.

Lahirkan Peta Politik Baru

Partai Demokrat sebagai pemenang (peraih suara terbanyak) Pemilu Legislatif 9 April 2009, memegang kendali percaturan politik 2009-2014. Partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai Ketua Dewan Pembina, ini menggeser dominasi Partai Golkar dan PDIP.

Pemilu Legislatif 2009 menghasilkan perubahan peta politik 2004-2009. Berdasarkan hasil *quick count* berbagai lembaga dan hasil tabulasi nasional penghitungan suara secara elektronik yang secara resmi dilakukan KPU, Partai Demokrat tampil sebagai pemenang dengan meraih lebih 20% suara, mengungguli Golkar dan PDI Perjuangan yang keduanya melorot ke posisi dua dan tiga dengan perolehan suara di kisaran 14-15%.

Partai Demokrat, yang dalam Pemilu 2004 hanya meraih sekitar 7% suara, tampil perkasa dengan kenaikan hampir tiga kali lipat. Partai yang dipimpin Susilo

Bambang Yudhoyono (sebagai Ketua Dewan Pembina) ini menjungkirbalikkan harapan Partai Golkar dan PDI-P yang semula optimis akan meraih suara di atas 20%. Partai Golkar mengalami kemerosotan paling tajam.

Dari hasil perhitungan cepat (*quick count*) Lembaga Survei Indonesia (yang juga hampir sama dengan hasil *quick count* lembaga survei lainnya) menunjukkan hanya ada sembilan partai yang lolos ke Senayan, yakni: Partai Demokrat 20,65%, PDI-P 14,66%, Golkar 13,94%, PKS 7,81%, PAN 5,73%, PPP 5,27%, PKB 5,13%, Gerindra 4,64% dan Hanura 3,65%. Sementara 29 Parpol lainnya

hanya memperoleh suara di bawah 2% bahkan lebih banyak yang hanya meraih nol koma persen. Namun, jika diakumulasi perolehan suara 29 Parpol ini mencapai hampir 20%.

Hasil ini menunjukkan, selain akibat kemenangan Partai Demokrat dan kemerosotan Golkar dan PDI-P (tiga parpol papan atas), perubahan peta politik juga terjadi di papan tengah dengan keberhasilan dua partai baru meraih suara melampaui *parliamentary threshold* yakni Partai Gerindra dan Hanura.

Berdasarkan hasil *quick count* ini hanya ada dua partai peserta Pemilu 2004 yang meraih suara lebih tinggi (mengalami kenaikan) dari Pemilu 2004. Yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Yang lainnya mengalami kemerosotan. Bahkan Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Damai Sejahtera (PDS) yang semula punya fraksi di DPR harus rela terlempar dari Senayan.

Hasil Pemilu Legislatif ini melahirkan



MERAH: Dalam kampanye PDIP Maret lalu, Megawati Soekarnoputri tetap optimis kalau dia masih mendapat tempat di hati rakyat

peta politik baru baik di parlemen, terutama dalam rangka Pemilu Presiden. Partai Demokrat yang mengusung SBY tampil sebagai pemegang kendali dalam hal peta koalisi. Partai Golkar yang semula tampil gagah kemungkinan akan memilih menjadi penurut yang baik jika ingin berkoalisi kembali dengan SBY (Demokrat). PKS mungkin bisa bergabung, tapi tidak lagi dengan syarat kadernya menjadi Cawapres, walaupun sempat mengancam tidak akan berkoalisi dengan Partai Demokrat jika Partai Golkar ikut bergabung.

Sementara, siapa pesaing SBY? Megawati (PDI-P), Prabowo (Gerindra), Wiranto (Hanura) atau Sutrisno Bachir (PAN)? Sutiyoso, Sri Sultan dan lain-lain, tampaknya sudah duluan masuk kotak. Jika tidak ada perubahan dalam hal figur Capres, maka kemungkinan SBY akan dengan mudah memenangkan Pemilu Presiden 8 Juli 2009.

Kemenangan Partai Demokrat

Mengapa Partai Demokrat menang? Jawabannya ada dalam figur tokoh sentralnya yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam pengamatan *Berita Indonesia*, faktor penilaian subyektif atas ketokohan pemimpin partai masih sangat memengaruhi pilihan pemilih. Faktor popularitas SBY masih lebih dominan daripada mesin politik Partai Demokrat.

Jika dibandingkan dengan mesin politik Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mesin politik Partai Demokrat masih jauh tertinggal. Magnit popularitas SBY mengalahkan

mesin politik Golkar dan PDIP. Sehingga Golkar yang tidak lagi hanya mengandalkan ketokohan ketua umumnya, kendati memiliki kader yang lebih berkualitas dan mesin politik yang menjangkau desa-desa, ternyata dikalahkan partai yang masih baru.

Kepintaran SBY dan Partai Demokrat mengelola informasi, kendati kinerja pemerintah kurang menonjol, tetapi bisa dikelola seolah meraih keberhasilan. Kebijakan populis pragmatis, yang walaupun sangat tidak visioner dan tidak mendidik, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) diperkirakan turut memberi andil pada peningkatan popularitas SBY sekaligus memberi andil pada kemenangan Partai Demokrat. Ditambah lagi penurunan harga BBM hingga tiga kali menjelang Pemilu 2009, yang walaupun itu sebagai akibat penurunan harga minyak dunia (krisis global), bisa diangkat SBY menjadi seperti keberhasilan pemerintah.

Kondisi ini, dalam konteks berpolitik, para pemilih 'rasional pragmatis' cenderung mengedepankan kepentingan sendiri, yang mendorong pemilih memilih partai yang paling menjanjikan keuntungan. Apalagi dalam kondisi tekanan ekonomi, BLT, apalagi dilakukan menjelang pemilu, sangat berpengaruh pada penentuan pilihan pemilih. Bahkan BLT bisa menghapus memori kolektif publik atas kenaikan harga BBM, atau konversi minyak tanah, yang dilakukan pemerintah jauh hari sebelum pemilu.

Hal ini sekaligus menunjukkan realitas di lapangan bahwa masyarakat biasa pada umumnya tidak memiliki informasi yang

cukup lengkap untuk memberi penilaian obyektif di bidang politik. Bahkan publik (kebanyakan) tampaknya tidak berusaha untuk mengenali dan mengevaluasi pandangan politik parpol sebelum menentukan keputusan partai mana yang dipilih. Kepentingan sesaat seperti menerima BLT dan politik uang justru masih sangat menentukan.

Faktor popularitas SBY sebenarnya sudah dimulai sejak Pemilu 2004, baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden. Partai Demokrat yang baru lahir bisa meraih suara lebih 7 persen dalam Pemilu Legislatif, bahkan SBY bisa memenangkan Pemilu Presiden dengan meraih suara lebih 60 persen pada putaran kedua.

Hasil berbagai survei juga menunjukkan popularitas SBY terus membaik menjelang Pemilu Legislatif 2009. Berbeda dengan popularitas Megawati Soekarnoputri ketika menjabat presiden yang makin merosot menjelang Pemilu 2004. Berdasarkan angka kenaikan popularitas ini, dikaitkan dengan kemenangan Partai Demokrat, hampir bisa dipastikan SBY akan mudah mengalahkan para pesaingnya pada Pemilu Presiden 8 Juli 2009 nanti.

Namun, sesungguhnya SBY dan Partai Demokrat janganlah merasa telah meraih kemenangan mutlak. Secara riil, Partai Demokrat masih hanya meraih 20 persen. Sebanyak 80 persen lagi masih memilih partai lain yang juga berarti belum pasti memilih SBY sebagai presiden.

Terjadinya pergeseran pilihan para pemilih dalam tiga kali Pemilu sejak reformasi menunjukkan berbagai kemungkinan masih bisa terjadi. Karakteristik pemilih yang cenderung labil atau perilaku pemilih yang lebih retrospektif bisa melahirkan hasil Pemilu yang mengejutkan. Terbukti, tiga kali Pemilu berlangsung pascareformasi, tiga kali pula peta dominasi kekuatan politik berubah.

Telah terbukti pula, pemenang Pemilu Legislatif tidak otomatis terpilih menjadi presiden. Pada Pemilu 1999, PDIP meraih suara terbanyak (33 persen), tapi yang terpilih menjadi Presiden adalah KH Abdurrahman Wahid dari PKB yang menduduki peringkat tiga. Pada Pemilu 2004, Wiranto, Capres yang diusung Partai Golkar sebagai pemenang Pemilu hanya berada di urutan tiga Pilpres di bawah SBY dan Megawati. Dan akhirnya dimenangkan SBY yang diusung Partai Demokrat yang hanya meraih suara 7 persen lebih dalam Pemilu Legislatif.

Kemenangan Partai Demokrat bisa menjadi salah satu bukti semakin merapuhnya basis massa parpol besar dan parpol lama yang telah memiliki jaringan kuat, seperti Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. ■ CRS, ANP

Kekalahan Partai Golkar

Partai Golkar merupakan partai paling kalah dalam Pemilu Legislatif 2009. Paling memprihatinkan, beberapa petinggi partai ini nyaris tampil bagai pengemis demi berkoalisi dengan Partai Demokrat. Mengapa rakyat pemilih menghukum partai ini?

Jika melihat hasil penghitungan cepat oleh sejumlah lembaga survei, Partai Golkar berada pada posisi kedua dengan prediksi perolehan suara di kisaran 14,5 persen. Itu berarti perolehan suaranya merosot sekitar 7 persen dari 21,6% pada Pemilu 2004 menjadi 14,4% (perhitungan perolehan suara sementara KPU) pada Pemilu 2009.

Melihat kenyataan hasil Pemilu 2009 ini, tampak beberapa petinggi Golkar sangat gamang dan terkejut. Maklum, semula mereka merasa optimis akan meraih suara 30 persen. Bahkan dalam bulan terakhir menjelang Pemilu, telah dengan gagah berani menggadang Jusuf Kalla menjadi Calon Presiden. Jusuf Kalla pun dengan percaya diri menyatakan siap bertarung *head to head* dengan SBY. Sebab ia yakin akan dapat memimpin negeri ini dengan lebih cepat dan lebih baik dari SBY.

Memang Pemilu 2009 merupakan pemilu terburuk bagi Partai Golkar sepanjang sejarahnya. Pada dua pemilu pertama masa reformasi, Golkar masih relatif dominan dalam perolehan suara pemilu legislatif sebesar 22,44 persen (1999), berada pada posisi kedua setelah PDI-P. Bahkan berhasil mengalahkan PDIP dan kembali pada posisi pertama dengan perolehan suara 21,58 persen pada Pemilu 2004. Padahal dalam dua kali Pemilu pascareformasi itu, partai ini mendapat tantangan yang terbilang amat berat.

Tetapi perolehan suara Golkar merosot tajam, justru saat Ketua Umumnya, Jusuf Kalla menjadi wakil presiden dan tantangan yang dihadapi jauh lebih ringan ketimbang Pemilu 1999 dan 2004. Apa yang salah selama lima tahun terakhir dengan Golkar dalam kepemimpinan JK? Apa gerangan yang memicu rakyat sehingga menghukum partai ini?

Kemungkinan pertama adalah keasyikan beberapa petinggi dan pengurus



Jusuf Kalla menemui Megawati di kediamannya, 24 April 2009

daerah Partai Golkar mengajukan Jusuf Kalla sebagai Capres yang didorong harga diri dan ketersinggungan atas penyebutan perolehan Golkar hanya 2,5 persen, yang disampaikan pengurus Partai Demokrat.

Tampaknya, kesediaan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla mendeklarasikan diri sebagai calon presiden telah menjadi blunder karena berdasar hasil berbagai survei, preferensi masyarakat





DILEMA: Semangat Partai Golkar yang hendak mengajukan JK sebagai calon presiden menjadi bumerang

terhadap Jusuf Kalla sebagai capres amat rendah, yaitu sekitar 1,9 persen.

Selain itu, strategi untuk menarik suara pemilih, terutama pemilih yang masih ragu (*swing voters*) dan yang belum menetapkan pilihannya (*undecided voters*), tampaknya kurang tepat dibandingkan Partai Demokrat dan dua partai baru Partai Gerindra dan Partai Hanura, yang mempunyai basis massa yang sama.

Menurut Suhardi Suryadi, Direktur LP3ES, ada empat faktor lain yang menjadi sumber kekalahan Partai Golkar. Pertama munculnya kesadaran pemilih bahwa ideologi pembangunan tidak lagi monopoli Partai Golkar. Keberhasilan pembangunan bukan hanya karena hasil Golkar selama dalam kekuasaan. Bagi masyarakat awam, keberhasilan pembangunan adalah karya pemerintah, dan pemerintah adalah presiden. Mengingat Presiden SBY adalah Pembina Partai Demokrat, partai inilah yang diuntungkan. Ini sama seperti dalam Orde Baru.

Kedua, tidak berfungsinya infrastruktur partai, terutama organisasi-organisasi masyarakat dan kekaryaan yang menjadi *underbouw* sebagai mesin pengumpul suara. Selain mengalami perpecahan seperti Kosgoro dan terbelah orientasi dukungan politiknya, organisasi ini juga

tidak lagi mampu mengikat masyarakat anggotanya karena kegagalan dalam mengartikulasi kepentingan masyarakat dalam kehidupan keseharian. Bahkan, tidak sedikit organisasi *underbouw* Golkar pada dasarnya keropos.

Ketiga, beralihnya dukungan keluarga besar militer ke partai lain, terutama yang didirikan mantan pejabat militer, seperti Partai Demokrat, Gerindra, dan Hanura. Termasuk berpindahnya pemilih inti (*core voters*) Partai Golkar, seperti PNS, guru, dan serikat tani, ke partai lain. Hasil *exit poll* menunjukkan, 19,5 persen pemilih Golkar tahun 2004 berpindah ke Hanura, 11,5 persen ke Gerindra, dan 13 persen ke Demokrat. Meski ada pula pemilih partai lain yang beralih ke Golkar, angkanya relatif kecil, seperti 2,3 persen pemilih PKB.

Keempat, ketidakmampuan Partai Golkar menarik suara dari wilayah timur Indonesia. Padahal, Partai Demokrat sendiri juga tidak menguasai wilayah ini. Hal ini karena perhatian JK sebagai wakil presiden dalam pembangunan Indonesia timur amat terbatas di provinsi tertentu.

Nyaris Ngemis

Kepercayaan diri dan harga diri Partai Golkar yang menjelang Pemilu 9 April

begitu tinggi, tiba-tiba hilang. Bahkan, paling memprihatinkan, jika harga diri partai pun cenderung digadaikan demi kepentingan pragmatis kekuasaan sesaat. Ketika kenyataan Partai Golkar mengalami kekalahan, Jusuf Kalla dan beberapa petinggi partai yang berharap diangkat jadi menteri (barangkali), tanpa sungkan dan rasa malu, berbalik melangkah mendekati ke SBY dan Partai Demokrat.

Amat menyedihkan, jika gelagat mereka yang amat pragmatis untuk selalu dalam lingkaran kekuasaan dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat dan bangsa, bahkan terlihat seperti memohon belas kasihan dan nyaris mengemis untuk bisa diterima berkoalisi dengan Partai Demokrat. Golkar tak sungkan bagai menjilat ludah sendiri. Kata yang telah diucapkan bagai tak bermakna. Nyaris tidak ada konsistensi sikap. Ironisnya, dengan dalih (eksploitasi) demi kepentingan bangsa yang lebih besar, sikap oportunist ditunjukkan tanpa sungkan demi kepentingan pragmatis meraih kekuasaan.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, yang juga anggota Dewan Penasihat DPP Partai Golkar, mengatakan untuk koalisi, partainya mencari yang terbaik untuk bangsa. Apakah Susilo Bambang Yudhoyono yang terbaik untuk Golkar, ia berujar, "Lihat saja pencapaiannya. Jika pencapaiannya terbaik, ya, terbaik."

Pendapat senada juga dikemukakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu, dan Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso yang dengan tegas menyatakan partainya lebih baik berkoalisi dengan Partai Demokrat.

Priyo Budi Santoso menegaskan, mayoritas pengurus partai Golkar lebih memilih berkoalisi dengan Demokrat ketimbang PDI Perjuangan (PDIP). Meski demikian, Golkar tidak akan menutup kemungkinan berkoalisi dengan PDIP. Menurut Priyo, berdasarkan hasil rekomendasi dalam Rapat Konsultasi partai Golkar yang baru digelar, harapan berkoalisi dengan Demokrat lahir dari pertimbangan peluang kemenangan dalam pilpres. Dengan Demokrat, katanya, ada peluang besar untuk memenangkan pilpres sehingga Golkar bisa ikut membangun pemerintahan yang kuat dan efektif demi kemaslahatan bangsa.

Di tengah muncul sikap mengiba itu, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono merilis lima persyaratan Cawapres yang layak mendampingi dalam Pilpres mendatang. Menurut SBY, lima kriteria itu dirumuskan setelah mendengarkan masukan rakyat.

Kelima kriteria itu adalah: Pertama, memiliki integritas, kepribadian, karakter moral, termasuk moral politik yang baik; Kedua, memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai pembantu presiden sesuai dengan UUD 1945; Ketiga, memiliki loyalitas yang penuh kepada pemerintah dan bebas dari konflik kepentingan; Keempat, memiliki akseptabilitas dalam arti diterima dan lekat di hati rakyat; serta, Kelima, dapat meningkatkan kekokohan dan efektivitas koalisi yang dibangun.

Ketika kelima kriteria itu dikemukakan dalam jumpa pers, yang ditunggu Ny Ani Yudhoyono dan Sudi Silalahi di Puri Cikeas Indah, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Minggu (19/4), SBY menjelaskan bahwa sampai sekarang, ia belum menemukan orang yang sesuai kriteria itu. SBY juga menjelaskan, untuk mencari calon wapres yang sesuai dengan kriteria itu, Partai Demokrat membentuk Tim Sembilan yang dipimpin Ketua Umum Hadi Utomo.

Kriteria dan penjelasan ini menandai cepatnya pergerakan dinamika politik di Indonesia menjelang pemilihan presiden. Kriteria itu juga sontak menimbulkan hawa panas dalam tubuh partai beringin. Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla segera menemui SBY. Setelah itu JK memanggil pengurus DPP menghadiri rapat Senin malam pukul 19.00 (20/4/2009).

Sejumlah pengamat memprediksi, Partai Demokrat akan kembali rujuk dengan Partai Golkar. Tetapi tidak lagi harus menggandeng JK sebagai pendamping SBY. Pengamat politik LIPI Syamsudin Haris memperkirakan, figur Golkar yang akan dipilih SBY adalah Akbar Tandjung, karena JK dianggap tidak loyal. Menurut Syamsudin, ketidaktunggalan SBY kembali memilih JK sebagai calon wakil presiden, merujuk pada lima kriteria cawapres SBY, yang salah satunya adalah loyal terhadap presiden.

Sementara, Partai Demokrat tidak mau didikte partai mana pun dalam berkoalisi. Terbukti, Partai Demokrat mengharapkan Partai Golkar tidak mengajukan calon wakil presiden (cawapres) tunggal untuk berduet dengan Susilo Bambang Yudhoyono.

Akbar Tandjung menangkap pernyataan PD itu mengatakan, Partai Golkar harus menghindari kontroversi dan perpecahan internal dalam mengajukan pasangan calon presiden (capres) dan cawapres pada Pilpres 2009. Menurutnya, jika Partai Golkar hanya mengambil posisi wapres dan berduet dengan Yudhoyono, Partai Golkar harus menawarkan lebih dari satu nama kepada Partai Demokrat dan pasangan koalisinya.

"Kalau mengajukan lebih dari satu

nama maka itu akan meminimalkan kontroversi dan perpecahan internal. Kalau mengajukan satu nama kan belum tentu cocok," ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar sebelum membuka rapat koordinasi wilayah Barisan Indonesia (Barindo) di Makassar, Sabtu (18/4) pagi.

Namun Tim Tiga yang ditunjuk DPP Partai Golkar dalam komunikasi politiknya dengan Tim Tiga Partai Demokrat, tetap mengusung misi mengajukan satu nama Cawapres. SBY yang menerima laporan Tim Tiga Demokrat mengenai hal ini, meminta supaya masalah Cawapres ini diendapkan dulu. Lalu Partai Golkar menganggap Demokrat mendikte Partai Golkar. Anggapan serupa muncul di pihak Demokrat.

Akhirnya DPP Partai Golkar memutuskan berpisah dengan Demokrat. Keputusan ini diperkuat dalam Rapimnassus (Rapat Pimpinan Nasional Khusus) Partai Golkar 23 April 2009, yang diikuti pengurus pusat, penasihat dan DPD Tingkat I dengan meneguhkan Jusuf Kalla sebagai Capres atau Cawapres dan memberi mandat kepada JK melakukan komunikasi politik dengan partai lain.

JK berusaha kembali mendekati PDIP, dengan harapan Megawati bisa dibujuk untuk bersedia jadi Cawapres atau tidak mencalonkan diri. Tampak Partai Golkar sangat yakin bisa memainkan permainan politik di atas PDIP. Juga mendekati Prabowo Subianto (Partai Gerindra) dan Wiranto (Partai Hanura), juga PPP.

Belakangan, posisi Jusuf Kalla dijepit dengan gerakan pembangkangan terhadap hasil putusan Rapimnassus itu. Sebanyak 25 ketua DPD Tingkat I Partai Golkar, dalam surat tertulis, meminta Jusuf Kalla mengajukan enam nama kader Partai Golkar sebagai Cawapres yang akan berkoalisi dengan Partai Demokrat. Surat itu diperlihatkan seorang tokoh Golkar kepada *Berita Indonesia*, Senin (27/4/09). Keenam nama itu adalah Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Akbar Tandjung, Sultan Hamengku Buwono X, Fadel Muhammad, dan Surya Paloh.

Selain itu, sejumlah Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II Partai Golkar juga mendesak diadakannya Rapimnassus ulang untuk menetapkan calon wapres dari Golkar. Mereka juga menolak keputusan Rapimnassus karena tak melibatkan jajaran DPD II. Sebelumnya, puluhan pengurus DPD Tingkat II Golkar menemui Akbar Tandjung.

Kelihatannya, Golkar selain kalah dalam Pemilu Legislatif, juga semakin kehilangan soliditas dan arah koalisi. Diperkirakan, kepada partai atau Capres manapun Golkar berkoalisi, tidak akan solid.

■ CRS, MS

PDIP Jadi C

Partai Demokrasi Indonesia Perju hari sudah berketetapan mengus Soekarnoputri sebagai Capres, h dua dalam perolehan suara Pem Megawati berpeluang memenan

Perolehan suara PDIP pada Pemilu Legislatif 2009, berdasarkan hasil perhitungan cepat (*quick count*) LSI hanya 14,66 persen, merosot 4 persen dari hampir 19 persen pada Pemilu 2004. Sementara pesaing utamanya, Partai Demokrat (PD), partainya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meraih suara 20,65%, naik tiga kali lipat dari Pemilu 2004.

Jika melihat dari tren menurunnya perolehan suara PDIP dan sebaliknya melonjak naiknya perolehan suara PD, rasanya peluang Megawati (sebagai *challenger*) mengalahkan Presiden SBY (*incumbent*) sangat tipis. Apalagi bila berkaca dari posisi Pilpres 2004, saat Presiden Megawati (*incumbent*) dengan dukungan PDIP (18 persen) dikalahkan SBY (*challenger*) dengan dukungan PD (hanya 7 persen).

Berdasarkan dua hal di atas banyak pengamat berpendapat sebaiknya Megawati mengurungkan niat menjadi Capres untuk menghindari kekalahan kedua kali. Sekaligus memberi kesempatan kepada PDIP mencalonkan tokoh lain yang berpotensi mengalah-



KALAH CERDIK DARI SBY: Turunnya perolehan S mengelola informasi

Oposan Lagi?

uangan (PDIP) yang sejak jauh
sung Ketua Umumnya, Megawati
anya berada di urutan tiga atau
ilu Legislatif 2009. Masihkah
gi Pilpres?

kan SBY.

Tapi masalahnya, siapa atau adakah tokoh lain, baik dari internal maupun eksternal PDIP yang memiliki elektabilitas lebih tinggi dari SBY? Jika ditelusuri atau jika dilihat dari hasil berbagai survei dalam dua tahun terakhir, hanya Megawati yang memiliki elektabilitas yang bisa menyaingi SBY. Beberapa nama tokoh lainnya, seperti Sri Sultan X, Jusuf Kalla, Prabowo Subianto, Wiranto, Sutiyoso, Rizal Ramli dan lain-lain, masih memiliki elektabilitas jauh lebih rendah dari Megawati, apalagi dibanding SBY.

Atau apakah PDIP mau berspekulasi dengan mengusung tokoh nonpartai (tapi kemudian mengikatnya berkomitmen menjadi kader PDIP)? Tokoh dimaksud adalah antara lain Dr. Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) sebagai Capres berpasangan dengan Antasari Azhar (Ketua KPK) sebagai Cawapres? Mungkin pandangan ini dinilai terlalu spekulatif, tapi jika mau dan berani melakukan, sangat terbuka kemungkinan bisa mengejutkan dan meraih kemenangan.

Namun, dalam rangka proses demokrasi, patut pula dihargai jika PDIP tetap berketetapan mencapreskan Megawati.



PINDAH KE LAIN HATI: Konstituen fanatik PDIP Pemilu 2009 semakin menurun dibanding 5 atau 10 tahun sebelumnya

Masih lebih baik daripada berpolitik dagang sapi (pragmatis asal ikut berkuasa) yang diperagakan beberapa petinggi Partai Golkar. Mencapreskan Megawati, peluang menang pun selalu ada, walau sangat sulit. Tergantung bagaimana strategi dan siapa Cawapresnya. Melihat peta politik terakhir, mungkin saja Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra akan digandeng sebagai Cawapres. Hal ini terlihat dari suara seluruh DPD Tingkat I PDIP yang menjagokan Prabowo sebagai Cawapres.

Tapi, godaan Partai Golkar untuk mengajak PDIP berkoalisi tampaknya sempat mengoyahkan PDIP. Partai Golkar yang tak sungkan menandatangani kesepakatan, lalu dengan mudah tak menganggap PDIP, membuat arah koalisi PDIP,

Gerindra dan Hanura tampak menjadi goyah.

Soal strategi, harus pula diakui bahwa pada kampanye Pemilu Legislatif, Partai Demokrat jauh lebih taktis dan efektif dari PDIP. Sebuah contoh, ketika Partai Demokrat mengangkat isu pemberantasan korupsi sebagai salah satu tema kampanye dengan membuat iklan belatarbelakang KPK, KPK memprotesnya. Protes ini menunjukkan eksistensi KPK yang independen, tidak berada di bawah kendali presiden (pemerintah). Tapi naifnya, PDIP hanya membisu dan membiarkan isu seolah-olah keberhasilan KPK memberantas korupsi sebagai hasil kerja presiden (pemerintah).

Namun, sebaliknya setiap kali PDIP mengangkat sebuah isu, contohnya soal



suara PDIP ditengarai karena tidak bijaknya partai ini

BLT, Partai Demokrat selalu dengan cekatan dan cerdas mengkonter dengan menggunakan segala sumberdaya yang ada, termasuk media massa, terutama televisi. Dengan konter yang demikian kancang dan cerdas, kondisinya menjadi berbalik, PDIP surut bahkan berbalik.

Diakui atau tidak, strategi dan kecerdikan kampanye ini sangat berpengaruh pada kemerosotan perolehan suara PDIP dan sebaliknya peningkatan tajam perolehan suara Partai Demokrat. Apalagi basis massa PDIP itu adalah wong cilik, yang tentunya sangat menghargai BLT. Memang, secara prinsip kemandirian, prinsip kepemimpinan visioner, kebijakan pemberian BLT itu suatu kebijakan yang buruk. Tapi dalam kondisi tekanan ekonomi dan kebutuhan mendesak rakyat, BLT menjadi sebuah kebijakan populis berdaya tarik politis. BLT menjadi sebuah kebijakan taktis politis yang memberi keuntungan bagi partai pemerintah.

Selain itu, posisi PDIP sebagai partai penyeimbang (oposisi), selama ini juga kurang menunjukkan performa yang mendapat dukungan masyarakat luas. Hal ini diteruskan dalam kampanye legislatif dengan mengusung tema dan isu politik berlawanan dengan yang diklaim sebagai keberhasilan pemerintah, tetapi tidak dengan cara yang dapat mengundang pemahaman dan keberpihakan publik. PDIP sepertinya berjalan sendiri dengan cara dan gayanya sendiri, terasing dari lingkungan sekitarnya. Padahal, rakyat memang sedang makin menderita.

Tampaknya PDIP harus belajar dari masyarakat sendiri, jangan hanya menabur kebencian kepada penguasa. Apalagi penguasa yang dihadapinya ternyata sangat pintar mengelola kritik dan kebencian orang lain untuk menuai simpati rakyat. Juga cerdas mengelola informasi tentang keberhasilan kinerjanya, yang sebenarnya justru banyak mengalami kekurangberhasilan.

Keikutsertaan Gerindra dan Hanura dalam koalisi dengan PDIP, mungkin akan menambah daya, baik secara strategis maupun taktis, dalam kampanye Pilpres mendatang. Sehingga memberi peluang menarik dukungan rakyat banyak dan akhirnya memenangkan Pilpres 8 Juli 2009. Jika pun dalam Pilpres mengalami kekalahan, berpotensi (jadilah) menjadi koalisi penyeimbang di parlemen.

Dalam posisi kekuatan penyeimbang ini, barangkali perlu dicermati secara psikologis penggunaan kata oposisi atau oposan. Barangkali, secara psikologis, rakyat Indonesia merasa lebih nyaman atau lebih menerima bila disebut sebagai partai (koalisi) penyeimbang atau koalisi independen, yang pada prinsipnya bertujuan sama sebagai oposan. ■ RBH, DAP, SIR

Gula Demokrat dan Perpecahan Partai

Keberhasilan Partai Demokrat menjadi pemenang Pemilu Legislatif 9 April 2009, membuat daya tarik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat laksana gula yang amat manis. Bagi semut, beberapa petinggi partai berlomba mendekati ingin ikut mengecap manisnya kekuasaan.

Ironisnya, obsesi ikut mengecap kekuasaan yang seolah sudah di depan mata itu menimbulkan efek perpecahan atau konflik kepentingan di tubuh beberapa partai. Para elit partai sibuk mendekati SBY dan Partai Demokrat. Sebagian lagi memilih berkoalisi dengan partai lain (PDIP, Gerindra dan Hanura). Yang lainnya memandang tingkah polah rekan separtainya itu sebagai suatu sikap politik yang amat pragmatis dan haus kekuasaan, sehingga mereka menentang. Konflik pun merebak gara-gara partai dijajah pragmatisme, tak punya idealisme, dan hanya memburu kekuasaan.

Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan tak luput dari guncangan internal akibat tarik-menarik elite partai. Ada yang hendak menggiring partai menuju lingkaran dalam kekuasaan, tapi ada yang hendak membentuk kubu sendiri. Ada pula yang menganggap menjadi oposisi juga suatu pilihan yang baik.

Partai Golkar, setelah kalah dalam Pemilu Legislatif, menjadi salah satu partai yang paling sibuk mendekati diri ke Partai Demokrat. Partai ini diisukan terbelah dalam beberapa faksi. Beberapa petinggi Partai Golkar menghendaki tetap berkoalisi dengan Demokrat dengan menjadikan JK sebagai calon wakil presiden mendampingi SBY. Ada yang menghendaki agar Golkar tetap mengajukan calon presiden sendiri. Ada pula yang menghendaki berkoalisi dengan PDIP dan partai lainnya.

Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla juga aktif mendekati diri kepada SBY dengan menemuinya beberapa kali. Begitu pula beberapa elit Partai Golkar, dalam pandangan publik nyaris seperti mengemis ingin berkoalisi dengan Partai Demokrat. Tapi tampaknya SBY dan Partai Demokrat, sebagai pemenang



Kampanye "menjual" SBY

Pemilu Legislatif, menginginkan koalisi dengan partai mana pun harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dibuatnya. SBY pun merilis lima kriteria menjadi Cawapres pendampingnya.

Kelima kriteria itu, tampaknya membuat Jusuf Kalla dan beberapa petinggi Golkar merasa tidak nyaman. Diutuslah tiga orang anggota Tim Golkar untuk menemui Tim 9 Partai Demokrat untuk membicarakan koalisi. Tim 3 Partai Golkar membawa misi akan mengajukan satu nama sebagai Cawapres pendamping SBY, yakni Jusuf Kalla. Tapi Tim 9 Partai Demokrat yang punya misi memenuhi lima kriteria Cawapres yang digariskan SBY, menghendaki Partai Golkar mengajukan beberapa nama.

Namun, Tim 3 Partai Golkar tetap



BERSITEGANG: PPP terbelah, ada faksi Ketua Umum Suryadharma Ali dan faksi Ketua Majelis Pertimbangan Partai Bachtiar Chamsyah

berpendirian akan mengajukan satu nama (Jusuf Kalla). Mereka berpandangan Partai Demokrat ingin mendikte. Sebaliknya Tim 9 Partai Demokrat juga tidak mau didikte Partai Golkar yang telah kalah dalam Pemilu Legislatif. Akhirnya, pengurus harian Partai Golkar memutuskan membatalkan keinginan berkoalisi dengan Partai Demokrat. Namun bukan berarti perbedaan pandangan dalam tubuh Golkar sudah tidak ada, malah bisa mungkin makin menjurus perpecahan. Bisa saja Partai Golkar secara resmi tidak berkoalisi dengan Demokrat, tetapi beberapa kader Partai Golkar akan tetap merapat ke SBY.

Demikian pula yang terjadi dalam tubuh Partai Amanat Nasional. Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amien Rais menggelar pertemuan dengan pengurus wilayah di Yogyakarta. Melahirkan Kesepakatan Yogyakarta yang menyerukan

agar PAN merapat ke SBY. Sikap itu berbeda dengan DPP PAN yang masih menjajaki kemungkinan koalisi dengan bukan SBY. Hal ini mengindikasikan bahwa PAN juga bisa berada di ambang perpecahan.

Begitu pula terjadi polarisasi dua kubu besar dalam internal partai berlambang Kabah, Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ada faksi Ketua Umum Suryadharma Ali dan faksi Ketua Majelis Pertimbangan Partai Bachtiar Chamsyah. Kubu Bachtiar ingin PPP merapat ke Demokrat, sedangkan kubu Suryadharma ingin ke PDIP atau Gerindra. Kedua kubu ini bahkan sudah sempat saling menyerang secara terbuka. Namun, kemudian keduanya sudah sempat berjabat tangan dan menyatakan berdamai. Namun, dalam Rakernas PPP 26/4/09, perpecahan itu pun mencuat kembali. Setidaknya, potensi perpecahan belum sepe-

nuhnya hilang. Semuanya masih sangat tergantung dinamika politik yang masih liar bergerak.

Menanggapi gejala perpecahan partai itu, Jusuf Kalla melihat adanya gejala destruktif yang merusak demokrasi yang tengah dipraktikkan di tengah-tengah proses komunikasi politik untuk menjalin koalisi antarpol. Ia melihat setelah gejalanya dialami dua partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN), giliran Partai Golkar yang "diacak-acak".

Kalla mengatakan, yang terjadi sekarang adalah gejala yang sama di tiga partai, di mana sejumlah kadernya melawan ketua umum partainya. "Demokrasi tidak dijalankan secara benar dan baik. Akan tetapi, sengaja dipecah belah, ditakut-takuti, dan ditangkapi," kata Kalla.

■ ANP, AY

Emas Itu Belum Digenggam

Pasca-keputusan panel Arbitrase, hak pemerintah atas sebagian saham PT NNT sebagaimana diatur dalam kontrak karya telah di depan mata. Namun, agar sampai ke pelukan, apakah harus meminjam dari perusahaan pertambangan emas dan tembaga itu?



TERLANTAR: Ladang PT Newmont Nusa Tenggara di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa Nusa Tenggara Barat (NTB)

Kurangnya publikasi, membuat banyak masyarakat tidak mengetahui bagaimana perusahaan-perusahaan manufaktur khususnya yang bergerak di bidang pertambangan beroperasi di Indonesia. Apa hak Indonesia sebagai sebuah negara. Apa pula hak pemerintahan daerah sebagai pemilik lahan. Yang masyarakat tahu, segala sesuatunya sudah disepakati oleh pemerintah sehingga pengelola sudah berhak mengangkat hasil bumi negeri ini ke negara asal mereka.

Benar, beroperasinya sebuah pertambangan yang dikelola asing di Indonesia pastilah sudah dilengkapi dengan kontrak karya. Tapi ternyata yang sering jadi persoalan adalah kontrak yang lupa dilaksanakan atau barangkali malah sengaja dilupakan.

Kasus antara PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) dan Pemerintah Indonesia yang baru-baru ini berakhir di meja Arbitrase, barangkali bisa satu contoh untuk membuka perhatian kita tentang kasus kontrak karya ini.

Pada 3 maret 2008, Pemerintah Indonesia menggugat PT NNT yang beroperasi di wilayah Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan luas konsesi 1.127.134 hektare, itu ke arbitrase internasional karena lalai memenuhi kewajibannya melakukan divestasi atau menjual sebagian sahamnya kepada Pemerintah Indonesia.

Panel arbitrase internasional adalah sebuah panel yang disepakati secara interna-

sional untuk menyelesaikan sengketa antara sebuah negara dengan investor asing. Anggota panel ini adalah ahli hukum yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang bersengketa dan satu orang ahli hukum independen. Dalam kasus Indonesia melawan perusahaan NNT yang berinvestasi US\$ 1.9 miliar itu, ahli hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia adalah M. Sonnarajah, ahli hukum yang ditunjuk Newmont adalah Stephen Schwebel, sedangkan ahli hukum independen sekaligus menjadi ketua panel adalah Robert Briner.

Pemerintah Indonesia ketika itu meminta panel agar memutuskan bahwa Pemerintah Indonesia bisa melakukan terminasi kontrak karya Newmont dengan alasan NNT melakukan kelalaian. Artinya, panel arbitrase diminta memutuskan bahwa Indonesia berhak memutuskan secara sepihak masa kontrak NNT yang sebelumnya disepakati berakhir hingga tahun 2027.

Selanjutnya, Pemerintah meminta apabila terminasi tidak bisa dikabulkan panel arbitrase, panel diminta memerintahkan NNT untuk menjual saham sesuai surat Dirjen Mineral Batu Bara dan Panas Bumi terkait *default*.

Di hari yang sama, Newmont Mining Corporation, induk NNT di Denver, AS itu juga mengajukan gugatan atas Pemerintah Indonesia. NNT meminta panel arbitrase untuk menyatakan pihaknya tidak melakukan kelalaian yang bisa berakibat pada terminasi kontrak.

Proses arbitrase berjalan sejak 15 Juli

2008 melalui korespondensi. Terakhir (31 Maret 2009), panel arbitrase pun memutuskan bahwa NNT bersalah karena telah lalai dalam melakukan divestasi. Karena itu, panel memerintahkan PT NNT untuk melakukan divestasi 17 % saham yang terdiri dari, divestasi tahun 2006 3% dan 2007 sebesar 7% kepada pemerintah daerah. Adapun untuk tahun 2008 sebesar 7% untuk pemerintah pusat.

Semua kewajiban tersebut di atas harus dilaksanakan dalam waktu 180 hari sesudah tanggal putusan arbitrase. Panel arbitrase juga menyatakan bahwa saham yang didivestasikan harus bebas dari gadai.

Sementara semuanya itu sudah jelas, kini untuk membeli 10% saham NNT periode 2006 dan 2007 yang menjadi bagian pemda sebagaimana disebutkan di atas, karena kesulitan uang, Pemda NTB mengkaji kemungkinan dua opsi yakni, Pertama, menggandeng swasta nasional melalui tender terbuka. Kedua, melakukan pinjaman dana dari NNT sendiri. Jadi nanti, secara yuridis, kepemilikan saham 10% tersebut menjadi hak pemda, sedangkan pinjaman dana itu akan dikembalikan melalui pemotongan dividen. Sedangkan 7% saham periode divestasi tahun 2008 dan 7% saham periode divestasi tahun 2009, rencananya akan dibeli pemerintah pusat.

Di lain pihak, sebelumnya Meneg BUMN Sofyan Djalil mengaku telah meminta beberapa BUMN tambang untuk mengkaji pembelian saham divestasi NNT. Salah satu BUMN yang berminat membeli adalah PT Aneka Tambang Tbk. Untuk itu, Sofyan telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan yang menyatakan ketertarikan BUMN membeli saham NNT bila pemerintah tak mengambilya.

Belajar dari kasus ini, tidak dimungkiri, Indonesia memang mengharapkan kedatangan para investor, termasuk yang bergerak di bidang pertambangan. Diakui, kehadiran mereka memang sangat membantu pembangunan di Indonesia.

PT NNT sendiri misalnya, tahun 2009 ini berencana memproduksi 455 juta pon tembaga dan 485.531 ons emas sehingga diperkirakan meraih laba setelah pajak sekitar US \$ 316,95 juta atau Rp3,32 triliun. Kontribusi kepada Pemerintah Indonesia ditargetkan sebesar Rp 2,65 triliun sebagai pendapatan negara berupa pajak dan non pajak, termasuk royalti produksi.

Tapi, di luar besarnya kontribusi tersebut, para investor tetap diharapkan mengindahkan kontrak yang telah disepakati. Kepada pemerintah, sebaiknya tetap jeli mengikuti perkembangan kepatuhan para investor asing itu. Sebab kalau tidak diingatkan atau ditegur, ada indikasi mereka tidak akan dengan rela melaksanakan kewajibannya. ■MS



LAKU: Pasar pakaian bekas di Kebayoran Lama

Kehidupan Pasar Loak Jakarta

Krisis yang Tak Pernah Hinggap

Daya beli masyarakat dianggap telah mengalami titik terendah. Jika memang begitu, mungkin pasar yang satu ini belum dimasukkan dalam daftar hitungan.

Suhanda (38) melepas tali karung lalu menghamburkan seluruh isinya. Ada ratusan mur, baut, klahar dan aneka perkakas dari besi. Sebagian yang sudah mulai berkarat dipisahkan untuk segera dibersihkan. Sudah lebih dari 12 tahun Suhanda mengais rezeki di bibir jalan kawasan Tanah Abang, Jakarta, dengan berjualan barang bekas. "Apa saja bisa dijual. Di Jakarta sampah bisa jadi duit," kelakar bapak beranak tiga ini.

Saat ini, di kawasan Tanah Abang Jakarta saja terdapat dua area pasar loak. Yang paling "tua" di sepanjang Jalan KS. Tubun depan Museum Tekstil Tanah Abang. Yang satunya lagi di *pipilan* sisi jalan *fly over* antara Tanah Abang dan kali Cideng. Jenis barang yang ditawarkan sangat variatif. Mulai dari kipas angin,

alat masak seperti mixer-blender, perkakas besi, sepatu, jeans, DVD bajakan bekas, sampai radio.

"Kalau ada orang yang bawa barang bekasnya ke sini, sebenarnya itulah kebutuhan orang di sekitar sini juga. Asal harganya *nyekrup*," kata Suhanda. Yang dimaksud harga "nyekrup" adalah istilah kesepakatan harga dengan nilai jual yang pantas.

Pemandangan ini bisa menggambarkan bagaimana pasar loak atau barang bekas tidak lepas dari cerminan budaya masyarakatnya. Di Jakarta sendiri tak kurang dari 18 titik pasar loak dalam skala komunitas, dan ada lebih dari 48 titik lapak loak atau pasar loak berskala kecil yang tersebar di Jakarta.

Agen Budaya

Merlina (15) sedang asyik menjajal

sejumlah kaset di sebuah toko kaset bekas kawasan Jalan Surabaya, Menteng. "Lagi cari referensi buat band *gue*," katanya acuh dengan gaya khas anak sekarang. Dia tengah menimbang mana dari tumpukan kaset tembang lawas yang akan dibelinya. "Enggak semua lah... harganya tinggi banget!" katanya memegang kaset berjudul *Jang Pertama*, Dara Puspita keluaran tahun 1965. Sudah dua bulan keluar-masuk pasar loak, Merlina belum menemukan kaset yang jadi incarannya, yaitu album Noor Bersaudara (1977). Tapi tiba-tiba album Dara Puspita yang tadi itu nongol duluan. Album yang terbilang sangat langka itupun menggoda hatinya. Setelah harga pas, 250 ribu rupiah pun disepakati. Minggu depan merlina janji datang lagi siapa tahu album yang jadi impiannya sudah ada.

Begitulah. Secanggih-canggihnya era digital, ternyata belum mampu mengalahkan kemasyaran musik era analog. Kenangan akan masa lalu membuat sejumlah orang membentuk komunitasnya

sendiri. Ada Komunitas 80-an, ada juga penggemar Prog-Rock, dan Klasik Rock. Asumsi inilah yang membuat daya beli barang bekas (khususnya musik) tak pernah surut.

Omen (52), pedagang kaset dan piringan hitam bekas di Pasar Taman Puring misalnya, tidak pernah merasa surut pembeli. "Pembeli kaset bekas bukan pembeli sembarangan. Mereka sangat patuh pada orisinalitas. Terserah *deh*, CD bajakan lebih murah dan mudah didapet, tapi punya kaset asli lebih penting dari pada kepentingan audionya sendiri. Suara boleh sember, tapi nilai koleksi dan referensinya jauh lebih tinggi. Bahkan sampul albumnya saja dikoleksi," kata Omen yang sudah menjual kaset bekas sejak tahun 90-an itu.

Ia memperlihatkan sejumlah sampul album yang sudah menguning dengan ujung-ujung kertasnya yang mulai mengering. "Mulanya ada orang yang menjual pasokan kaset bekas, ternyata kasetnya *enggak* bisa di-*stel*. Sedangkan sampul albumnya masih layak disimpan. Dikumpul-kumpul, ternyata banyak juga. *Eh*, ada orang yang mau beli. Harganya relatif bagus," kata Omen yang juga menjadi salah satu pengurus Komunitas Pecinta Musik Indonesia itu lagi.

Omen biasa menjual sampul kaset koleksi berkisar antara 25 ribu bahkan ada yang mencapai 100 ribu. "Apalagi kalau sampul album Soneta lengkap, *Wow!* Pembeli yang suka atau tidak suka dangdut pasti mau," kata Omen lagi.

Benar saja kalau kita menemukan kaset dan atau hanya sampulnya saja dari album Duo Kribo (1978), album *Nyanyian Fajar* oleh Leo Kristi (1976), duet Benyamin-Ida Royani (1973), *God Bless* (1976), Trio Bimbo (1972) *Giant Steps* (1977), atau album Guruh Gipsy (1976), sekadar menyebut sedikit contoh adalah album yang *most wanted* dan *cover* albumnya juga tetap punya nilai pasar yang tinggi. Harga albumnya rata-rata bisa di atas 250-150 ribu rupiah, bahkan bisa lebih dan harga sampul berkisar 25 ribu sampai 150 ribu rupiah.

Kendati teknik digital sudah menjadi gaya hidup masa kini, nyatanya tidak lantas mengubur rekaman analog begitu saja. "Justru, semakin marak CD/DVD bajakan membuat kaset langka jadi semakin berharga," ungkap narasumber di pasar lain, Tedjo, salah seorang penjual kaset laokan di emper gelaran pasar Jatinegara.

Selain musik (kaset dan piringan hitam), pasar loak jenis lain juga menjadi sumber inspirasi. Pasar inpres Senen, misalnya, adalah pasar baju bekas yang paling populer di bursa barang loakan di Jakarta. Tumpukan baju, jas, jaket, pantalon, pakaian dalam wanita, sapu tangan, *scarf*, topi, tas, sepatu, *boot*, gesper, seli-



KUNO: Para kolektor uang lama bisa memelihara hobinya dengan mengunjungi pasar loak Jatinegara, Jakarta Timur

mut, sarung bantal, gordien, hingga karpet tak lagi seperti barang yang memalukan untuk dipilih. Bukan hanya ibu-ibu yang tampak sibuk memilih, terlihat sejumlah anak abege, baik laki-laki dan perempuan. Semua seperti khafilah yang biasa merombong mal dan plaza Jakarta. Anak-anak band, yang selalu sibuk mendandani diri mereka dengan gaya busana yang unik akan rajin menguntit perkembangan barang "baru" yang beredar di sini.

"Gaya berbusana anak sekarang tidak mengharuskan baju dan celana harus baru keluaran toko. Berbeda dengan remaja di era sebelumnya yang "toko minded". Remaja sekarang lebih memilih gaya individual, *enggak* ingin sama dengan teman-temannya. Otomatis harus unik, berbeda, dan menonjolkan identitasnya," tutur Regina Kencana seorang penulis mode dan gaya hidup yang kini menjadi *fashion designer*.

Pasar baju loak Senen menjadi salah satu jawaban akan kebutuhan mereka. Pasar loak tentu saja menjual aneka barang yang nyaris dijual dalam jumlah satuan. Istilahnya *collected items*. Bukan partai besar. Apalagi, barang-barang yang dijual adalah "sampah" import dari Hongkong, Taiwan, China, Jepang, dan Singapura, otomatis merek import itu lebih mencorong di mata para pembeli kita.

Maka bertaburanlah baju bekas dengan merek import yang terkenal di lokal Asia seperti Asaka, Brimming, Reds Hk, dan sederet merek terkenal dunia bisa menjadi bonus kalau mau telaten mencarinya seperti Diesel, YSL, Ralp Laurent, Hugo Boss, Nautica, Union Bay, Old Navy. Sedangkan merek Burberry, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lanvin, 2nd Floor, Balmain, House of Holland bisa menjadi kejutan kalau kebetulan terselip di antara



DIBERSIHKAN: Pasar Manggarai tak pernah surut menjual aneka jenis perlengkapan toilet bekas

tumpukan.

"Salah satu keunggulan pasar loak itu kebanyakan barangnya asli. Bukan barang palsu. Misalnya, *polo shirt* merek Fred Perry yang beredar di pasar loak itu pasti asli, berbeda dari yang dijual kebanyakan di toko kaos atau gelaran meskipun dengan kemasan plastik kemungkinan besar itu palsu," tambah Regina.

Sejumlah desainer rajin mengunjungi tempat itu. Mereka datang bukan ingin mengelabui para pelanggannya dengan menjual kembali barang bekas dan menjualnya kembali. Karena *fashion* itu selalu mengalami perputaran (*recycle*), pasar loak pun menjadi salah satu "pusat dokumentasi" yang paling konkret.



DIJUAL MAHAL: Kita bisa menemukan kaset dan piringan hitam bekas di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan



Bahkan di negara adibusana seperti Prancis sendiri, pasar loak kerap dikunjungi desainer dari butik ternama. “karena di pasar loak itu tersimpan banyak busana-busana dari masa lalu yang mungkin sudah sulit ditemukan di lemari siapapun. Bukan untuk dicontek, tapi begitulah *fashion*, selalu mengalami *recycle* dari waktu ke waktu,” ungkap Priyo Oktaviano dari rumah mode Spouse, di kawasan Kebayoran Baru.

Tahan Krisis

Jadi secanggih-canggihnya garis desain masa kini, kita selalu merindukan peradaban masa lampau. Bisa diambil contoh group band yang sangat digilai anak muda saat ini, White Shoes & The Couples Company (WSCC). Group band yang mengambil aroma musik era 70-an itu tidak

hanya menghadirkan musik tapi secara visual mereka memboyong gaya berbusana “tempo doeloe”. Selain demam WSCC, kita juga punya Naif, dan The Changcuters yang mengawinkan era musik dan style dari fashion dalam satu paket.

“Setiap masa kini, selalu menimbulkan keinginan kita mereferensi masa lalu. Apalagi di suatu masa, kebudayaan tertentu mengalami puncak, *fashion*-musik-dan seni visual yang tidak bisa digantikan begitu saja di masa secanggih apapun. Tidak peduli mau krisis atau tidak, arusny tetap bergulir di sana,” kata Priyo lagi.

Bukan hanya kawasan pasar antik jalan Surabaya, Menteng saja yang perlu dianggap sebagai pusat “dokumentasi” aset budaya lantaran kondang dengan penjualan barang antik dan eksotik. Tapi mulai dari baju dan musik (seperti yang sudah dijelaskan tadi) juga ada jenis barang lain seperti buku, elektronik, gadget, otomotif, sampai urusan alat tulis dan kantor (ATK). Semula barang itu difungsikan sebagaimana kodratnya. Lalu kemajuan industri dan teknologi sempat menggeser perannya.

Tapi nyatanya sang waktu menunjukkan, tidak ada yang bisa mengalahkan kenangan masa lalu. Dalam studi kasus media culture di Paris, Prancis, seperti dalam buku *Market of Paris* karya Dixon – Ruthanne Long mengulas bagaimana barang antik justru punya nilai estetis dan fungsional yang tidak bisa tergantikan oleh pesatnya arus teknologi. “Barang bekas pakai hanya mengalami kerusakan fisik dan kalah dalam faktor efisiensi. Tapi yang tidak bisa tergantikan adalah bagaimana barang bekas menjadi aset kultur yang tidak aus dengan laju perkembangan fluktuatif bursa saham,” terang Long

dalam buku tersebut.

Tengoklah bagaimana Pak Ahmad di pasar Manggarai tak pernah surut menjual aneka jenis perlengkapan toilet bekas. “Kakus, kran, *washtub* (tong cuci) dan wastafel keluaran tahun 70-an dan 80-an, punya pasar yang sangat tinggi. Dicari orang-orang kaya yang pinginnya barang antik. Barang bekas yang kurang dari lima tahun juga jelas pasarnya karena bisa selisih sampai 80-100 ribu rupiah,” kata Ahmad yang tidak merasa ada perubahan yang signifikan sebelum dan sesudah krisis.

“Dulu saat krismon *malahan* semakin banyak orang yang cari kakus bekas, karena lebih murah. Kalau yang antik-antik relatif stabil, karena yang beli orang yang berduit,” katanya lagi.

Menurut Long masih dari buku *Market of Paris* dikatakan juga daya beli masyarakat terhadap barang loak di Paris tidak pernah surut, bukan hanya barang dunia mode dan benda antik, tapi sejumlah kebutuhan fungsional lainnya. Dikatakan kasus temuan ini serupa di sejumlah kota perbandingan, “New York, London, Amsterdam, Kairo, Roma, Milan, Tel Aviv, Shanghai, dan Tokyo masing-masing punya pusat pasar loak dengan kekhasan masing-masing. Tidak semua menjajakan barang antik, tapi barang keseharian sebagai bukti pindah tangan antara teknologi dan nilai kebutuhan. Dari sanalah teruji bahwa kecintaan terhadap nilai estetika dan fungsi masih akan terus berlangsung di pasar barang bekas pakai.”

Seperti juga kota-kota tersebut tadi, Jakarta juga punya sejumlah sentra pasar loak yang belum dan mungkin baru segelintir pasar loak yang “dipercantik”. Selain Jalan Surabaya yang sudah tergocong rapi itu, Jakarta masih punya Tanah Abang dengan aneka piranti rumah tangga, Asem Reges dengan otomotifnya, Senen yang menyimpan busana dan aneka pustaka, Taman Puring dengan citra masa lalu musiknya, juga Manggarai yang masyur dengan kakus, ATK, sepeda dan kursi rodanya.

Berapa uang yang bergulir di sana? Belum ada data yang jelas. Tapi, kalau sempat mampir ke pasar Poncol, Senen Jakarta, yang ternyata mempunyai besaran area paling luas untuk ukuran pasar loak Jakarta yang diperkirakan lebih dari 240 kios dengan lebih dari 380 penjual barang loakan, kita akan terkejut menghitung perputaran uang yang bahkan tak pernah putus terhempas oleh badai krismon dan krisis finansial sekarang ini.

Kembali pada kalimat Suhanda penjual aneka perkakas besi di Tanah Abang tadi, bahkan sumpah pun bisa jadi duit di kota Jakarta. Inilah potret sebuah kota di zaman krisis dari sudut pandang yang berbeda. ■ CHUS

Lima Sosok di Balik Quick Count

Meski kehadirannya masih dinilai kontroversial, lembaga-lembaga survei yang bermunculan di Indonesia sedikit banyak telah memberikan warna dalam dunia politik di Tanah Air.

Sejak reformasi 1998, sistem politik di Tanah Air banyak berubah. Seseorang menjadi presiden, gubernur, walikota bukan lagi ditentukan partai melainkan ditentukan oleh suara rakyat lewat pemilihan langsung. Mereka terpilih bukan lagi karena petunjuk pejabat, juga bukan lagi dipilih oleh anggota parlemen.

Kenyataan ini membuat situasi politik semakin tidak pasti. Kini sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang dan kalah. Calon dari partai besar pun bisa kalah. Situasi ketidakpastian dalam dunia politik ini membuat orang mulai mencari pegangan baru untuk memahami sebab musabab kemenangan dan kekalahan seseorang dalam Pemilu yang dipilih langsung.

Lembaga-lembaga survei kemudian bermunculan menyodorkan pegangan baru sekaligus mengurangi ketidakpastian tersebut. Lembaga survei tersebut bermacam-macam. Bahkan ada yang berfungsi ganda, selain menjadi pengumpul jajak pendapat, juga menjadi konsultan politik. Fungsi ganda inilah yang kemudian dicurigai akan menimbulkan konflik interes. Lembaga survei menjadi tidak netral dan hasil surveinya 'disetel' sesuai pesanan.

Di tengah mencuatnya kecurigaan tersebut, harus diakui pula kalau lembaga-lembaga ini telah banyak mengantarkan berbagai calon kepala daerah untuk menjadi gubernur bahkan menjadi presiden. Sedikit banyak lembaga-lembaga ini telah memberikan warna dalam dunia politik di Tanah Air. Topik seputar politik menjadi hangat dibicarakan ketika lembaga-lembaga ini memaparkan analisisnya. Bahkan tak jarang sejumlah televisi swasta menjadikan mereka sebagai narasumber untuk membahas isu politik yang sedang hangat diperbincangkan.

Kehadiran lembaga-lembaga survei ini semakin terasa dalam pemilu legislatif 2009 ini. Dengan metode perhitungan cepat (*quick count*), mereka menyajikan informasi dan prediksi perolehan suara partai-partai peserta pemilu. Setidaknya

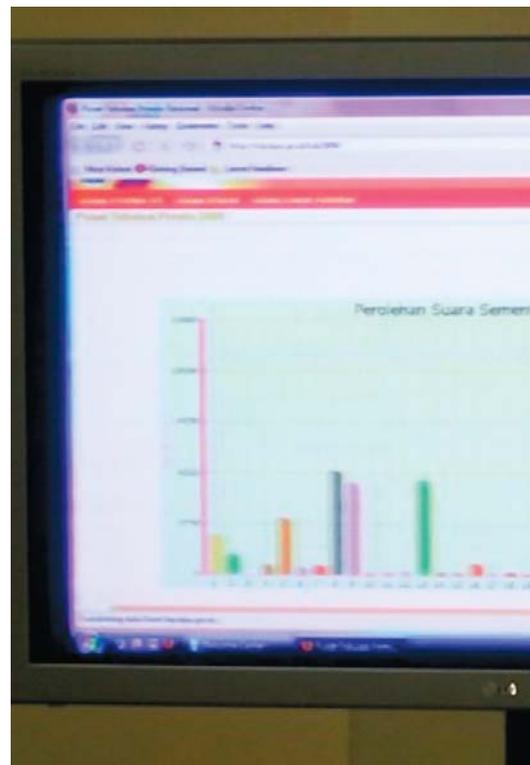
masyarakat, parpol, dan caleg bisa segera mendapatkan gambaran hasil pemilu legislatif 2009. Kehadiran lembaga-lembaga ini semakin terasa manfaatnya tatkala Pusat Tabulasi Nasional Pemilu yang ditangani Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bisa diharapkan karena sedang menghadapi masalah pengumpulan suara. Hingga hari ke-10, misalnya, jumlah suara yang masuk ke TNP baru 12.966.754 atau sekitar 7,5 persen dari 171.265.442 pemilih.

Melihat dari pengalaman pilkada-pilkada yang sebelumnya, hasil lembaga-lembaga survei itu, dibandingkan dengan data KPU hampir memiliki persamaan. Ini berarti, lembaga-lembaga ini bisa dijadikan sebagai pembanding untuk mengambil keputusan.

Beberapa lembaga survei yang melakukan hitung cepat pada pemilu kali ini antara lain: Lembaga Survei Indonesia, Lembaga Survei Nasional, Lingkaran Survei Indonesia, CIRUS Surveyors Group, dan Indo Barometer. Kelima lembaga survei ini bergerak dengan ciri khasnya masing-masing berkat kiprah arsitek atau pendirinya.

Mari kita mulai dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Lembaga ini dipimpin oleh Denny Januar Aly, Phd, yang lahir di Palembang 4 Januari 1963. Direktur Eksekutif sekaligus pendiri LSI ini merupakan salah satu figur penting di bidang survei politik di Indonesia sekaligus ikut memelopori tradisi *quick count* di setiap perhelatan pesta demokrasi di Tanah Air.

Kontrak pertama lembaga yang didirikannya sejak 2004 ini dijalin dengan Golkar pada Februari 2005 untuk menangkan pilkada di 9 provinsi dan 100 kabupaten di Indonesia dalam satu musim 2005-2008. Saat itu, Denny masih sempat juga menangani sejumlah pilkada lain di tempat yang berbeda. Khusus pemilihan gubernur, dia berhasil memenangkan calonnya di 15 dari 33 provinsi. Lembaga yang ia pimpin ini jugalah yang telah menghantarkan Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan presiden 2004 menduduki kursi RI 1. Dan untuk pemilu kali



ini dia dipercaya untuk menjadi konsultan politik PDI Perjuangan.

Ketua umum AROPI (Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia) periode 2007-2010 ini berpendapat, biaya untuk konsultan politik kepala daerah di luar pulau Jawa biasanya lebih mahal dibanding dengan di pulau Jawa. Di samping itu, semakin tidak populer seorang calon, makin besar pula dana yang harus disiapkan.

Selain mengurus LSI, peraih doktor ilmu politik dari Ohio State University (2001) dan master kebijakan publik dari Pittsburgh University (1995), ini juga dikenal sebagai kolumnis yang sangat produktif di berbagai surat kabar nasional dan analis politik di sejumlah stasiun radio dan televisi.

Lembaga lain yang juga melakukan perhitungan cepat pada pemilu 2009 adalah Indo Barometer yang dipimpin Muhammad Qodari kelahiran 15 Oktober 1973. Sebelumnya, Qodari adalah peneliti muda dan menjadi peneliti di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Institut Studi Arus Informasi (ISAI).

Indo Barometer dirintisnya tepat dua tahun yang lalu pada 2007. Keinginan dia mendirikan Indo Barometer untuk menyediakan banyak pilihan survei politik kepada masyarakat. Kecintaannya terhadap bidang survei telah dia tunjukkan sejak masih di bangku kuliah. Dia juga pernah terpilih menjadi ketua kelompok studi mahasiswa Eka Prasetya. Dari sekian banyak survei yang pernah dia



SUMBER INFORMASI: Masyarakat termasuk partai politik mulai menerima tradisi *quick count* di setiap perhelatan pesta demokrasi di Tanah Air.

yang lahir dari keluarga kiai di Serang, Banten, 8 Agustus 1962. Perjalanan studinya tergolong unik. Ia mulai kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara, Jakarta yang dia kecap hanya 2 tahun sebab dia keluar dari sana. Ia sempat mendapat kecaman dari orang tua yang lebih menginginkannya masuk kuliah bidang umum. Rupanya dia lebih meminati kajian perbandingan agama dan dia melanjutkannya ke IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Jakarta, mendalami tasawuf dan filsafat.

Ketika dirinya mendapatkan beasiswa *fullbright* ke Amerika Serikat, awalnya Saiful lebih memilih sosiologi agama. Namun, hal itu menjadi urung karena seniornya Bachtiar Effendy yang baru lulus dari ilmu politik Ohio State University menyarankan dia masuk jurusan ilmu politik yang didominasi para profesor berbasis survei.

Setelah dia lulus dari Ohio, Saiful membentuk Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Bertepatan dengan pemilu 1999, Saiful menyiapkan proposal survei nasional yang lebih akademik. Dia pun mengajak gurunya, Bill Liddle yang mendapat sponsor dari National Science Foundation, sebuah lembaga bergengsi penopang riset milik pemerintah di Amerika. Dia pun merangkul Laboratorium Ilmu Politik Universitas Indonesia. Yang kemudian bergabung di sana, Eep Saefulloh Fatah dan Valina Singka.

Setelah Pemilu 1999 selesai, Saiful semakin ketagihan melakukan penelitian. Dengan menggandeng Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri Jakarta, pada 2001 dan 2002, Saiful menggelar survei lagi dengan

temanya kaitan Islam dan demokrasi. Survei ini menjadi basis disertasi doktorinya dan menjadi disertasi terbaik. Sejak saat itu, namanya semakin diperhitungkan.

Sedangkan CIRUS Surveyors Group yang dipimpin oleh Adrinof A Channiago kelahiran Padang, 3 November 1962, terbilang baru di dunia survei politik Indonesia. Meski demikian, lembaga survei yang resmi didirikan pada November 2008 ini langsung mendapat kepercayaan dari salah satu tv swasta nasional. Dalam dunia penelitian survei, Adrinof termasuk salah satu dari sedikit peneliti yang memiliki pengalaman cukup panjang karena sudah mulai menangani pekerjaan sebagai Ketua Tim semenjak tahun 1993. Ia juga terlibat dalam persiapan survei perdana Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dibiayai oleh Japan International Cooperation Agency (JICA). Tidak mengherankan jika dalam Musyawarah Nasional (Munas) I Perhimpunan Survei Opini Publik (PERSEPI) pada akhir Januari 2009 lalu, ia terpilih sebagai Ketua Umum perhimpunan tersebut.

Terakhir, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN), Drs. Umar S. Bakry, MA lahir 7 April 1962. Mahasiswa program doktor (Ph.D) di University Sains Malaysia (USM) Penang ini cukup lama berkicimpung di dunia riset. Ia menjadi Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jayabaya selama 2 (dua) periode dan telah menjadi Peneliti di lembaga tersebut sejak 1989. Pernah pula menjadi Peneliti di Pusat Studi Demokrasi (PSD) bentukan Denny J.A. Sebelum itu ia sempat menjadi wartawan (Koordinator Reportase) di Majalah Warta Ekonomi. Saat berbagai pihak menggugat validitas kinerja lembaga survei di Indonesia, Sekjen Asosiasi Riset dan Opini Publik Indonesia (AROPI) ini malah mengakui kalau ada lembaga survei yang nakal. Menurutnya, ada lembaga survei yang menyampaikan ke publik tidak sesuai fakta, tapi sesuai permintaan klien. ■ **MLP, BHS**

lakukan semasa mahasiswa dia mengatakan, ada satu survei yang cukup lama ia kerjakan yakni survei evaluasi kirab remaja di Timor Timur (saat masih menjadi salah satu provinsi di Indonesia). Sehingga dua pertiga dari jumlah provinsi itu pernah dia kelilingi dan mengenal penduduk di sana.

Dengan latar belakang pendidikan bidang Political Behaviour (perilaku politik) dari University of Essex, Inggris (2003) dan sarjana Psikologi Sosial dari Universitas Indonesia (1997), kompetensi Qodari sebagai peneliti politik tidak diragukan lagi. Dari pengakuannya, lembaganya sudah mengantarkan puluhan kepala daerah sukses dalam pilkada.

Lain lagi dengan kisah Saiful Mujani pendiri Lembaga Survei Indonesia (LSI)

Pengusaha Riset



Denny Januar Aly, Phd
(4 Januari 1963)
Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI)



Muhammad Qodari
(15 Oktober 1973)
Direktur Indo Barometer



Adrinof A Channiago
(3 November 1962)
Direktur CIRUS Surveyors Group



Saiful Mujani
(8 Agustus 1962)
Direktur Lembaga Survei Indonesia



Umar S Bakry
(7 April 1962)
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional

Menguak Misteri Kematian David

Awal Maret lalu, David meninggal di Singapura. Berbagai informasi yang simpang siur membuat kematiannya menjadi misteri. Kini prosesnya sudah memasuki tahap sidang koroner. Kepedulian pemerintah Indonesia sangat diharapkan dalam pengungkapan kasus ini.

Awal Maret lalu, David Hartanto Widjaja, seorang mahasiswa Nanyang Technology University (NTU) Singapura asal Indonesia, meninggal karena jatuh dari lantai IV kampusnya. Ketika itu, pers Singapura mengabarkan bahwa David tewas bunuh diri dengan cara melompat. Ia juga disebutkan bunuh diri setelah lebih dulu menikam punggung dosen pembimbingnya Prof. Chan Kap Luk, dan menyayat pergelangan tangannya sendiri. David diduga tengah depresi karena beasiswa dicabut sedangkan penelitiannya belum rampung.

Namun, keluarga David sejak awal mempertanyakan penyebab kematian itu. Menurut ibunda korban, Lie Khun (49), David tidak mungkin berusaha membunuh apalagi bunuh diri dengan pisau karena sejak kecil dia tidak mau bermain pisau.

Belakangan, keluarga David semakin curiga melihat beberapa kejanggalan di jenazah korban karena tidak menemukan adanya sayatan di pergelangan tangan sesuai informasi sebelumnya, tapi malah menemukan tiga plester yang melintang di leher.

Sementara mengenai dugaan David sedang depresi akibat pencabutan beasiswanya, ayah korban, Hartanto Widjaja (56) juga menyangkalnya sebab menurutnya, keluarga saja sudah mengetahui pencabutan beasiswa itu dua pekan sebelum kejadian.

Kecurigaan semakin besar ketika empat hari kemudian, Zhou Zheng, staf NTU ditemukan gantung diri di apartemen kampus. Kasus itu dinilai terlampau penuh kebetulan. Soalnya, David dan Zhou Zheng dikabarkan berada pada tempat yang sama, yakni Laboratorium S2-B3a-06 Gedung Electrical Engineering ketika David tewas.

Lebih mencurigakan lagi, anggota civitas akademi NTU yang lain kembali meninggal dengan cara tak wajar pada akhir Maret itu juga. Seorang peneliti yang sekampus dengan David, Dr. Hu Kunlun, tewas dalam sebuah kecelakaan lalu lintas.

Peneliti asal Cina yang baru tiga bulan bergabung dengan NTU itu tertabrak mobil sedan saat menyeberang.

Belakangan, beredar selentingan, sebagaimana dipublikasikan anggota tim verifikasi independen Iwan Piliang, ada dugaan David dibunuh karena motif ekonomi terkait risetnya yang berjudul *Multiview acquisition from multicamera*



David Hartanto Widjaja

configuration for person adaptive 3D display. Penelitian yang dibuat sebagai tugas akhir dengan menggunakan teknologi riset yang canggih itu disebutkan bernilai ekonomi tinggi.

Hasil otopsi jenazah juga mendukung kecurigaan kalau David dibunuh. Otopsi menerangkan, ditemukan 36 luka di jenazah David, 14 di antaranya luka oleh pisau yang umumnya di bagian tangan, sisanya luka memar, termasuk bagian leher yang mengalami luka dalam.

Selain berbagai informasi di atas, tim verifikasi juga mendapat informasi yang menyebutkan bahwa sesaat sebelum David ditemukan tewas, David berteriak, "They want to kill me!" Teriakan itu menurut informasi, didengar oleh seorang *office boy* NTU. Mengenai hal itu, Iwan dengan timnya berjanji akan memverifikasi informasi tersebut. "Bila itu teriakan David, artinya pada saat kejadian, dia dikejar oleh lebih dari satu orang. Kalau kita

dapat siapa 'they' itu, ceritanya bisa panjang," ujar Iwan.

Dari berbagai informasi itu, terasa sekali ada sesuatu yang disembunyikan dalam pengungkapan kasus ini. Bukan hendak bermaksud mengintervensi pengadilan di Singapura, tapi berhubung kematiannya yang mencurigakan di negara lain, apalagi mengingat jasa almarhum yang pernah mengharumkan nama bangsa dengan menjuarai olimpiade matematika dunia, perhatian pemerintah sebenarnya sangat diharapkan untuk membantu pengungkapan masalah ini.

Kini kasusnya sudah memasuki persidangan koroner (pengadilan kasus kematian tidak normal yang mendadak seperti kecelakaan, bunuh diri, dan lain-lain). Keluarga David memang telah menunjuk kuasa hukum di Singapura, Sashi Nathan dari Harry Elias Partnership. Tapi, dukungan Pemerintah Indonesia masih diperlukan terhadap kasus ini, karena diyakini, dengan menunjukkan sedikit perhatian akan sangat membantu transparannya proses penyidikan di Negara Singa itu.

Sejauh ini, pemerintah belum menun-



Prof Chan Kap Luk

jukkan kepedulian dengan kasus ini. Entah karena sedang disibukkan pemilu, presiden dan wakil presiden yang biasanya cepat mengomentari berbagai masalah yang menimpa warga itu, dalam kasus ini belum memberi komentar sedikit pun.

Tanpa bermaksud membandingkan nyawa manusia, padahal dalam kasus penculikan Raisya (5) - putri Ketua II Bidang Investasi dan Permodalan dan Pembinaan UKM Hipmi Ali Said pada 15 Agustus 2007 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung menyerukan agar pelaku penculikan segera membebaskannya. Dan ternyata tak lama kemudian, penculik pun membebaskan anak tersebut.

Dalam kasus David ini pun, pemimpin negara diharapkan menyampaikan sedikit harapan kepada Pemerintah Singapura tentang penyelidikan kasus tersebut. Sebab, di samping membela hak warganya, harga diri bangsa juga dipertaruhkan di sini. ■ MOR

Tatkala Barang Bukti Jadi Komoditi

Petugas hukum melakukan tidak pidana. Kemudian petugas lain mentolerir pelepasan mereka dari tahanan hanya demi 'basa-basi' aturan birokrasi. Ini menjadi cermin lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Penegakan hukum di negeri ini sudah seperti di neraka. Tidak ada lagi orang yang bisa dipercaya. Ada serigala berbulu domba. Maling teriak maling. Polisi dan jaksa yang diharapkan menegakkan hukum, malah menjadi pelaku kejahatan itu sendiri.

Baru-baru ini dua orang jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Esther Thanak dan Dara Veranita terlibat penggelapan barang bukti berupa 343 butir ekstasi. Menurut Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Komisaris Besar Arman Depari, sindikasi itu terbongkar, berawal dari dibekuknya seorang pegawai harian lepas di kantor Polsek Pademangan, Ja-

5.000 butir ekstasi. Barang bukti tersebut telah diserahkan Kepolisian ke Kejari Jakarta Utara setelah berkasnya dinyatakan lengkap atau P21. Di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Esther ditunjuk menjadi jaksa penuntut dalam kasus tersebut.

Dengan akal bulusnya, jaksa Esther mengganti barang tersebut dengan barang bukti palsu yang bentuknya hampir mirip. Akibatnya, barang bukti ke pengadilan jadi berkurang. Pada sidang di Pengadilan negeri Jakarta Utara pertengahan April lalu, jaksa tidak bisa menunjukkan barang bukti. Majelis hakim terpaksa datang ke Kejari Jakarta Utara untuk melihat

perluhan untuk perpanjangan penahanan anggota kejaksaan yang tersangkut kasus.

Di lain pihak, Kejaksaan Agung mengaku tidak pernah menerima surat permohonan perpanjangan penahanan itu. Yang mereka terima katanya hanya surat pemberitahuan bahwa telah dilakukan pemeriksaan, penangkapan dan penahanan terhadap Esther dan Dara. Karena itulah makanya Kejaksaan Agung merasa tidak perlu membalasnya. Belakangan, pihak Kejaksaan dan Kepolisian 'sepakat' berharap agar masyarakat tidak berpolemik atas kontroversi itu sehingga tidak perlu berlarut-larut. Di tengah kontroversi itu, kedua tersangka yang hanya diwajibkan melapor pun kembali menunjukkan arogansinya dengan beberapa kali tidak datang memenuhi kewajibannya.

Terlepas dari versi siapa yang bisa dipercaya di antara kedua instansi tersebut, perilaku beberapa petugas hukum dalam kasus ini kembali menunjukkan lemahnya tekad sebagian aparat dalam menegakkan hukum. Tersangka yang sudah jelas melakukan tindak pidana, masih ditoleran hanya demi 'basa-basi' aturan birokrasi.

Terungkapnya kasus ini membuat masyarakat semakin skeptis terhadap penegakan hukum di negeri ini. Apalagi, kasus penggelapan barang bukti kali ini diyakini masyarakat hanya fenomena gunung es. Beberapa kasus yang pernah terbongkar diperkirakan hanya sebagian kecil dari kasus yang sama yang belum terbongkar.

Beberapa kasus yang sebelumnya pernah terbongkar dan sampai ke telinga publik antara lain: Oktober 2001, oknum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Jawa Timur menggelapkan barang bukti berupa uang palsu senilai Rp 45 juta. Kemudian pada Oktober 2007, dua perwira menengah (Pamen) di lingkungan Polwil Cirebon, Jawa Barat dicopot dari jabatannya sebagai Wakapolwil Cirebon dan Wakapolres Cirebon karena terlibat praktik jual beli barang bukti berupa mobil mewah.

Di Lingkungan Kejari Nganjuk Jawa Timur, September 2008 juga terjadi penggelapan barang bukti. Budi Santoso Kasubag Pembinaan Kejari Nganjuk saat itu diduga terlibat penjualan barang bukti berupa pupuk bersubsidi sebesar 19 ton bersama Yuni, seorang jaksa di Kejaksaan Tabanan, Bali.

Kini, yang masyarakat tahu, peraturan bukannya kurang banyak atau kurang bagus di negeri ini, tapi pelaksanaanyalah yang tidak benar. Sehingga masyarakat masih menunggu lahirnya pahlawan penegak hukum yang benar-benar jujur berjuang demi keadilan. ■ MOR



Dua orang jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Esther Thanak dan Dara Veranita terlibat penggelapan barang bukti berupa 343 butir ekstasi

karta Utara bernama Zaenanto yang kedapatan menyimpan 100 butir ekstasi.

Dalam pemeriksaan polisi, Zaenanto mengaku barang itu adalah milik Irvan, seorang polisi berpangkat Iptu yang bertugas di Polsek Pademangan juga. Polisi yang mengedeh ruangan Irvan kemudian menemukan 243 butir lagi ekstasi yang belum sempat terjual. Kepada penyidik, Irvan mengaku ekstase tersebut diperolehnya dari Esther dan Dara, dua anggota kejaksaan di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

Dari hasil penyidikan selanjutnya diketahui, bahwa ekstasi itu merupakan sebagian dari barang bukti dalam kasus penggerebekan kepolisian di Apartemen Paladian Park 1511 Tower, Kelapa Gading, Jakarta Utara, September 2008, dimana ketika itu polisi menangkap tersangka Muhammad Yusuf alias Kebot bersama

barang bukti. Setelah dihitung lagi, ternyata jumlahnya telah berkurang 556 butir. Polisi kemudian mempersangkakan kekurangan itu kepada Esther dan Dara.

Kedua jaksa sudah diperiksa dan sempat ditahan di ruang tahanan Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Namun setelah 20 hari, kedua jaksa 'nakal' itu terpaksa dibebaskan karena masa penahanan mereka telah habis. Keduanya kemudian hanya diwajibkan melapor ke Polda Metro Jaya dua kali seminggu.

Mengenai masalah pelepasan kedua jaksa ini, sempat terjadi kontroversi antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Menurut pihak kepolisian, surat permohonan perpanjangan masa tahanan yang mereka ajukan kepada Kejaksaan Agung disebut-sebut tidak diteken Jaksa Agung. Padahal sesuai peraturan, surat izin itu di-

Al-Zaytun Sumber Inspirasi (4)

Obor Demokrasi

Syaykh al-Zaytun: Indonesia harus masuk dalam *zone of peace and democracy* kalau ingin menjadi negara yang kuat, beradab dan bermoral di muka bumi ini bersama-sama dengan negara-negara lain.

Kami sengaja mengutip pernyataan ini dalam rangkaian tulisan 'Al-Zaytun Sumber Inspirasi' seri yang keempat, berkaitan dengan suasana pesta demokrasi yang berlangsung di Indonesia saat ini. Dimulai Pemilu Legislatif yang sudah diselenggarakan pada Kamis, 9 April 2009 dan akan dilanjutkan Pemilu Presiden pada 8 Juli 2009 dan mungkin putaran kedua pada 8 September 2009.

Pernyataan tersebut di atas dikemukakan Syaykh al-Zaytun Abdussalam Panji Gumilang, saat kami pertama kali berkunjung dan bertemu, Kamis malam 19 Februari 2004 di Wisma Tamu Al-Ishlah Ma'had Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat. Kala itu, Syaykh didampingi dua ekponen Al-Zaytun yakni Uztad Abdul Halim dan Uztad Nurdin Tsabit serta seorang wartawan Majalah Al-Zaytun.

Bagi kami, sebagai seorang jurnalis yang tengah mengembangkan jurnalistik biografi di situs web Ensiklopedi Tokoh Indonesia, disingkat Ensikonesia (TokohIndonesia.Com), pernyataan singkat ini, sangat bermakna sebagai suatu sumber inspirasi dalam mengenal, dan mengapresiasi, who is who, apa siapa, tokoh pendiri Ma'had Al-Zaytun itu.

Tokoh yang semula kami pandang cukup kontroversial dari berbagai isu dan berita yang tersiar di berbagai media. Kami pandang kontroversial, lantaran kala itu tersiar kabar dalam dua arus yang bertolak belakang, tanpa ada bantahan atau penjelasan resmi dari pihak Al-Zaytun.



Oleh Ch Robin Simanullang

Suatu arus berita yang menyatakan secara ekstrim bahwa Panji Gumilang adalah tokoh Negara Islam Indonesia (NII KW9). Ia membangun Al-Zaytun sebagai pusat NII KW9 dengan ajaran sesat dan cara-cara tertentu, bila perlu menganjurkan pengikutnya melakukan pemaksaan dan penipuan dalam hal pengumpulan dana.

Sementara, arus berita yang lain memaparkan visi, misi, program dan karya nyata yang menunjukkan bahwa pondok pesantren modern ini dibangun sebagai pusat pengembangan budaya toleransi dan perdamaian. Bahkan salah seorang pengagumnya menyurati kami dengan pernyataan bahwa Syaykh Panji Gumilang seorang tokoh muslim moderat berkaliber internasional sehingga sangat perlu biografinya masuk dalam Ensiklopedi Tokoh Indonesia.

Atas dua arus berita yang bertolak belakang itu, terutama atas berita



Syaykh AS Panji Gumilang menggunakan hak pilih

yang menyatakannya sesaat dan pusat NII, tidak ada bantahan dan penjelasan resmi dari Syaykh Panji Gumilang atau Al-Zaytun. Sehingga bagi kami, barangkali juga bagi orang yang belum pernah mengunjungi langsung Kampus Al-Zaytun, atau belum mengenal secara dekat dengan Syaykh Panji Gumilang, hal ini cukup

Masa Depan



nya dalam Pemilu 9 April 2009

mengundang sebuah kontroversi bahkan mungkin sebuah misteri.

Bagi kami, dua arus berita ini, terutama berita yang memaparkan bahwa pondok pesantren modern ini sebagai pusat pengembangan budaya toleransi dan perdamaian (Sebab jurnalistik biografi yang kami kembangkan memegang motto:

Pengukir kebaikan dan kebesaran orang lain), membuat kami terdorong untuk menyurati, memohon kesediaan Syaykh Panji Gumilang untuk wawancara. Ternyata surat kami direspon dengan cepat. Kami pun diterima dengan sangat terbuka, tentu saja setelah melalui prosedur administrasi dan etika bertamu (berkunjung). Bahkan, kami

lebih dulu dipersilakan dan dipandu berkeliling mengobservasi hampir seluruh kegiatan dan fasilitas di pondok pesantren seluas seribu hektar lebih itu. Setelah seharian berkeliling, kami pun berkesempatan berdialog, pertama kali, dengan Syaykh Panji Gumilang.

Kami pun menulis, mengapresiasi, sesuai apa yang kami lihat dan dengar di kampus itu. Memang, salah satu kebijakan penulisan jurnalistik biografi yang tengah kami kembangkan di Ensiklopedi Tokoh Indonesia Online adalah mengapresiasi (narasi) seseorang tokoh sesuai (atas) visi tokoh yang bersangkutan. Apalagi bila kami punya kesempatan mengobservasi dan berdialog dengan tokoh yang bersangkutan. Dengan keyakinan profesionalisme *biography journalistic* yang kami anut dan kembangkan, kami menuturkan secara naratif apa siapa tokoh itu. Sampai saat ini, kami masih sangat jarang meminjam penilaian atau apresiasi orang lain terhadap seorang tokoh. Dengan yakin, sejauh ini kebijakan kami masih mengedepankan penilaian dan apresiasi kami sendiri tentang apa siapa tokoh yang bersangkutan. Walaupun pernyataan orang lain terhadap apa siapa seorang tokoh, selalu berguna sebagai referensi dan pembanding.

Dalam sekali pertemuan itu, banyak hal yang kami lihat, gali dan tanyakan, sehingga kami berkeyakinan mengapresiasi Syaykh Panji Gumilang dan Ma'had Al-Zaytun yang kemudian kami publikasikan di situs web TokohIndonesia.Com dan Majalah Tokoh Indonesia.

Ternyata, setelah lebih lima tahun dan kemudian kami berulang kali mengunjungi Al-Zaytun dan seringkali berdialog, berdiskusi dengan Syaykh Panji Gumilang, apa yang kami tulis lebih lima tahun lalu itu, memang itulah apa adanya Al-Zaytun. Dalam pandangan dan pengalaman kami, tidak ada yang tersembunyi di pondok pesantren modern ini.

Dalam pandangan kami, Syaykh Panji Gumilang seorang tokoh pemangku



Seluruh civitas akademi Al-Zaytun berbondong-bondong memberikan suaranya dalam Pemilu 9 April 2009

Dalam pandangan dan pengalaman kami, tidak ada yang tersembunyi di pondok pesantren modern ini.

pendidikan yang visioner, pelopor pendidikan terpadu, guru besar pembawa panji toleransi dan perdamaian dalam kerangka berpikir dan bertindak yang interdependensi, cendekiawan muslim yang berpikir bebas, menjunjung tinggi nilai-nilai moral bangsa dan nilai-nilai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam lebih lima tahun bersahabat (saling mengenal, berdialog, berdiskusi dan bermitra) dengannya, bagi kami dia adalah seorang guru, sahabat, yang selalu memberi solusi, berpandangan positif, menghormati perbedaan, punya prinsip teguh tentang kebenaran yang diyakininya sekaligus juga menghargai kebenaran yang diyakini orang lain. Tidak pernah mau diajak bicara tentang keburukan orang lain, bahkan ketika seseorang itu menista dan memfitnahnya. Juga tidak pernah berbicara tentang kepentingan kelompok (agama, suku, dan lain-lain) dengan mengorbankan kepentingan kelompok lain. Ia selalu mengajarkan hubungan yang interdependensi.

Pola berpikir ini pula yang ditanamkan kepada setiap eksponen, guru, santri dan karyawan di Al-Zaytun. Di kampus ini, setiap orang dipersiapkan untuk menjadi dirinya di masanya nanti dengan persiapan cerdas berpikir, punya bajik dan bijak, sains teknologi, cinta negara yang bertanggung jawab dan mampu hidup dengan bangsa-bangsa lain. "Itu saja



Syaykh AS Panji Gumilang memasukkan kertas suara

yang dibekalkan pada peserta didik dan mereka nanti akan berinovasi pada zamannya," katanya dalam percakapan pertama dengan kami.

"Sehingga nanti kita bertemu yang namanya *International Setting*, karena cita-cita seperti itu merupakan cita-cita pendidikan internasional. Nanti cara berpikir kita, *International Thinking*.

Cara solidaritas kita, *International Solidarity*. Tatanan hidup kita, setingnya, *International Setting*. Barangkali itulah yang dinamakan hidup global dan itulah yang dinamakan globalisasi. Kekuatan nasional, namun kita mampu mengakses kehidupan antarbangsa,” ujarnya. Sehingga kami menyebut Ma’had Al-Zaytun sebagai Kampus Peradaban Berskala Dunia.

Nyalakan Obor Demokrasi

Sebagai pendiri dan menjadi personifikasi (tokoh panutan) Al-Zaytun, Syaykh Panji Gumilang juga mengajarkan dan menyalakan obor demokrasi. Sebagaimana kami petik menjadi *lead* tulisan ini, menurutnya, Indonesia harus masuk dalam *zone of peace and democracy* kalau ingin menjadi negara yang kuat, beradab dan bermoral di muka bumi ini bersama-sama dengan negara-negara lain.

Sementara, dalam berbagai forum di dunia Islam, usaha penerapan demokrasi masih mengalami pasang surut. Masih mengemuka pertanyaan: Apakah Islam sesuai dengan demokrasi?

Kelompok kedua (moderat) menganggap demokrasi sesuai dengan Islam. Menurut mereka, tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bertentangan dengan Islam. Kelompok ini berpandangan bahwa nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, konsultasi atau syura, keadilan dan pengawasan publik, sejalan dengan Islam. Prof. Ahmad anna’im, seorang pakar hukum Islam asal Sudan yang kini menetap di Amerika, termasuk salah seorang penganut paham ini. “Saya membutuhkan demokrasi untuk menjadi muslim yang baik,” tegas Prof. Ahmad anna’im. Menurutnya, ada semacam *link organic* antara syariat dan demokrasi.

Akademisi yang dilatari pengalaman sebagai seorang aktivis, ini mengatakan merasakan betul pentingnya kehidupan yang demokratis bagi negeri-negeri muslim. Pernyataan ini berkaitan dengan masih banyak negeri muslim yang terjatuh pada despotisme otoritarian. Sehingga, beberapa kalangan ilmuwan barat pun, seperti Huntington, meragukan negeri-negeri

ingin menjadi negara yang kuat. Sama seperti apa yang dikemukakan Prof. Ahmad anna’im di atas, pernyataan Syaykh Al-Zaytun ini, menjadi sumber inspirasi bagi setiap orang yang ingin mendalami kehidupan berdemokrasi, terutama bagi para calon pemimpin bangsa di negara berpenduduk muslim seperti Indonesia.

Menurut Panji Gumilang, dalam kehidupan bernegara, kita perlu (harus) memiliki kerangka nilai (demokrasi) yang mampu menampung semua elemen bangsa. Visi dan ajarannya tentang demokrasi tidak sekadar paparan teori dalam kelas, tetapi juga dalam aplikasi dalam tubuh Organisasi Pelajar Ma’had Al-Zaytun (OPMAZ). Menurutnya, dalam rangka kaderisasi kepemimpinan bagi para santri, untuk menjadikan mereka pemimpin yang handal, tak cukup hanya dengan memberikan teori-teori tentang kepemimpinan. Mereka harus memiliki wadah praktik yang bisa menajamkan insting kepemimpinan.

Oleh karena itu, dibentuk sebuah organisasi siswa yang dinamakan



ke dalam kotak yang disediakan



Penghitungan suara di Ma’had Al-Zaytun diawasi oleh beberapa saksi

Pertanyaan ini melahirkan beragam jawaban. Paling tidak bisa dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama (Islam Ideologis) menganggap demokrasi tidak sesuai dengan Islam. Karena, menurut mereka, demokrasi merupakan sistem kafir, karena telah meletakkan kedaulatan negara di tangan rakyat bukan Tuhan.

Islam mampu berdemokrasi.

Tatkala terpublikasikan pandangan yang beragam tentang Islam dan demokrasi dan adanya keraguan penerapan nilai-nilai demokrasi di negeri muslim, Syaykh Panji Gumilang telah menegaskan visinya tentang mutlak perlunya Indonesia masuk dalam zona damai dan demokrasi jika

Organisasi Pelajar Ma’had Al-Zaytun, disingkat OPMAZ. Organisasi ini disesuaikan dengan bagan peran dan fungsi yang ada di Yayasan Pesantren Indonesia (YPI). Maka, pembentukannya pun berdasarkan sebuah surat keputusan.

Untuk membentuk organisasi siswa ini, terlebih dahulu diangkat sebuah

Tatkala terpublikasikan pandangan yang beragam tentang Islam dan demokrasi dan adanya keraguan penerapan nilai-nilai demokrasi di negeri muslim, Syaykh Panji Gumilang telah menegaskan visinya tentang mutlak perlunya Indonesia masuk dalam zona damai dan demokrasi jika ingin menjadi negara yang kuat.

Komite Pembentukan Organisasi Siswa yang bertugas membuat tata cara dan aturan pemilihan organisasi siswa. Kemudian komite ini, antara lain masa kerja pengurus (yang berasal dari santri kelas IV dan kelas V) hanya satu tahun dan tidak bisa dipilih kembali. Ditetapkan juga bahwa organisasi siswa ini bersifat *program oriented* dan masuk dalam domain demokrasi modern.

Yang paling menarik adalah Pilihan Raya Presiden Organisasi Pelajar Ma'had Al-Zaytun. Sebelum negara ini melaksanakan pemilihan langsung Presiden RI yang baru pertama kali berlangsung 5 Juli 2004 lalu dan akan dilakukan untuk kedua kalinya pada 8 Juli 2009 nanti, telah terlebih dahulu dipraktikkan di MAZ dalam rangka Pilihan Raya Presiden Organisasi Siswa, pada 22 Januari 2003.

Syaykh AS Panji Gumilang menekankan, bahwa Presiden OPMASZ ini adalah satu proses yang harus dijalankan tanpa lepas daripada frame yang ada. Untuk itu dukungan generasi tua, guru-guru, eksponen mutlak diperlukan mengantarkan kader-kader ini menjadi pemimpin di masanya yang akan datang.

serta berakhlakul karimah.

Tahap pertama dilakukan pendaftaran calon presiden. Bakal calon dibatasi hanya dari santri kelas tertinggi, rijal maupun nisa diberi kesempatan yang sama. Tahap selanjutnya, dari bakal calon yang mendaftar dipilih menjadi 100 orang bakal calon dengan perbandingan persentase sesuai perbandingan jumlah santri rijal dan nisa yang ada di kelas tertinggi. Misalnya, jika perbandingan santri rijal dan nisa 60% : 40%, maka jumlah bakal calon adalah 60 orang calon rijal dan 40 orang calon nisa.

Untuk memperoleh 10 bakal calon, setiap santri pemilih mengisi kartu suara dengan menuliskan tiga nama calon beserta nomor induknya - peserta cukup menuliskan empat angka terakhir nomor induk masing-masing calon. Selanjutnya kartu yang telah terisi dimasukkan ke dalam kotak kaca transparan. Setelah semua kartu suara terkumpul, baru dilaksanakan penghitungan suara.

Untuk penghitungan suara selain menggunakan cara manual (tulisan tangan) juga menggunakan komputerisasi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari sekecil mungkin berbagai kesalahan yang terjadi.



Kru stasiun televisi Metro TV mewawancarai Syaykh Al-Zaytun dan Umi seausi mencontreng

Dalam proses demokrasi itu, tidak gampang menjadi Presiden OPMASZ. Pemilihan dilakukan dengan seleksi ketat, dipilih bertahap secara langsung dan demokratis. Hanya sepuluh orang yang akan bersaing dari seratus yang dicalonkan. Syaratnya minimal sesuai dengan ketentuan undang-undang pemilihan yaitu para calon harus menguasai dua bahasa antarbangsa, mampu membaca Alquran dengan baik,



Santri kelas tertinggi, rijal maupun nisa diberi kesempatan

Kemudian 10 calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai bakal calon yang harus bertarung lagi pada tahap berikutnya.

Proses pelaksanaan pemilihan pada tahap kedua ini sedikit berbeda dengan tahap sebelumnya. Jika pada tahap pertama santri rijal menuliskan tiga nama bakal calon presiden rijal dan santri nisa menuliskan tiga nama calon presiden nisa, pada tahap kedua ini peserta bebas menuliskan dua nama calon, baik dari rijal maupun dari nisa.

Kesepuluh bakal calon ini pun kemudian diseleksi kembali berdasarkan undang-undang (peraturan) pemilihan. Mereka harus menjalani *fit and proper test* melalui sebuah proses wawancara langsung oleh Syaikh Ma'had Al-Zaytun dan Dewan Guru. Hal-hal yang diuji antara lain kemampuan berbahasa, membaca Alquran, tes etika, wawasan politik dan program-program apa yang akan dijalankan andaikan terpilih menjadi presiden.

Kemudian, para calon diberikan kesempatan berkampanye menyampaikan program-program di hadapan santri, konstituen, yang akan memilih mereka. Proses ini sekaligus berfungsi sebagai sarana mengasah kemampuan para santri untuk tampil



Kandidat dengan percaya diri tampil di hadapan publik

cerdas memaparkan pikiran (programnya) di hadapan publik. Sesi terakhir, yang paling menarik adalah kesepuluh calon presiden itu juga harus mampu debat terbuka disaksikan oleh seluruh santri dan eksponen MAZ.

Setelah itu, tibalah hari pemilihan. Proses pemilihan berlangsung di beberapa bilik pemilih (TPS, tempat pemungutan suara). Para pemegang hak

suara (konstituen) wajib berpakaian resmi (berjas dan berdasi). Di bilik tertutup itu mereka menuliskan nama calonnya (kontestan) untuk kemudian dilipat dan dimasukkan ke kotak suara yang terbuat dari kaca bening.

Penghitungan suara pun dilakukan dengan perangkat modern seperti penghitungan suara yang dilaksanakan pada pemilu di negara-negara maju. Hasil sementara penghitungan suara dapat langsung diakses di seluruh meja penghitungan dan diperlihatkan di layar monitor raksasa yang dilengkapi foto seluruh kandidat sehingga para pemilih dapat melihat langsung berapa jumlah perolehan suaranya setiap detik.

Kontestan (santri) yang meraih suara terbanyak ditetapkan sebagai Presiden OPMAZ. Urutan kedua ditetapkan menjadi Wakil Presiden. Kemudian, setelah terpilih, Presiden dan Wakil Presiden OPMAZ menyusun susunan Kabinet OPMAZ yang terdiri dari Sekretaris Presiden OPMAZ dan beberapa menteri yang mengepalai departemen. Delapan orang kandidat yang mereka sisihkan pun dirangkul menjadi menteri di kabinet yang mereka bentuk. Setelah lengkap dengan segala perangkat teknisnya, mereka pun dilantik oleh Syaikh al-Zaytun.

Sehari sebelum pelantikan terlebih dahulu diadakan karnaval mengitari kompleks kampus. Presiden dan Wakil Presiden terpilih naik kereta yang ditarik oleh seekor sapi didampingi para menteri di sampingnya dan ribuan santri yang mengenakan pakaian adat masing-masing provinsi.

Pada acara pelantikan, Presiden terpilih didaulat menyampaikan pidato pelantikan. Usai pelantikan mereka pun mengadakan rapat kerja menyusun program kerja. Setiap departemen



Kandidat yang sama menjadi Presiden Organisasi Pelajar Al-Zaytun

Sebelum negara ini melaksanakan pemilihan langsung Presiden RI yang baru pertama kali berlangsung 5 Juli 2004 lalu dan akan dilakukan untuk kedua kalinya pada 8 Juli 2009 nanti, telah terlebih dahulu dipraktikkan di MAZ dalam rangka Pilihan Raya Presiden Organisasi Siswa, pada 22 Januari 2003.

dibimbing oleh eksponen dan petugas dari unit yang berkaitan dengan bidang pekerjaan mereka. Berbagai program itu pun kemudian dilaksanakan. Organisasi pelajar ini aktif pada setiap event di kampus ini, seperti dalam perayaan Idul Adha dan 1 Muharram. Mereka juga mulai mengambil alih tugas para mudarris dalam menjaga kedisiplinan, di bawah bimbingan Dewan Guru dan mudarris.

Syaykh berkeyakinan, OPMAZ yang dibentuk dengan tujuan mendorong kehidupan demokrasi melalui pendidikan dan pelatihan, akan melahirkan calon pemimpin bangsa yang demokratis serta menjunjung tinggi multikulturalisme, pro-eksistensi, kesetaraan, perikemanusiaan yang adil dan beradab, kedaulatan rakyat, keterbukaan, integritas, akuntabilitas dan meritokrasi.

Sejak dini demokrasi sudah diajarkan disosialisasikan sebagai sebuah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah.

Kepada santri juga ditransformasikan bahwa salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) yang satu sama lain saling lepas (independen)

dan berada dalam peringkat yang sejajar. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara itu diperlukan agar bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Istilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno pada abad ke-5 SM. Berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dalam bidang ilmu politik, konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci yang teramat penting. Demokrasi menempati posisi vital dalam hal pembagian kekuasaan (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica), dimana kekuasaan negara itu diperoleh dari rakyat, dan harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Jadi demokrasi tidak sekadar proses Pemilu. Demokrasi dalam arti sesungguhnya terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia. Hal mana setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, berserikat dan bermasyarakat. Yang bermuara pada pemenuhan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Demokrasi merupakan fitrah yang



Seorang kandidat nisa memaparkan visi dan misinya dalam pemilihan Presiden Organisasi Pelajar Al-Zaytun (OPMAZ)



Proses pemilihan Presiden OPMAS dilakukan dengan perangkat modern seperti yang dilaksanakan pada pemilu di negara-negara maju.

harus dikelola dengan aturan main yang baik agar menghasilkan output yang baik. Aturan main tersebut sesuai dengan nilai-nilai dasar negara yang kemudian diatur dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah. Jika tidak punya aturan main, bisa menimbulkan anarkisme.

Selain aturan main, demokrasi yang kuat (taat asas) akan tercapai jika didukung sumber daya manusia yang kuat pula. Dengan aturan main dan sumber daya manusia yang kuat, anarkisme akan tereliminasi.

Jika belajar dari pengalaman berdemokrasi dalam sepuluh tahun lebih era reformasi di negara kita, masih terlihat berbagai tindakan anarkis yang seolah-olah merupakan bagian dari hak demonstrasi (demokrasi). Padahal anarkisme justru bertolak belakang dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Tampaknya, sebagian besar orang hanya tahu mereka bebas berbicara, beraspirasi, berdemonstrasi. Dan tidak sedikit fakta yang memperlihatkan adanya pengrusakan ketika terjadinya demonstrasi menyampaikan pendapat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang memerlukan pemahaman yang utuh tentang demokrasi agar bisa menikmati demokrasi.

Dalam pengalaman terbaru, penyelenggaraan Pemilu Legislatif 9 April 2009, sebagai salah satu unsur dan sarana penting demokrasi, juga belum memperlihatkan telah terbangunnya demokrasi yang kuat di negara kita. Selain akibat kualitas penyelenggaraannya yang justru menurun dari Pemilu sebelumnya, juga lemahnya sumber daya kontestan dan banyaknya terabaikan hak warga negara untuk memilih.

Sehingga demokrasi yang mulai tumbuh saat ini belum memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemaslahatan bangsa, mengurangi kemiskinan dan menghasilkan pemimpin yang lebih memperhatikan kepentingan rakyat banyak. Demokrasi harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Sehubungan dengan itu, dalam pandangan Syaykh Al-Zaytun, bagi setiap warga Indonesia, nilai-nilai demokrasi sudah harus diajarkan dan dipraktekkan sejak dini. Secara khusus, transformasi nilai-nilai demokrasi, secara teori dan praktek, sudah berlangsung sedemikian rupa di Al-Zaytun. Diharapkan, dalam lima tahun, sepuluh tahun, lima belas tahun ke depan cahaya obor demokrasi yang telah dinyalakan dalam proses pembelajaran

di Al-Zaytun, akan memberikan kontribusi yang amat berarti pada perkembangan demokrasi di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan cita-cita yang selalu dikumandangkan di Al-Zaytun bahwa Indonesia harus kuat. Demokrasi yang kuat akan melahirkan negara yang kuat. Perlu dicatat, negara yang kuat tidak identik dengan otoritarianisme maupun militerisme.

Syaykh Panji Gumilang berkeyakinan lulusan dari Al-Zaytun akan menjadi manusia yang dewasa. Dia menggarisbawahi kata dewasa, sebab menurutnya, di Indonesia ini penduduknya cepat tua tapi lambat dewasa. "Jadi kita inginkan lulusan Al-Zaytun ini menjadi manusia dewasa yang cerdas. Kemudian mempunyai satu semangat, cerdas, bajik, bijak, dan menguasai sains dan teknologi. Yang selanjutnya dalam bernegara mereka cinta negara, mengerti tujuan bernegara dan cita-cita bernegara. Cita-cita dan tujuan hidup bernegara itu menjadi sikap hidup mereka selama menjadi warga bangsa Indonesia. Atau karena nanti bangsa-bangsa lain ada yang masuk kita ciptakan seperti itu di negerinya," kata Syaykh Panji Gumilang ketika diwawancarai *The Asian Wall Street Journal*, Senin (15/4/02).

(Bersambung)

Kisah-kisah caleg stres dan depresi karena kalah dalam pemilu diperkirakan akan semakin ramai diberitakan dalam 1-2 bulan mendatang.

Menjadi anggota legislatif di Senayan adalah mimpi banyak orang. Puluhan ribu orang mendaftarkan diri menjadi calon legislatif (caleg) yang ingin duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Tk I), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotamadya (DPRD Tk II).

Berbagai upaya mereka lakukan. Ada yang lebih suka terjun ke lapangan menemui para pemilih potensial sambil menebar janji dan sumbangan. Ada yang lebih suka memasang poster dan baliho besar-besar di pinggir jalan. Ada pula yang mencoba memperbesar peruntungan dengan membuka akun facebook atau friendster. Bagi mereka yang bermodal besar, memasang iklan di beberapa surat kabar selama sebulan penuh bukanlah perkara yang sulit.

Sedangkan para caleg yang bermodal cekak, mereka harus pintar-pintar mengelola uang yang ada. Ketika kas mulai seret, sebagian memilih gali lubang tutup lubang. Saking kebeletnya menjadi caleg, ada pula yang tidak segan-segan mencuri atau merampok. Itulah gambaran singkat betapa menjadi anggota legislatif di Republik adalah sebuah impian.

Setelah sekian lama 'berkampanye', perjuangan mereka untuk merebut hati para simpatisan diuji dalam pemilu legislatif yang berlangsung 9 April 2009. Bagi yang lolos, tentu pengorbanan yang sudah dikeluarkan terbayarkan. Namun, bagi yang tidak lolos, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Kemungkinan pertama, menerima kekalahan dan melanjutkan hidup. Kemungkinan kedua, tidak mau menerima kekalahan yang lama kelamaan menunjukkan gejala stres, marah-marah, berteriak-teriak dan ada yang bunuh diri. Bahkan ironisnya, ada pula yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak punya harga diri sehingga orang lain kesusahan.

Burhanuddin, warga Parepare, Sulawesi Selatan, misalnya, menjadi 'korban' seorang caleg. Ia harus menurunkan barang-barangnya dari rumah panggung yang selama ini ia tinggali beserta dengan sejumlah warga lain. Karena keluarga pemilik tanah yang juga caleg PBB (Partai Bulan Bintang) Muhammad Daming tak mengizinkan lagi warga untuk menempati lahannya. Caleg tersebut merasa, warga yang tinggal di tanah miliknya tidak memberikan suaranya pada pemilu 9 April lalu sehingga dirinya tidak menda-

patkan kursi di parlemen. Akibat ulah sang caleg, warga yang telah bertahun-tahun tinggal di tanah tersebut akhirnya tinggal di tenda-tenda pengungsian yang telah disiapkan Dinas Sosial.

Lain lagi dengan ulah caleg perempuan berinisial S dari Kulon Progo, DI Yogyakarta yang gagal duduk sebagai anggota dewan. Ia menarik kembali sejumlah hadiah dan sumbangan yang pernah ia berikan kepada warga Desa Karang Sari, Pengasih, Kulon Progo. Sebagian sumbangan yang diberikan sudah terlanjur dipakai warga yaitu semen 14 zak untuk pembuatan jalan. Tidak mau ribut-ribut, akhirnya kepala dusun, mengeluarkan uang pribadi Rp 700.000 untuk membeli semen baru.

Begitu juga dengan caleg dari Desa Banjarparakan, Kecamatan Rawalo Kab. Banyumas. Setelah merasa tidak terpilih menjadi anggota dewan, ia menyuruh tim suksesnya menarik kembali dana yang sudah dibagikan kepada masyarakat. Ulah tim sukses sempat membuat warga keget dan bingung.

Dari Ternate dilaporkan, gara-gara perolehan suaranya hanya tiga, seorang caleg Partai Golkar Hartati Theis, sehari setelah penconntrengan menarik kembali televisi yang ia berikan kepada kelompok organisasi pemuda yang ditaruh di pos kampung yang juga menjadi pangkalan ojek. Sehingga menyebabkan para pemuda tersebut berang. Karena mereka (pemuda) di sana merasa tidak pernah ada perjanjian dengan si caleg untuk memilikinya.

Dari Ambon, sejumlah ibu-ibu di kompleks Permukiman Kepala Air, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon marah-marah, karena kecewa pada calon anggota legislatif yang ingin menarik kembali dua karpet pemberian sang caleg. Istri si caleg datang ke Kepala Air dan meminta kembali dua karpet. Karena warga sudah kecewa, karpet dibiarkan begitu saja dan warga enggan menyentuh karpet itu.

Tindakan para caleg yang menarik kembali barang-barang sumbangannya ini menunjukkan sikap yang tidak tahu malu dan tidak punya harga diri. Di sisi lain, ada pula caleg yang meski tidak menarik kembali sumbangannya, mulai kehilangan kewarasannya.

Dari Kota Cirebon (14/4) dilaporkan, Ustadz Ujang Bustomi di padepokannya yang berada di Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat didatangi belasan caleg yang mengalami depresi berat, karena gagal meraih



Akiba

kursi legislatif. Namun, Ujang mengakui, sebagian besar sudah membaik. "Alhamdulillah, caleg yang mengalami depresi berat karena gagal meraih kursi legislatif sebagian besar sudah ikhlas menerima kekalahan. Mental mereka sudah ada perkembangan," tutur Ustadz Ujang Bustomi pimpinan Forum Spiritual Peduli Cirebon (FSPC).

Sedangkan dari Desa Bungkel, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga (15/4), Wisma Rehabilitasi Mental, Sosial, dan Narkoba merawat sembilan pasien baru yang mengalami stres, di antaranya enam caleg yang kalah dan tiga tim sukses caleg dalam Pemilu 2009. Supono Mustajab, pengasuh wisma yang tidak mau membeberkan nama pasiennya mengatakan, sembilan orang stres tersebut berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Pekalongan. Dia juga menyebutkan pasien-pasien sering kali mengigau minta uang yang dikeluarkan untuk pemilu dikembalikan dan ada pasien yang selalu ingin telanjang dan ada pula yang diam terus tanpa respons saat disapa.

Sikap yang tidak seperti biasanya juga ditunjukkan dua caleg dan tiga simpatisan partai dari Kalimantan Tengah. Mereka terus mengoceh, murung, dan tidak mau makan dan minum. Dua dari lima orang



nt Kejar Kursi

itu mengalami gangguan jiwa ringan atau stres, seorang gangguan jiwa sedang atau depresi. Dua lainnya mengalami gangguan jiwa berat dan dirawat di Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Kalawa Atei, Kalteng.

Tindakan paling ekstrim dilakukan seorang ibu muda yang tengah hamil empat bulan, Sri Hayati (23) di Kota Banjar. Caleg PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kota Banjar, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Ciamis itu nekat mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri karena tidak siap menerima kekalahan pada pemilu caleg.

Kemungkinan banyaknya para caleg yang akan menghuni rumah sakit jiwa karena gagal duduk menjadi anggota dewan, memang sudah jauh-jauh hari diprediksi. Kemungkinan perilaku yang tidak beres ini sebenarnya sudah bisa dibaca saat awal sebelum mereka menjadi caleg. Mereka yang tidak matang mentalnya rentan terkena stres dan gangguan kejiwaan. Hal itu diungkapkan dosen Psikologi Politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, Selasa (14/4). Ketidakmatangan mental itu dapat muncul dari yang paling ringan berupa ketidakmampuan berpikir jernih atau bertingkah laku

buruk hingga tertawa atau menangis sendiri yang dikategorikan sebagai sakit jiwa. "Ini indikasi jelas, sejak semula yang menjadi caleg adalah orang-orang yang tidak beres (kesehatan jiwanya)," katanya.

Pendapat lain diungkapkan oleh Arie Sudjito dari Sosiologi Politik Universitas Gadjah Mada. Menurutnya, mahalnya proses demokrasi dan mengesampingkan etika telah membuat para caleg menempuh berbagai cara untuk menang, baik dengan berbuat curang, maupun melakukan politik uang. Ketidaksiapan mereka menghadapi kekecewaan menunjukkan gagalnya pembangunan etika politik. Ia menambahkan bahwa guncangan yang melahirkan frustrasi juga bisa dialami caleg yang lolos yang hanya berpikir pada target pribadi.

Begitu mahalnya biaya yang dikeluarkan caleg berdampak pada tekanan mental. Para ilmuwan psikologis menyarankan pentingnya peningkatan kualitas sekaligus penyederhanaan mekanisme interaksi antara rakyat dan para wakilnya di parlemen. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan berbasis elektronik maupun bertatap muka langsung. Dan perlunya pembenahan aturan-aturan yang tidak hanya menyangkut aspek substansi dan koor-

dinasi kerja, namun mempersiapkan kondisi psikologis para wakil rakyat itu sendiri.

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengakui, tekanan dalam dunia politik memang berat. Mereka yang tidak terbiasa bertempur di politik berpotensi menderita gangguan kejiwaan apabila didera kekalahan. Dan biasanya terjadi pada orang-orang yang baru memasuki gelanggang politik. Mereka yang sebelumnya terbiasa dengan dunia selebriti atau dunia yang sama sekali lain dengan dunia politik cenderung mudah kaget.

Sedangkan menurut Ketua Forum Jejaring Komunikasi Kesehatan Jiwa (FJKKJ) dr G Pandu Setiawan, SpKJ, masih ada keluarga dan kelompok masyarakat terdekat yang mampu membantu para caleg yang gagal tersebut agar terhindar dari depresi. Sehingga tidak perlu terlalu khawatir dan dibesarkan. Terlebih caleg yang gagal itu memiliki mental pertahanan diri yang kuat, maka mereka akan menghadapi kegagalan itu dengan tenang dan tidak sampai pada stres dan depresi, karena sebelumnya sudah terbiasa mendapat tekanan, dan selanjutnya akan memulainya perencanaan program baru.

■ BHS, RIE

Mencari Solusi Krisis

Ketersediaan energi listrik sangat vital bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Terobosan demi terobosan harus terus dicari demi berakhirnya *byarpet* yang merugikan dunia usaha dan terjaminnya energi listrik di masa depan.

Beberapa tahun terakhir ini, hampir setiap hari kabar pemadaman bergilir merebak di sejumlah daerah di negeri ini. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Lampung. Krisis listrik kali ini cukup banyak yakni 100 MW atau seperempat dari kebutuhan listrik provinsi Lampung. Krisis listrik yang terjadi selama 28 hari menjelang pemilu ini mengakibatkan PLN harus melakukan pemadaman bergilir saat beban puncak. PLN memberi alasan pemadaman terpaksa dilakukan karena adanya kerusakan di PLTU Tarahan Baru. Akibatnya, PLTU ini tidak bisa mengaliri listrik sebesar 200 MW.

Selain alasan pembangkit listrik rusak setiap kali ada *byarpet*, PLN juga kerap beralasan pada kurangnya pasokan bahan bakar hingga jaringan distribusi dan transmisi terganggu. Apapun alasannya, keadaan ini menunjukkan Indonesia mengalami kemunduran dan jauh tertinggal dengan negara-negara lain yang sudah cukup canggih memanfaatkan tenaga listrik.

Ironisnya, lahir pula surat kesepakatan bersama (SKB) lima menteri yang menyerukan kalangan industri untuk mengalihkan jam dan hari kerja dengan dalih agar mereka bisa mendapatkan pasokan listrik dengan wajar. SKB yang tidak wajar itu lahir karena kondisi listrik di negeri ini tidak wajar.

Bagi dunia usaha, menurut Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa, sebagaimana dikutip dari harian *Investor Daily*, listrik di Indonesia merupakan hambatan untuk meningkatkan daya saing. Hal ini menurunkan minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Kondisi ini tidak terjadi di sejumlah negeri jiran seperti Malaysia, Filipina, bahkan Vietnam. Pemerintah negara-negara itu benar-benar menjaga pasokan listrik di kawasan industrinya. Sedangkan di Indonesia, pasokan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada industri sangat kurang.

Pabrik semen Bosowa, misalnya, merasakan parahnya pasokan listrik dari PLN saat ini. Produksi perusahaan semen terbesar di Indonesia Timur itu tidak

efisien karena kapasitasnya cuma 5.000 ton per hari dari kapasitas maksimal 5.500 ton.

Selain itu, menurut Erwin, banyak pengusaha properti perkantoran di luar Jawa kebat-kebit dengan kondisi listrik di wilayahnya. Mereka terpaksa menyediakan generator *backup* berbahan bakar solar. "Ini berarti tambahan investasi apalagi satu megawat (MW) generator butuh investasi sekitar US\$ 500-600 ribu," ujar dia.

Pasokan listrik PLN yang tidak bisa diandalkan juga membuat industri manufaktur harus membangun sendiri pembangkit listriknya. Hal ini sudah terjadi di sejumlah pabrik garmen di Jawa Barat. Mereka membangun pembangkit berbahan bakar batubara antara 30-40 MW, tapi ada juga yang berskala kecil kapasitas 15 MW.

Membangun pembangkit sendiri memang salah satu jalan keluar terbaik agar terhindar dari pemadaman. Namun, bagi yang tidak mempunyai pembangkit sendiri, *byarpet* jelas akan merugikan.

Di Aceh dan Sumatera Utara, misalnya, kerugian sektor usaha akibat krisis listrik jika ditotal diperkirakan mencapai Rp 1 triliun per bulan. Kerugian Apindo dan Hoteliers masing-masing Rp 200 miliar. Belum termasuk usaha lain yang tak tergabung dalam Apindo. Badan Pusat Statistik menghitung jumlah usaha kecil menengah (UKM) di Sumut mencapai 1.047 juta lembaga. Jika, taruh saja, kerugian akibat *byarpet* sebesar Rp 100.000 per bulan per satu UKM, sudah terjadi kerugian lebih dari Rp 100 miliar.

Kerugian ini akan bertambah besar sebab pemadaman listrik bergilir diperkirakan akan terus berlangsung hingga tahun 2010 mendatang. Ini terjadi karena PLN mengalami defisit akibat tidak seimbang pasokan yang dimiliki PLN dengan permintaan masyarakat.

Saat ini, total daya pembangkit di seluruh Indonesia mencapai 29.705 MW, yang terdiri atas Jawa-Bali 22.302 MW, sedangkan luar Jawa-Bali 7.403 MW. Sebanyak 24.856 MW di antaranya merupakan milik PLN dengan komposisi Jawa-Bali 19.283 MW dan luar Jawa-Bali 5.573 MW. Sementara itu, sisanya milik swasta.



BELUM DILIRIK: Di Indonesia dengan iklim tropisnya, potensi angin di kawasan pesisir dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin.

Menurut Direktur Distribusi Jawa Bali PLN Murtaqi Syamsuddin, daya mampu PLN untuk memasok kebutuhan listrik Jawa-Bali saat ini sekitar 20.600 MW. Dengan beban puncak sebesar 16.200 MW per Maret 2009, margin pembangkit yang tersisa cuma 4.400 MW, atau sekitar 26-27%. Padahal margin kapasitas idealnya mesti di atas 30%. PLN memprediksi beban puncak akan semakin meningkat menjadi 17.200 MW pada akhir tahun ini. Artinya, jika tidak ada penambahan kapasitas yang cukup signifikan, cadangan listrik nasional akan semakin tergerus, dan pasokan listrik menjadi tidak seimbang.

Pemerintah memang sudah berupaya untuk mengatasi krisis pasokan listrik ini. Di antaranya dengan menghimbau masyarakat menghemat pemakaian listrik, mengurangi konsumsi listrik. Namun, himbuan ini kurang mendapat sambutan di masyarakat karena pemerintah dalam hal ini departemen dan instansi yang ada, justru boros dalam menggunakan listrik. Banyak gedung-gedung pemerintah yang lampu dan AC-nya masih menyala padahal sudah tidak ada orang. Kesadaran untuk hemat listrik itu masih lemah di kalangan aparat pemerintah.

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan menambah pasokan listrik lewat proyek pembangkit listrik 10.000 megawatt (MW) dengan dominasi pembangkit

Listrik



Di antaranya dengan membangun 500 desa mandiri energi (DME) pada tahun 2009. Target ini berusaha dicapai dengan memberdayakan semua potensi sumber energi lokal.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yugian-toro seusai memberi kuliah umum dengan topik "Tantangan Ekonomi Dunia dari Sudut Pandang Sumber Daya Mineral" di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sabtu (4/4), program pembangunan desa mandiri ini sudah berlangsung sejak 2008. Sejak tahun lalu sampai akhir 2009 nanti, ditargetkan terdapat 1.000 desa mandiri energi tersebar di seluruh Indonesia.

Sumber-sumber energi alternatif yang menjadi perhatian pemberdayaan antara lain biofuel, energi angin, energi surya, energi panas bumi, maupun mikrohidro. Pengembangan disesuaikan dengan potensi sumber energi yang terdapat di desa tersebut. Misalnya pembangkit listrik tenaga bayu/angin (PLTB/A) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dikembangkan di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali.

Dari sekian banyak sumber-sumber

memiliki kincir angin sejumlah 14.000 buah, dengan kapasitas listrik lebih dari 12.000 MW atau tiap tahunnya rata-rata tiap turbin dapat menghasilkan 31,5 Twh listrik per tahun. Kapasitas ini dapat memenuhi 5 % kebutuhan dalam negeri. Jerman menargetkan, penggunaan sumber energi yang dapat diperbarui mencapai 12,5 % pada 2010 dan bahkan 20% pada 2020.

Berdasarkan data dari WWEA (World Wind Energy Association), sampai dengan tahun 2007 perkiraan energi listrik yang dihasilkan oleh turbin angin mencapai 93,85 GigaWatts, menghasilkan lebih dari 1% dari total kelistrikan secara global. Amerika, Spanyol dan China merupakan negara terdepan dalam pemanfaatan energi angin. Diharapkan pada tahun 2010 total kapasitas pembangkit listrik tenaga angin secara global mencapai 170 GigaWatt.

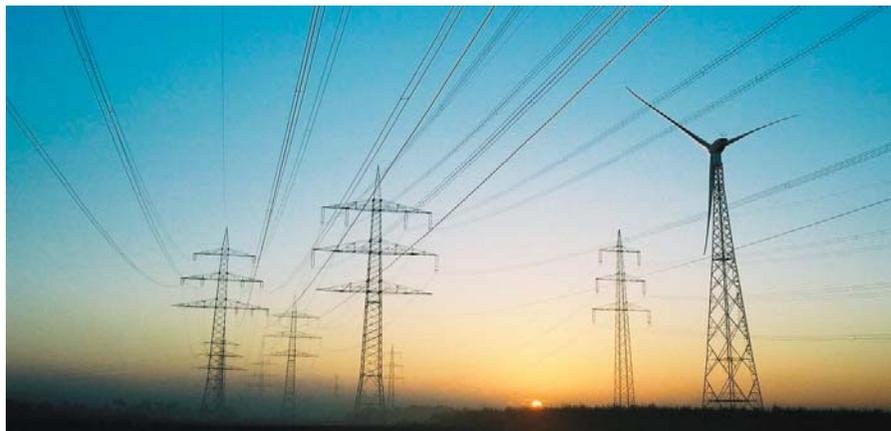
Di samping memasok listrik, industri tenaga angin juga dapat menyediakan lapangan pekerjaan baru baik dalam hal pembuatannya dan perawatannya. Seperti negara Jerman misalnya telah menjadikan industri tenaga angin sebagai sumber penghidupan masyarakat lebih dari 60.000 orang dengan penghasilan industri mencapai 4 miliar euro.

Di sisi lain, pemanfaatan energi angin sangat ideal sebab tidak menghasilkan polusi, nol bahan bakar, tidak menimbulkan efek rumah kaca, serta tak menghasilkan zat berbahaya dan sampah radioaktif. Setiap megawatt listrik yang dihasilkan kincir angin, mengurangi emisi 0,8 hingga 0,9 ton gas rumah kaca yang dihasilkan minyak dan batubara setiap tahunnya. Lahan yang diperlukan tidak terlalu luas. Bila daerah tersebut adalah daerah pertanian, tetap tidak akan mengganggu keberadaan dari daerah pertanian tersebut.

Di Indonesia dengan iklim tropisnya, potensi angin di kawasan pesisir dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin. Kini di Pulau Selayar tiga unit, Sulawesi Utara dua unit, dan Nusa Penida sembilan unit, serta Bangka Belitung satu unit. Tiap pembangkit berkapasitas masing-masing 80 kilowatt (kW), tiga unit lainnya berkapasitas 85 kilowatt (kW).

Diharapkan pemanfaatan energi angin ini dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Mengacu pada kebijakan energi nasional, pembangkit listrik tenaga angin ditargetkan mencapai 250 megawatt (MW) pada tahun 2025.

Indonesia sendiri telah mampu menguasai teknologi turbin atau kincir angin yang dibutuhkan dalam PLTB. Namun, pemahaman masyarakat akan penggunaan PLTB belum tersosialisasi dengan baik. ■ **LOR, BHS**



listrik berbahan bakar batubara (PLTU). Sejak 2006, sekitar 34 proyek PLTU yang tersebar di Pulau Jawa dan luar Jawa dicanangkan. Pengerjaan proyek ini tidak berjalan mulus karena komitmen pendanaan dari lembaga keuangan beberapa negara seperti Tiongkok mengalami renegotiasi akibat krisis ekonomi.

Di tengah keterbatasan itu, rencananya, tiga pembangkit dalam proyek 10 ribu MW tahap pertama akan masuk ke jaringan distribusi tahun ini, di antaranya PLTU Labuan, PLTU Rembang dan PLTU Indramayu. Sedangkan sekitar 31 pembangkit lainnya masih terkatung-katung menanti pencairan komitmen pendanaan. Kehadiran tiga pembangkit itu hanya mampu menambah ketersediaan cadangan hingga 30% sampai akhir tahun.

Selain mengandalkan pemerintah, masyarakat juga diajak untuk bisa menyediakan energi bagi kebutuhannya sendiri.

energi alternatif, pembangkit listrik tenaga angin sudah selayaknya mendapat perhatian serius dari masyarakat Indonesia. Pasalnya, energi angin sedang mendapatkan perhatian besar dari dunia karena sifatnya yang terbarukan dan ramah lingkungan. Selain itu, pemanfaatan energi angin merupakan pemanfaatan energi terbarukan yang paling berkembang saat ini.

Di Eropa sendiri dalam 20 tahun terakhir, pembangkit listrik tenaga angin mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di belahan Eropa Utara, Jerman dan Denmark telah menggunakan tenaga angin untuk membangkitkan, mendekati 20% kebutuhan energi listriknya.

Jerman kini merupakan negeri kincir angin utama dunia. Menurut data 2004, produksi kincir angin Jerman mencapai setengah dari produksi dunia, dengan kuota ekspor sebesar 59 %. Jerman



LALAI: Sedikitnya 100 orang meninggal, puluhan korban belum ditemukan serta ratusan gedung dan rumah menjadi korban meluapnya Situ Gintung

Musibah Karena Kea

Tragedi jebolnya Situ Gintung merupakan puncak dari kelalaian pihak-pihak yang terkait.

Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan bersahabat dengan kita, coba kita tanyakan pada rumput yang bergoyang.”

Demikian sepenggal lagu Ebiet G. Ade menggambarkan keadaan negeri kita yang sering dilanda bencana. Bencana yang sering melanda beberapa wilayah di Tanah Air, telah mengisyaratkan, ketidakbersabatan manusia dengan lingkungan. Dan sebagai konsumensinya manusia harus menanggung akibatnya.

Tragedi jebolnya Situ Gintung yang terjadi pada dini hari, Jumat (27/3) di Cirendeu, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten sempat menyita perhatian masyarakat. Selain memporak-porandakan pemukiman penduduk, sedikitnya 100 nyawa melayang dan sejumlah korban lainnya yang belum ditemukan. Sebanyak 250 bangunan rusak. Di antaranya 183 rumah dan selebihnya fasilitas umum mengakibatkan kerugian mencapai ratusan miliar.

Sebelum jebolnya situ Gintung, beredar isu yang mengatakan bahwa kalau warga sudah pernah melaporkan gejala tanggul jebol sejak tiga tahun lalu. Namun, hal itu ditampik Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten, Winarjono, “Memangnya warga melapor ke mana?” Dia bersikukuh, penyebab utama tanggul jebol karena tak mampu menampung volume air yang terus memenuhi waduk, terutama jika hujan deras turun

seperti yang terjadi pada sehari sebelum kejadian.

Walau awalnya ada kesan menutup-nutupi siapa yang bertanggungjawab atas kejadian ini, Kepala Departemen Penguatan Regional dan Juru Kampanye Air dan Pangan Walhi Eksekutif Nasional Erwin Usman kepada *Harian Suara Pembaruan* mengatakan, hasil investigasi sementara Walhi menunjukkan bahwa ada dugaan kuat kelalaian pemerintah provinsi dalam melakukan perawatan melekat terhadap Situ Gintung.

Menurutnya, jebolnya tanggul Situ Gintung, murni kealpaan pemerintah dalam menerapkan UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air, PP 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, dan UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Menurut Erwin, pada November 2008, tanggul pernah jebol. Saat itu warga yang melakukan perbaikan. Padahal, sejak dua tahun lalu sudah ada rapat koordinasi membahas masalah Situ Gintung, antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan departemen teknis terkait. Bahkan, terdapat dana APBN 2008 yang diperuntukkan bagi perawatan situ sebesar Rp 1,8 miliar.

Di sela kunjungan kerjanya ke Surabaya (30/3), Menteri PU Joko Kirmanto mengakui bahwa jebolnya tanggul Situ Gintung merupakan kesalahan dari pemerintah, khususnya dalam hal ini dilakukan oleh Departemen PU. “Untuk mencegah musibah sejenis di seluruh Indonesia, saya

sudah menginstruksikan bagi seluruh kepala dinas maupun departemen di bawah departemen PU langsung maupun tidak langsung untuk melakukan inventarisasi seluruh bendungan di Indonesia. Masing-masing kasatker harus bertanggungjawab mengontrol kekuatan tanggutanggul bendungan itu,” tandas Joko Kirmanto.

Beberapa pihak yang terkait berpendapat, jebolnya situ Gintung diakibatkan oleh berubahnya sebagian kawasan ini menjadi daerah pemukiman, lahan pertanian, dan pendangkalan yang menjadikan fungsi dari situ ini menjadi tidak maksimal. Dan itu terlihat dari kondisi situ dimana luas awal sekitar 31 hektar dengan kedalaman 10 meter, kini tinggal 21 hektar dengan kedalaman 3 sampai 4 meter. Sebagai pusat drainase wilayah Ciputat, pada curah hujan dengan intensitas tinggi, situ tidak mampu menahan volume air dalam situ. Hal ini dipertegas oleh Kepala Balai Besar Sungai Cisadane dan Cidurian Banten, Joko Suryanto. Situ Gintung yang memiliki kapasitas tampung sekitar 2 juta meter kubik, sudah tidak bisa menampung curahan air hujan yang intensitasnya akhir-akhir ini cukup tinggi.

Sementara itu, Ketua Tim Penyidik KLH yang turun ke lapangan, Sugeng Priyanto mengatakan, adanya indikasi pelanggaran tata ruang dan kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan situ Gintung. Dia mengatakan, telah terjadi kesalahan perhitungan atau perkiraan dampak dari segala aktivitas pembangunan di kawasan tersebut. Sugeng menambahkan, sebagai kawasan lindung, Situ Gintung memiliki beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh semua pihak.



limpaan

Peraturan Daerah Banten, khusus untuk kawasan situ harus steril dari pembangunan radius 50 meter dari tepi situ.

Pendapat senada juga disampaikan Kepala Pusat Penelitian Limnologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Gadis Heryani. Menurutnya ada tiga faktor yang bisa diteliti terkait dugaan kelalaian perawatan, yakni tujuan pembuatan situ yakni sebagai bendungan irigasi yang dalam perkembangannya berubah fungsi, kondisi perkembangan secara komprehensif, dan evaluasi. "Yang perlu dipertanyakan adalah setelah berubah fungsi, apakah ada evaluasi rutin mengenai kondisinya," ujar Gadis. Tampaknya, evaluasi terhadap Situ Gintung tidak dilakukan secara komprehensif.

Sementara itu kepada Republik, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Arief Wahyudi menyatakan, pihaknya meminta Polda Metro Jaya untuk mengusut tuntas kasus jebolnya tanggul Situ Gintung yang menewaskan ratusan jiwa. Ia meragukan jebolnya Situ Gintung itu merupakan musibah. "Saya tak yakin kalau kejadian ini murni musibah. Sebab, kasus jebolnya tanggul itu ada prolognya, seperti pemeliharaan yang tidak benar," katanya.

Diduga pengerukan lumpur dan pembangunan jogging track di sekitar Situ Gintung dituding menjadi penyebab jebolnya Situ Gintung. Pasalnya, debit air Situ Gintung setelah adanya jogging track, kian bertambah. Dari pengakuan Heru, warga kelurahan Pisangan, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan mengatakan, "Biasanya sebelum ada jogging track, air di Situ Gintung itu menggenang di area Pulau Situ Gintung. Itu terjadi jika air di Situ Gintung meluap," katanya. Namun

demikian, setelah ada pengerukan dan jogging track di wilayah sekitar Situ Gintung, air itu tidak pernah menggenang lagi. Ini disebabkan adanya tumpukan lumpur yang dikeruk dan dijadikan jogging track. "Seharusnya, sebelum jogging track itu dibangun, pihak Balai Besar Ciliwung (BBCC), Cisadane, memperbaiki tanggul Situ Gintung terlebih dahulu," kata dia.

Warga sudah melaporkan retaknya tanggul Situ Gintung ke Kelurahan Cireunde. Oleh pihak kelurahan melapor ke tingkat yang lebih tinggi yakni Dirjen Pemeliharaan dan Pengairan Departemen Pekerjaan Umum. "Bukan tanggul Situ yang diperbaiki, pemerintah malah membuat jogging track," kata Mulyadi (44) warga Kelurahan Cireunde. Selain tanggul yang retak, saluran air untuk irigasi yang berada di sebelah kiri Situ Gintung sudah tidak berfungsi sejak 1990-an, karena di bagian bawah aliran Situ Gintung sudah banyak dibangun perumahan mewah sehingga pembukaan aliran air tidak maksimal.

Mengenai adanya informasi, kemungkinan dihentikannya penyelidikan kasus jebolnya situ Gintung oleh Polda Metro Jaya, ketua tim advokasi korban Situ Gintung, Bery Nandian Forqan mengatakan pihaknya meminta Polda Metro Jaya untuk tidak menghentikan kasus Situ Gintung ini. Menurutnya penghentian itu sangat merugikan warga dan korban bencana. "Ia melanjutkan jebolnya tanggul Situ Gintung merupakan bukti kelalaian pemerintah terhadap aspek perawatan, aspek pemberian izin bangunan, dan aspek antisipasi bencana. Dan kewenangan itu ada pada pemerintah.

Akibat kerusakan yang ditimbulkan jebolnya situ Gintung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, pemerintah akan merehabilitasi tanggul Situ Gintung, sehingga bisa berfungsi seperti sedia kala. Sebagai konservasi dan melestarikan sumber - sumber air yang tersisa sebagai langkah pelestarian situ-situ. Pemerintah berjanji memberi ganti rugi berupa uang tunai senilai Rp 5 juta-Rp 30 juta untuk setiap bangunan dengan rincian ganti rugi untuk rusak ringan Rp 5 juta, rusak sedang Rp 15 juta, dan rusak berat Rp 30 juta.

Sedangkan upaya rehabilitasi Situ Gintung sedang dalam proses. Iwan Nursyirwan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum mengatakan, ada dua opsi rehabilitasi Situ Gintung. Pertama, membangun kembali bendungan Situ Gintung. Kedua, meniadakan bendungan dan memperlebar sungai sehingga air sungai langsung mengalir ke laut. "Dua opsi itu sedang disusun, lalu dimatangkan rencana teknis-

nya, baru ditawarkan kepada masyarakat setempat. Setelah masyarakat menandatangani pilihan, baru kami bangun," ujar Iwan.

Jika keberadaan dari situ tetap dipertahankan, konstruksi tanggul Situ Gintung harus dibangun selayaknya konstruksi bendungan yang benar. Volume air yang melimpah ruah telah memberikan tekanan besar pada tanggul situ. Konstruksi tanggul dari urugan tanah harus diganti dengan konstruksi urugan batu dan beton yang lebih kuat. Setelah tanggul diperkuat dengan konstruksi urugan batu beton, maka perlu dilakukan penanganan proses sedimentasi lumpur yang membuat dangkal kedalaman situ melalui pengerukan.

Perbaikan Situ Gintung harus memperhatikan karakteristik utama situ tersebut. Secara topografis, letak Situ Gintung lebih tinggi dari pemukiman penduduk dan sekelilingnya dipadati pemukiman penduduk. Kondisi ini mengharuskan adanya pengamanan terhadap lahan-lahan tepian situ (sempadan). Faktanya saat ini lahan-lahan sekeliling situ telah makin sesak dibangun manusia. Sehingga dalam usaha untuk menormalisasi situ dengan meng-hijaukan kawasan sempadan situ yang berfungsi untuk menahan limpahan air, warga di sekitar situ harus segera direlokasi karena akan mengganggu situ dan juga tidak aman untuk ditinggali.

Walaupun berada di Provinsi Banten, penanganan Situ Gintung merupakan wewenang pemerintah pusat. Revitalisasi Situ Gintung pada tahun 2008 juga dilakukan pemerintah pusat. Dana revitalisasi sebesar Rp 1,5 miliar yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pun diserahkan kepada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane sebagai pelaksana revitalisasi, bukan Pemerintah Provinsi Banten.

Pemprov Banten sendiri tidak mengalokasikan anggaran perawatan karena bukan wewenang mereka. "Ini tanggung jawab bersama sesuai dengan MOU tiga gubernur dengan beberapa bupati/wali kota dan beberapa menteri tahun 2004. Tetapi yang memiliki wewenang untuk menanganinya adalah pemerintah pusat," ujar Winarjono Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman (DSDAP) Banten.

Diperkirakan dana yang dibutuhkan untuk perbaikan situ Gintung sekitar Rp 200 miliar. Kepada *Kompas*. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum Iwan Nursyirwan menegaskan, perbaikan tanggul Situ Gintung akan menggunakan dana dari APBN tahun 2009. Dan akan ditangani oleh dinas PU (Pekerjaan Umum), walaupun melibatkan para ahli dari Jepang dalam hal bertukar pikiran.

■ BHS, RIE

UN untuk Masa Depan

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan ujian nasional (UN) Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat 20-24 April lalu dilaksanakan di tengah riuhnya perpolitikan negara dalam rangka penghitungan suara pasca-pemilu legislatif 9 April 2009. Sementara UN tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah dasar (SD) sederajat diselenggarakan Mei 2009, di tengah suhu politik yang sedang memanas menjelang pemilihan presiden 8 Juli 2009.

Tapi di tengah suasana demikian, polemik atas kebijakan UN ini masih tetap terjadi antara pihak yang pro dan kontra. UN memang sangat vital buat pelajar maupun sekolah. Kelulusan UN merupakan salah satu penentu masa depan pelajar. Sementara bagi sekolah, persentase kelulusan siswa merupakan tolok ukur keberhasilan sekolah tersebut dalam mendidik. Dengan motivasi itu, pelaksanaan UN tahun ini juga masih tetap diwarnai beberapa kecurangan seperti keboboran soal. Tidak jauh seperti tahun sebelumnya, rata-rata kecurangan tersebut dilakukan secara kolektif dan terencana. Sekadar contoh, di Kabupaten Bengkulu Selatan, 16 orang kepala sekolah diberitakan diperiksa kepolisian karena terlibat dalam kasus kecurangan.

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, UN sudah diselenggarakan. Tentu tidak bijaksana jika berlarut-larut dalam polemik setuju atau tidak setuju dan jujur atau tidak jujur. Membicarakan UN sekarang ini adalah lebih baik membicarakan bagaimana membuat UN tahun ini sebagai pembelajaran untuk menghadapi ujian tahun depan.

Seperti diketahui, sejak diberlakukannya UN, grafik standar kelulusan ada perubahan walaupun berfluktuatif setiap tahunnya. Dimana standar kelulusan pada tahun 2002 (3,01), 2003 (3,01), 2004 (4,01), 2005 (4,01), 2006 (4,50), 2007 (5,00), 2008 (5,25), dan tahun 2009 sebesar 5,50. Khusus untuk tahun ini, standar ini mengartikan bahwa hasil UN harus memiliki nilai rata-rata minimal 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan nilai minimal 4,00 untuk

Dalam menghadapi ujian nasional, sesungguhnya adalah lebih bijaksana jika pelajarlah yang dipersiapkan sebelumnya.

paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya. Sedangkan untuk SMK, nilai uji kompetensi keahlian minimum 7,00 dengan nilai teori kejuruan minimum 5. Nilai uji kompetensi keahlian digunakan untuk menghitung nilai rata-rata UN.

Tujuan menaikkan standar kelulusan itu setiap tahunnya, yakni untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia,

terus dinaikkan hingga mendekati standar kelulusan seperti yang berlaku di dunia internasional. Oleh karena itu, ke depan, sesungguhnya adalah lebih bijaksana jika pelajarlah yang dipersiapkan mengikuti ujian sehingga mereka berhasil melewati batas kelulusan minimal yang ditetapkan Depdiknas, sebagai langkah awal untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi.

Namun di luar polemik setuju atau tidak setuju, pendapat yang mengusulkan agar UN dibuat sebagai salah satu metode evaluasi pembelajaran di samping metode pembelajaran yang lain, kiranya perlu dipertimbangkan dan diskusi lebih lanjut. Sebagaimana pendapat pengamat pendidikan Arif Rachman, hak guru dan sekolah

untuk mengevaluasi dan menentukan kelulusan siswa hendaknya tetap diberikan. Satu contoh, jika ada siswa memperoleh nilai kurang nol koma sekian dari standar kelulusan UN, padahal selama tiga tahun siswa itu berprestasi baik, guru atau sekolah sebaiknya punya hak meluluskannya.

Di samping topik tersebut, wacana membuat hasil UN SMA sederajat menjadi syarat masuk perguruan tinggi negeri juga perlu didiskusikan lebih lanjut. Sebab menurut pendapat beberapa pihak, jika hal itu dilaksanakan, berarti ada kerancuan berpikir tentang makna evaluasi. Sebab, seleksi masuk perguruan

tinggi memiliki maksud dan tujuan yang berbeda dengan UN.

UN merupakan tes untuk mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran, sementara tes masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi merupakan tes untuk mengukur kemampuan calon menjalani proses pendidikan. Jadi usaha untuk menggabungkan keduanya dianggap tidak lagi berangkat dari makna dan jati diri tes, tetapi bagian dari upaya pemenangan perang atas nama kekuasaan. Lebih lanjut disebutkan, mempertemukan kedua tes dalam satu paket akan mengabaikan karakter dan prinsip pendidikan yang selama ini berfokus pada anak didik sebagai objek.

Semoga dengan pelaksanaan UN tahun ini, kita semakin bijaksana dan anak didik semakin giat belajar. ■ **RB**



MAKIN TINGGI: Hasil UN harus memiliki nilai rata-rata minimal 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan

sejauh ini masih mendapat pembenaran. Terbukti, seperti dikatakan Kepala Pusat Penelitian Pendidikan (Puspendik) Depdiknas Burhanudin Tolla pertengahan April lalu, langkah peningkatan standar kelulusan UN ini berdasarkan hasil evaluasi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) pada 2004 rata-rata nilai UN hanya 5,5. Namun pada 2008 lalu hasilnya meningkat drastis menjadi 7,3. "Jadi terbukti bahwa UN mampu meningkatkan prestasi belajar siswa. Semangat guru mengajar juga meningkat," katanya.

Memperhatikan fluktuasi perubahan standar kelulusan yang terus dinaikkan setiap tahun itu, diyakini, seperti yang memang sudah pernah diwacanakan pejabat Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) sebelumnya, tahun depan juga diperkirakan standar kelulusan akan

Terdepan Dalam Liputan Pemilu

Dengan konsep politainment yang diluncurkan tvOne, kini masyarakat awam pun disugahi beragam informasi politik yang tidak lagi membosankan.

Momen bersejarah yang dilalui bangsa Indonesia 9 April 2009 menjadi momen pembuktian bagi stasiun-stasiun televisi nasional. Mereka berlomba menjadi yang terdepan dalam menyajikan informasi-informasi seputar pemilu. Beragam format acara dibuat untuk memuaskan dahaga pemirsa yang penasaran dan tak sabar menanti kabar terkini dari tiap perkembangan politik.

Tepat di hari H pemilu, 9 April lalu, TvOne hadir sehari penuh menyebarluaskan informasi seputar pelaksanaan pemilu. Mulai dari segala persiapan yang dilakukan sebelum pemilu, kampanye para partai politik, pelaksanaan pemilu, hasil pemungutan suara, dan kasus-kasus yang berkembang pascaperhitungan suara. Studio utama di Jakarta dan tiga biro lain (Medan, Surabaya, Makassar) secara bergantian menyiarkan liputan langsung dari berbagai tempat di seluruh Indonesia.

Dari sekian banyak stasiun televisi, tvOne berhasil mengambil hati pemirsa karena menyajikan berita-berita seputar pemilu dengan menarik dan cerdas. Dengan format acara yang beragam yang didukung dengan kecanggihan teknologi, tvOne untuk sejenak seolah berubah wajah mirip CNN, stasiun televisi berita terkenal dunia.

Meski layar kaca dipenuhi dengan angka-angka, namun berkat tata studio yang apik plus olah visual yang menampilkan statistik dengan modern, membuat tvOne lebih menonjol dibanding stasiun tv lainnya. Bahkan Metro TV yang lebih dulu dikenal sebagai stasiun televisi berformat news terlihat redup dibandingkan gebrakan tvOne.

"Rasanya tak bosan-bosan duduk di depan televisi satu hari ini. Ada saja perkembangan terbaru yang dilaporkan dari pelosok negeri," ujar Agustian, salah seorang penikmat tvOne. Lelaki yang sehari-harinya pekerja swasta di Jakarta ini memanfaatkan waktu liburanya dengan menonton tvOne demi memuaskan rasa penasarannya akan informasi seputar pemilu.

Menurut pengamatan *Berita Indonesia*, tvOne berhasil menghadirkan konsep berita dengan sudut pandang berbeda bagi pemirsanya yakni memadukan konsep berita politik dan entertainment. Konsep

yang memang sudah dipersiapkan dengan matang oleh tvOne. "Kami menyebutnya dengan istilah politainment," kata Wakil Pemimpin Redaksi tvOne, saat jumpa pers di Jakarta, Senin (6/4).

Salah satu bentuk *entertainment* yang disuguhkan adalah kehadiran grup musik Cokelat yang menyanyikan lagu 5 Menit untuk 5 Tahun pada program acara Jelang Pemilu Indonesia dan Jelang Pemilu Indonesia Satu untuk Negeri. Tampilnya grup musik ini di layar tvOne bertujuan untuk menyosialisasikan pemilu dan mengajak pemirsa televisi untuk menggunakan hak suaranya saat pemilu.

Untuk memperkuat sajian berita seputar pemilu, tvOne bekerja sama dengan

Tidak Seperti yang Dulu

Anda tentu masih ingat dengan stasiun televisi bernama Lativi. Sebelum berubah menjadi tvOne pertengahan Februari tahun lalu, Lativi dikenal dengan tayangan horor, berdarah, dan seks. Namun setelah pemilik lama yakni bekas Menteri Tenaga Kerja Abdul Latief melepas kepemilikannya ke tangan Erick Thohir (Grup Mahaka) dalam konsorsium bersama dua pengusaha muda, Anindya Bakrie (Grup Bakrie) dan Rosan Perkasa Roeslani (Presiden Direktur Recapital), tvOne bertekad menghilangkan citra 'buruk' tersebut.

Kini tekad itu sudah dibuktikan. Siaran tvOne didominasi tayangan informatif, dengan mengandalkan 70 persen porsi pemberitaan, 30 persen berita olahraga dan hiburan yang terseleksi.

TvOne berupaya membangun citra lewat program diskusi ringan dengan topik-topik terhangat bersama para narasumber dan masyarakat yang diberi

The screenshot shows the tvOne website interface. At the top, there's a banner that says "KEEP YOUR LIGHTS ON!" with a URL. Below that is the tvOne logo and "news+sports". To the right is a "TV PEMILU" banner with a cartoon character and the text "Kami Kabarkan Anda Putuskan". A navigation bar includes "Beranda", "Kabar tvOne", "Program", "Jadwal Acara", "tvOne", "Siaran Pers", "RSS Feed", and "Pemilu 2009". Below the navigation bar is a "Kabar Terkini" section with links to "Politik", "Bisnis", "Nasional", "Internasional", "Jabodetabek", "Olahraga", "Nusantara", "Hukum", "Sosial Budaya", and "Pendidikan". A "Newsticker: tvOne Ticker" section is visible. The main content area is divided into "Kabar tvOne" and "Kabar Terkini" columns. The "Kabar tvOne" column lists news items like "Partai Golkar Menolak Didikte" and "Polisi Sita Jutaan Rupiah Uang Palsu Di Surabaya". The "Kabar Terkini" column features "Kabar Politik" articles, including one about PAN candidates and another about Golkar's situation. A "DOWNLOAD tvOne Desktop Ticker" button is present. On the right, there's a "Cari Data:" search box and a "PLAY TV STREAMING" section with a grid of video thumbnails for various news programs like "Kabar Petang", "Kabar Siang", and "Kabar Malam".

Siaran tvOne mengandalkan 70 persen pemberitaan, 30 persen berita olahraga dan hiburan

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dalam perhitungan cepat (*quick count*) yang dapat disaksikan langsung secara nasional. Tak hanya dengan LSI, kerja sama pun dijalin dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam melihat kasus-kasus yang berkembang setelah pemungutan suara. Kontrak kerja sama eksklusif ini ditandatangani demi kelancaran akses dalam peliputan berita di 33 provinsi di Indonesia. Berita-berita pemilu juga didukung oleh program Kabar Pagi, Apa Kabar Indonesia, Kabar Siang, Kabar Petang, Apa Kabar Indonesia Malam, dan Kabar Terkini.

nama Apa Kabar Indonesia. Program ini disiarkan secara langsung pada pagi hari dari studio luar tvOne.

Kemasan yang berbeda juga disuguhkan oleh Kabar Petang yang menghadirkan secara langsung berita-berita dari Biro Pusat Jakarta dan Biro-biro Daerah (Medan, Surabaya, Makassar) dengan bobot pemberitaan yang berimbang antar semua Biro. Karena keunikannya, program ini pernah meraih penghargaan MURI (Museum Rekor Indonesia) sebagai "Tayangan Berita yang Dibacakan Langsung Oleh 5 Presenter dari 4 Kota yang Berbeda Dalam Satu Layar". ■ ROY

DPT, Potret Kesalahan

Tanggung jawab validasi pemilih ada pada KPU. Namun anggota KPU itu dipilih oleh DPR yang secara praktis merupakan produk kesepakatan parpol-parpol di DPR.

Akibat kesemrautan daftar pemilih, apa yang sebelumnya ditakutkan dari pelaksanaan Pemilu 2009 akhirnya terjadi juga. Sebagian partai politik (parpol) peserta pemilu tidak menerima hasil pemilu legislatif (pileg) 9 April 2009 lalu. Protes malah sudah mengalir sejak sebelum pemilu dilaksanakan dan semakin mengerucut pada pertengahan April kemarin dimana puluhan tokoh parpol hadir di kediaman Ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar. Ketika itu, mereka meneguhkan tekad untuk menggugat hasil pemilu. Mereka juga sepakat menyatakan sebuah pernyataan politik bahwa Pemilu 2009 adalah pemilu terburuk sejak reformasi.

Berbagai kelemahan memang terjadi dalam pelaksanaan pileg tersebut, namun yang paling menyolok sehingga paling mendapat protes adalah kesemrautan daftar pemilih tetap (DPT). Di satu kasus, pemilu kali ini terkesan menderita penyakit 'obesitas' atau kegemukan. Di beberapa tempat terdapat penggelembungan daftar pemilih di mana banyak terdaftar pemilih yang tidak layak seperti masih di bawah umur, terdaftar di dua tempat, bahkan ada yang sudah meninggal.

Sebaliknya, banyak warga yang tidak bisa memilih karena tidak terdaftar dalam DPT. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) misalnya, mencatat jumlah warga yang masuk kelompok ini mencapai 45 juta orang. Hal ini membuat pemilu kali ini juga mencatatkan golongan putih (golput) atau golongan yang tidak memilih cukup tinggi. Saking tingginya, beberapa survei menyimpulkan, pileg kali ini dimenangkan oleh golput.

Dikatakan demikian, karena golput yang terdiri dari mereka yang tidak memilih karena namanya tidak terdaftar di DPT atau golput administratif dan mereka yang memutuskan tidak memilih walaupun namanya terdaftar di DPT diperkirakan mencapai 25-28 persen, lebih tinggi dari perolehan Partai Demokrat yang menjadi pemenang pemilu 2009 ini.

Bahkan beberapa lembaga mencatat, lebih dari 30 persen pemilih tidak menggunakan hak pilihnya pada 9 April kemarin. Beberapa partai, di antaranya PDIP

mengklaim banyak kader dan simpatisannya tidak dapat memilih karena tidak tercantum dalam DPT.

Kenapa terjadi dan siapa yang bertanggung jawab atas kesemrautan itu menjadi polemik belakangan ini. Polemik yang mengarah pada keributan itu terus berlanjut hingga menjelang pemilihan presiden/wakil presiden. Beberapa pihak menduga ada rekayasa di balik kasus ini. Menurut mereka, ada kemungkinan masalah itu sengaja dibiarkan atau bahkan diciptakan dengan maksud agar warga pendukung partai tertentu tidak bisa memilih. Secara tersembunyi, tuduhan itu ditujukan kepada pihak yang memenangkan pemilu.

Tapi sebagian besar pihak yang memprotes kesemrautan daftar pemilih legislatif kali ini sependapat, bahwa terlepas dari ada tidaknya unsur rekayasa atau hanya keteledoran, tapi harus ada yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Karena itu, permintaan tanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dan pemerintah sebagai penyedia data pun terus berdatangan dari berbagai pihak. Sebagian bahkan berencana membawa kasus ini ke ranah hukum.

Beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Persatuan Badan Hukum Indonesia, dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengultimatum KPU agar menerbitkan kebijakan pemilu legislatif susulan untuk mengakomodir hak masyarakat yang tidak terdaftar di DPT.

Tuding menuding antara parpol, pemerintah, KPU, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai siapa yang bersalah dan bertanggung jawab atas kesalahan DPT itu pun terus bergulir mengiringi jadwal pemilihan presiden yang juga semakin dekat. Partai-partai politik yang protes berpendapat, KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pemerintah sebagai penyedia data, bersalah dan bertanggung jawab atas masalah itu.

Sementara pemerintah berpendapat, KPU-lah yang bertanggung jawab atas kesalahan itu karena komisi itu independen dalam melaksanakan tugasnya menetapkan DPT, sedangkan pemerintah hanya membantu menyediakan data



penduduk.

Tidak mau hanya dirinya sendiri yang dipersalahkan, KPU malah menyatakan bahwa partai politik, Bawaslu, bahkan masyarakat pemilih juga punya andil atas terjadinya kesalahan itu, sebab tidak memberikan pengawasan penetapan DPT yakni memberikan komentar saat daftar pemilih sementara (DPS) diumumkan. Dengan pernyataan itu, KPU seakan ingin mengatakan bahwa Parpol, Bawaslu, dan masyarakat juga harus bertanggung jawab atas kesemrautan DPT tersebut.

Khusus kepada Bawaslu, KPU mengatakan, jika Panwaslu dan Bawaslu menemukan hal-hal yang menyimpang, seperti masyarakat tidak terdaftar, mereka bisa memberikan rekomendasi kepada KPU. KPU pun wajib menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Tapi yang kemarin terjadi, dikatakan, KPU tidak mendapat rekomendasi dari Bawaslu atau Panwaslu terkait dengan adanya masyarakat yang tidak terdaftar.

Jika menyimak mekanisme penyusunan DPT pemilihan legislatif sejak persiapan data hingga penetapan, memakan waktu dan prosedur yang panjang. Sebenarnya ada beberapa kali kesempatan untuk meminimalisir kesalahan, namun karena tidak terlaksana dengan benar, kesalahan seperti sekarang pun terjadi.

an Kolektif



KECEWA: *Puluhan tokoh parpol sepakat menyatakan Pemilu 2009 merupakan pemilu terburuk pascareformasi*

Seperti diketahui, daftar pemilih yang ditetapkan KPU diawali dari penyusunan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang data bakunya diterima KPU dari pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri. Data kependudukan itu sudah diterima KPU dari pemerintah setahun sebelum pemilu 2009 yakni 5 April 2008.

Data DP4 inilah kemudian yang akan dimutakhirkan menjadi daftar pemilih sementara (DPS). Sejak proses ini, gejala kesemrautan sudah terlihat di tubuh KPU. Ketika itu petugas pemutakhiran terlambat dibentuk. Anggarannya juga terlambat cair dari pemerintah.

Pada tanggal 8 Agustus, DPS akhirnya diumumkan KPU. Guna perbaikan daftar, melalui tahap ini mendapat dari masyarakat maupun parpol, dan khususnya Panwaslu sangat diharapkan atas kekurangan dan kesalahan daftar tersebut. Tapi karena minimnya sosialisasi KPU yang diakibatkan kecilnya dana sosialisasi dan terlambat cair pula, hanya sedikit warga yang memeriksa daftar tersebut, bahkan kebanyakan warga tidak tahu adanya proses itu. Perhatian partai juga

sangat kurang.

Kira-kira sebulan setelah pengumuman DPS, berbagai rekomendasi atas kekurangan DPS itu kemudian diperbaiki. DPS hasil perbaikan itu kembali diumumkan pada September 2008. Pada tahap ini, koreksi dari berbagai pihak juga sangat diharapkan. Tapi, akibat kurangnya sosialisasi, masyarakat yang mencek daftar juga sangat kurang.

Terkesan hanya mau menunjukkan bahwa jadwal yang sudah mereka tetapkan bisa terlaksana dengan tepat, pada 24 Oktober 2008, daftar pemilih tetap (DPT) minus Papua Barat dan luar negeri diumumkan. Sejak saat itu, protes mulai mengalir ke KPU.

Kemudian setelah DPT dari Papua Barat dan luar negeri diperoleh, pengumuman DPT kembali diulang pada tanggal 24 November 2008. Pada saat itu, protes semakin deras ke KPU.

Menyadari adanya kekeliruan mencolok di DPT tersebut, Presiden pun mengeluarkan Perpu No. 1/2009 untuk memberi kesempatan memutakhirkan datanya. DPT hasil pemutakhiran itu diumumkan pada 7 Maret 2009.

Seperti disebutkan di atas, beberapa tahapan di atas sebenarnya memberi kesempatan kepada KPU untuk memperbaiki DPT. Kalau ada keinginan dan keseriusan KPU, waktu untuk merevisinya

pun cukup banyak.

Dana untuk pengumpulan data pemilih tahun 2009 ini tidaklah sedikit. Tapi kenyataannya, hasilnya sangat tidak memuaskan. Maka untuk menjawab berbagai kritik dan prasangka buruk mengenai persoalan ini, KPU diharapkan segera menjelaskan semua persoalan dengan jujur, termasuk berbagai masalah penyelenggaraan pemilu lainnya. Gaya KPU yang selalu menyatakan semua beres seperti selama ini sebaiknya segera ditinggalkan. Sebab kalau tidak, hasil pileg 9 April lalu tidak akan mendapat legitimasi yang kuat dan mengancam perjalanan bangsa ini lima tahun ke depan. Ketidakpercayaan masyarakat pada proses pemilu akan menurunkan tingkat legitimasi parlemen.

Kepada para petinggi dan politisi negeri ini, perlu diingatkan, tuding menuding tidak akan menyelesaikan masalah. Kini yang diperlukan dalam penanganan kasus ini adalah sebuah langkah konkrit semacam uji validitas data untuk membuktikan bahwa data KPU adalah sah. Untuk menghadirkan itu, sebaiknya protes dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Kepada KPU, perlu diingatkan bahwa pekerjaan dan tanggung jawabnya belum berakhir. Pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) 8 Juli sudah di depan mata, proses penyusunan daftar pemilih pun sedang dilaksanakan. Diketahui, DPT pileg akan langsung menjadi DPS pilpres. Pemutakhiran DPS pilpres dilakukan sejak tanggal 10 April hingga 10 Mei. DPS diumumkan dan masyarakat diberi kesempatan untuk memberi tanggapan mulai tanggal 11 Mei sampai 17 Mei. Kemudian pengumuman DPT Pilpres dijadwalkan akan dilakukan antara 28 sampai 31 Mei 2009.

Oleh sebab itu, KPU diharapkan belajar dari pengalamannya sendiri. Pengalaman kegagalannya dalam penyusunan DPT pileg yang baru saja terjadi, hendaknya tidak terulang lagi pada pilpres. Untuk mengantisipasi terulangnya masalah DPT pileg kemarin, beberapa metode dalam pilpres tidak lagi menggunakan metode-metode dalam pileg kemarin.

Salah satunya, dalam penyusunan daftar pemilih, basis Kartu Tanda Penduduk seperti pada pileg diubah jadi basis domisili. Selain menggunakan basis domisili, KPU juga akan membuka posko pengaduan daftar pemilih hingga tingkat desa. Pembentukan posko ini diharapkan dapat memberi kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengadu jika nama mereka belum tercatat sebagai pemilih.

Semoga dengan pembenahan yang dilakukan, proses pilpres akan terlaksana dengan baik. ■ JK

Carut Marut Pemilu 2009

Pelaksanaan pemilihan umum 2009 menorehkan banyak kekurangan. Berbagai pelanggaran peserta pemilu maupun kelalaian KPU menjadi noda hitam pemilu kali ini.

Pemilihan anggota legislatif 9 April 2009 telah usai dilaksanakan. Sebanyak 11.219 orang calon memperebutkan 560 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), 1.109 orang calon untuk memperebutkan 132 kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 32.263 orang calon memperebutkan 1.198 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Tk I) di seluruh Indonesia, dan 246.588 calon untuk memperebutkan 16.270 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotamadya (DPRD Tk II).

Dari segi keamanan, pelaksanaan pemilu legislatif ini tergolong berhasil karena berlangsung tertib dan aman. Namun dari segi teknis pelaksanaan, pemilu kali ini menurun dibanding Pemilu 2004 yang sukses menyelenggarakan pemilihan langsung untuk pertama kalinya.

Berbagai kekurangan dan kelemahan sudah nampak sebelum pelaksanaan pemilu 9 April lalu. Kekurangan dimaksud berupa pelanggaran partai politik (parpol) maupun calon legislatif (caleg) seperti kampanye terselubung, ukuran atribut partai dan penempatan gambar caleg yang menyalahi aturan, pelibatan anak-anak dan PNS dalam kampanye, hingga praktik politik uang. Pelanggaran terjadi hampir merata di semua daerah dan oleh hampir semua partai peserta pemilu.

Dari sekian banyak kekurangan itu, noda yang paling menonjol adalah kekurangan yang diakibatkan kelemahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara. Salah satu yang paling mendapat protes adalah masalah daftar pemilih tetap (DPT).

Seperti ditemukan di berbagai daerah pemilihan, banyak ditemukan penyimpangan dalam daftar pemilih tetap berupa banyak warga yang tidak masuk DPT, sebaliknya ada pemilih ganda, pemilih di bawah umur, dan pemilih misterius. Penyimpangan ini sebenarnya sudah

diketahui beberapa saat sebelum pemilu. Sebagai contoh, di Kota Solo, Jawa Tengah misalnya, dua hari menjelang pelaksanaan pemilu (H-2), penyimpangan DPT sudah diketahui yakni berupa 1.841 pemilih ganda, 5.346 pemilih tanpa nomor induk kependudukan (NIK), 193 orang dengan data tempat dan tanggal lahir tidak lengkap, 179 pemilih di bawah umur, 169 orang meninggal dunia, dan 2 orang TNI/Polri. Panwaslu Sumatera Barat juga menemukan 10 nama anggota TNI/Polri dalam DPT. Demikian juga di beberapa daerah lainnya. Namun, kelihatannya tidak ada keseriusan KPU untuk memperbaikinya.

Yang paling menyolok lagi, di suatu daerah pemilihan di Sulawesi sebelumnya sempat ditemukan DPT dengan jumlah pemilih ratusan orang dalam satu keluarga. Bahkan di Jawa Tengah, orang yang beberapa waktu silam telah dieksekusi mati masih tercantum dalam DPT.

Di Jabodetabek yang begitu dekat dengan jangkauan KPU pusat dan pemerintah pusat saja, juga tidak jauh berbeda. Di daerah ini, banyak warga yang tidak bisa ikut memilih karena namanya tidak masuk DPT. Sebaliknya, banyak pemilih yang tidak diketahui mana orangnya. Ada pula warga yang terdaftar di dua TPS.

Mengenai DPT yang berlebih, sebelum pemilu 9 April lalu, Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Surya Paloh sudah mengatakan kasus itu cukup berbahaya. Disebutkan, lebih berbahaya lagi jika hal itu adalah kesengajaan. "Ini bisa memunculkan suasana *chaos* dan ini berbahaya, tetapi mudah-mudahan ini tak benar," katanya. Sedangkan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kasus tersebut, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, selain KPU, Departemen Dalam Negeri juga tidak bisa lepas tanggung jawab.

Masih prapemungutan suara 9 April, diberitakan, dugaan adanya rekayasa



MEMALUKAN: Keterlambatan logistik, kertas suara tertukar, DPT yang amburadul, lambatnya penghitungan suara mewarnai pemilihan legislatif 2009

sistemik terhadap DPT mulai terungkap. Tim Pemilu Jurdil Badan Pemenangan Presiden PDI-P mendapatkan salinan pembicaraan lewat SMS sejumlah tokoh yang mengindikasikan adanya rencana manipulasi DPT pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur. Model serupa juga ditengarai telah diterapkan pada pemilu legislatif. Temuan itu disampaikan tim yang terdiri dari Hastu Kristiyanto, didampingi Gayus Lumbuun anggota DPR dari PDI-P, dan Wakil Sekjen DPP PDI-P Agneta Singadekane, 7 April lalu. Namun hingga berita ini diturunkan, kejelasan penemuan itu belum diperoleh.

Memang untuk mengantisipasi tidak adanya pemilih selundupan yang diduga dimasukkan ke DPT, Ketua KPU Hafiz Anshary (7/4) sebelumnya sudah memerintahkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar menolak



pemilih yang terdaftar di DPT tetapi tidak dikenal (pemilih selundupan). Namun karena hanya bersifat himbauan, sehingga diragukan bisa terlaksana secara ketat di lapangan.

Selain masalah DPT, keterlambatan pengiriman logistik ke beberapa daerah juga menjadi nilai merah pemilu 2009. Pernyataan Ketua KPU Abdul Hafiz Ansyari (6/4) yang mengatakan seluruh perangkat pemilu telah siap untuk terlaksananya pemilu sesuai jadwal, dimana 171 juta masyarakat telah terdaftar sebagai pemilih, 700 juta surat suara telah terdistribusi, 2,1 juta bilik suara, dan 519 ribu tempat pemungutan suara (TPS) telah selesai, ternyata tidak seluruhnya benar. Di berbagai daerah, beberapa logistik hingga hari H ternyata belum sampai.

Keterlambatan logistik ini memang sebelumnya sudah dikhawatirkan beberapa pihak. Bahkan Pokja Pemantau Penyelenggara Pemilu (P4) seperti dikatakan juru bicaranya, Sebastian Salang di Kantor KPU, Jumat (3/4) lalu, mengata-

kan, Pemilu 2009 dalam keadaan darurat. Selain berbagai masalah di atas, kurangnya partisipasi masyarakat juga mewarnai pemilu kali ini. Hal ini diyakini akibat kurangnya sosialisasi dari KPU.

Beberapa hal disebutkan di atas masih sebagian dari berbagai kelemahan yang terjadi sebelum pelaksanaan pemilu legislatif April 2009. Cacat atau noda yang sama banyaknya juga terjadi pada saat pemilihan dan penghitungan suara. Seperti dilaporkan Badan Pengawas Pemilu (13/4) lalu, sedikitnya 963 pelanggaran ditemukan di 33 provinsi pada saat pemilihan dan penghitungan suara pemilu legislatif lalu.

Koordinator Pengawasan Bawaslu Wahidah Suaib Wittoeng menyebutkan, ke-963 pelanggaran itu terdiri dari 619 kasus berupa pelanggaran administrasi, 138 kasus pidana, dan 206 kasus berupa pelanggaran lainnya. "Pelanggaran administrasi paling banyak ditemukan adalah kasus tertukarnya surat suara antar daerah pemilihan sehingga harus dilakukan pemilihan lanjutan. Pelanggaran berikutnya adalah kasus kekurangan logistik pemilu, perhitungan suara tidak selesai pada tanggal dan hari yang sama, pemilih tidak terdaftar di DPT tapi dapat memberi suara, dan petugas KPPS tidak mengumumkan dan tidak menempelkan DPT dan DCT caleg.

Untuk pelanggaran pidana, kasusnya didominasi kasus politik uang, pemilih memberi suara lebih dari satu kali, sengaja mengaku diri sebagai orang lain, KPPS tidak menjaga/mengamankan kotak suara, dan intimidasi kepada pemilih. Sedangkan pelanggaran dalam bentuk lainnya yakni berupa adanya konflik kekerasan. Juga adanya nama yang terdaftar di daftar pemilih sementara (DPS) tapi tidak terdaftar di DPT.

Di Sumatera Utara misalnya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Sumatera Utara menemukan sedikitnya tujuh kepala daerah memobilisasi aparat pemerintahannya untuk memenangkan caleg dan parpol tertentu. Menurut Ketua Panwaslu Sumut Ikhwaluddin Simatupang, ketujuh kepala daerah berasal dari Kota Pematang Siantar, Binjai, Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Asahan, Serdang Bedagai, dan Labuhan Batu.

Menurut Ikhwaluddin, sebagaimana diberitakan *Kompas* (12/4), di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Pematang Siantar Panwaslu menemukan bukti rekaman kepala desa dan camat yang dengan sengaja menyerukan masyarakat memilih Partai Demokrat.

Sementara di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Panwaslu menilai pemilu lanjutan yang diselenggarakan KPU Banyumas di salah satu TPS di Desa Kedungwaringin, Kecamatan Jatilawang,

telah menyalahi aturan KPU, sebab KPU Banyumas tidak meminta persetujuan pimpinan parpol ataupun Panwaslu Banyumas, seperti yang diatur dalam Surat Edaran KPU Nomor 684 Tahun 2009 yang diterbitkan 10 April lalu.

Sedangkan di Sidoarjo, Jawa Timur perwakilan partai politik yang ada di Sidoarjo, Minggu (12/4) sempat meminta penundaan penghitungan suara karena menemukan banyak segel kotak suara yang bermasalah.

Lain lagi dengan kejadian di Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara. Diberitakan, di beberapa TPS terpisah di daerah ini ditemukan setidaknya 54 surat suara yang telah dicontreng sebelumnya pada salah satu nama caleg dan partai tertentu.

Dari Nangroe Aceh Darussalam, diberitakan, karena banyaknya surat suara yang bertukar, setidaknya tujuh kabupaten/kota seperti Kota Banda Aceh, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Utara, dan Kota Langsa menyelenggarakan penghitungan lanjutan. Di samping itu, kelemahan pemilu paling terasa di 'Serambi Mekkah' itu juga dalam hal tidak adanya tabulasi penghitungan suara di Komite Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang bisa diakses oleh masyarakat umum. Untuk mendapatkan hasil penghitungan suara, masyarakat saat itu hanya bisa mengakses situs web pusat tabulasi nasional yang dibangun KPU Pusat di Jakarta.

Selain berbagai pelanggaran disebutkan di atas, diperkirakan masih banyak lagi pelanggaran yang belum dilaporkan. Tapi, karena batas waktu pelaporan pelanggaran hanya tiga hari pasca pemilu, sehingga warga tidak sempat melaporkan pelanggaran yang dialami atau dilihatnya.

Menanggapi berbagai kekurangan dan kelemahan pemilu tersebut, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan pemilu kali ini merupakan pemilu paling buruk selama sejarah Republik. "Pribadi saya menilai ini ada kecurangan sistematis, bagaimana ada anak kecil masuk DPT, tapi orang yang sudah tinggal bertahun-tahun tidak masuk? Ini memalukan," ungkapnya (13/4) lalu.

Kini, pasca pemilihan legislatif, KPU kembali dituntut bekerja keras untuk menyelenggarakan pemilihan presiden/wakil presiden 8 Juli 2009. Sesuai ketentuan perundangan, KPU sudah harus membuat rekapitulasi nasional DPT Pilpres paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara. Sementara pemutakhiran daftar pemilih itu sendiri akan dilakukan hingga 10 Mei. Diharapkan, berbagai pelanggaran dan kekurangan seperti di atas apalagi kekurangan akibat kelemahan KPU tidak terjadi lagi. ■ MS

Mari Berhitung Secepat Kilat



Lomba matematika Sataka Indonesia se-Jabodetabek di Pusat Grosir Jatinegara, Jakarta Timur, 29 Maret 2009

Berbagai metode baru untuk memudahkan anak menyelesaikan perhitungan matematika semakin banyak bermunculan di Indonesia.

Upaya menemukan metode penyelesaian hitungan matematika yang lebih cepat sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Metode dengan menggunakan jari misalnya, diyakini sudah sama tuanya dengan kehidupan itu sendiri. Kini, di tengah semakin canggihnya teknologi, ternyata metode penyelesaian perhitungan matematika yang lebih efektif terus berkembang.

Metode penyelesaian perhitungan matematika dengan bantuan jari atau metode Jarimatika misalnya, terus berkembang dan diminati sampai sekarang. Metode yang diperkenalkan Septi Peni Wulandani ini memanfaatkan tangan kanan yang diibaratkan tangan satuan dan tangan kiri sebagai tangan puluhan.

Selain metode Jarimatika, kini muncul metode penyelesaian perhitungan matematika dengan konsep horizontal. Berbeda dengan penyelesaian perhitungan matematika yang selama ini memakai konsep vertikal atau dari atas ke bawah, ada dua konsep baru yang dibuat yaitu metode perhitungan dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan.

Metode penyelesaian matematika dari kanan ke kiri dikembangkan oleh Stephanus Ivan Goenawan, pengajar di Universitas Katolik Atma Jaya. Sementara metode penyelesaian matematika dengan

metode horizontal dari kiri ke kanan dikembangkan oleh Petrus Maxwell D. Silalahi sekaligus pendiri Sataka Indonesia, sebuah lembaga pendidikan luar sekolah yang khusus mengajarkan metode penyelesaian perhitungan matematika dengan sederhana dan efektif.

Metode perhitungan dari kiri ke kanan ini kemudian Maxwell namai metode Sataka. Dengan metode ini, pelajaran matematika diharapkan tidak lagi menjadi sesuatu yang membosankan bagi anak, namun menyenangkan. "Sataka sendiri artinya sahabat angka. Bagaimana persoalan yang sulit itu mudah bagi anak-anak. Kalau yang mudah menjadi menyenangkan itu biasa. Tetapi kalau yang sangat sulit menjadi menyenangkan, itu tugas kita," kata Maxwell dalam wawancara seusai acara lomba matematika Sataka Indonesia se-Jabodetabek di Pusat Grosir Jatinegara, Jakarta Timur, 29 Maret lalu.

Menurut Maxwell dalam wawancara seusai acara lomba matematika Sataka Indonesia se-Jabodetabek di Pusat Grosir Jatinegara, Jakarta Timur, 29 Maret lalu, metode Sataka sama seperti mengeja huruf. Dikatakan, dengan metode ini, perhitungan matematika dapat diselesaikan dengan langsung sehingga waktu yang diperlukan pun dapat dipangkas.

Sekadar contoh: Pengalihan 32 dengan

38. Dengan metode Sataka, $32 \times 38 = (3 \times 3 + 3) = 12$ (diletakkan di kolom ribuan dan ratusan). Kemudian, $2 \times 8 = 16$ (diletakkan di kolom puluhan dan satuan). Hasilnya: tinggal digabung menjadi 1216.

Selain menjelaskan soal metode, Maxwell menekankan pentingnya peran guru dalam mengajar. Karena menurutnya, modul yang berat tapi tanpa guru yang bagus, itu adalah sia-sia. Guru yang bagus tanpa penyampaian yang bagus, itu juga menurutnya sia-sia. Untuk itu menurutnya, kualitas guru menjadi hal pertama yang perlu distandarkan. "Jangan seperti selama ini sertifikat didahulukan, bukan mutu. Kulitnya dulu dibandingkan isinya, itu mungkin salahnya," katanya. Berkaitan dengan itu, sampai saat ini, dia juga mengaku, timnya terus melakukan riset matematika.

Mengenai lomba matematika Sataka Indonesia se-jabodetabek di Pusat Grosir Jatinegara, Jakarta Timur yang *Berita Indonesia* amati, peserta lomba yang kebanyakan dihadiri anak-anak sekolah dasar itu, semuanya sangat antusias. Respon orang tua untuk mengajak anak-anaknya mengikuti lomba tersebut sangat tinggi. Bahkan peserta lomba juga ada dari kelompok TK (Taman Kanak-kanak) dari Semarang.

Secara umum, orang tua peserta merasa puas atas lomba tersebut. Seperti yang diakui salah satu orang tua peserta, April Wijaya dari TK Candle Tree yang menjadi juara di 4 level, kelas satu sampai kelas empat. "Saya baru mengenal Sataka 2 bulan yang lalu waktu lomba di Cibubur. Untuk jangka waktu 2 bulan sebenarnya terlalu singkat untuk menilai, tapi dari satu kali lomba saja, saya melihat ada komitmen dari Sataka. Bukan hanya sekadar lomba. Tapi juga hal-hal yang bersifat edukasi," katanya.

Lahirnya berbagai metode matematika di Indonesia sudah selayaknya mendapat dukungan dari berbagai pihak. Ketua Umum Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia Hamid Hasan, misalnya pernah mengatakan, untuk menciptakan pembelajaran matematika sehingga menjadi menyenangkan, perlu kreativitas guru. Guru bisa saja memanfaatkan metode pembelajaran matematika yang berkembang di luar kelas. "Apalagi jika metode belajar matematika yang inovatif itu hasil pemikiran anak bangsa. Kenapa tidak diperkenalkan sebagai salah satu metode belajar. Yang penting, anak-anak paham konsep belajar matematika dan bisa menggunakannya untuk kehidupan," katanya seperti dirilis situs *Kompas*. ■ SAN, MAR, LOR

Menerabas Ulah Conficker dan Sality

Sejak beberapa tahun belakangan ini, virus-virus komputer makin gencar berseliweran mengganggu aktivitas para pengguna komputer di Indonesia. Virus-virus itu lebih banyak membangun koloni di warnet dan rental komputer. Dari sana, virus kemudian menyebar ke berbagai PC di rumah dan kantor lewat media penyimpanan *flashdisk*.

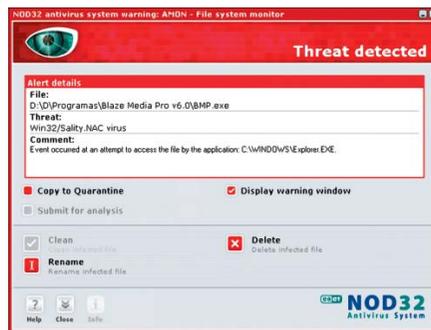
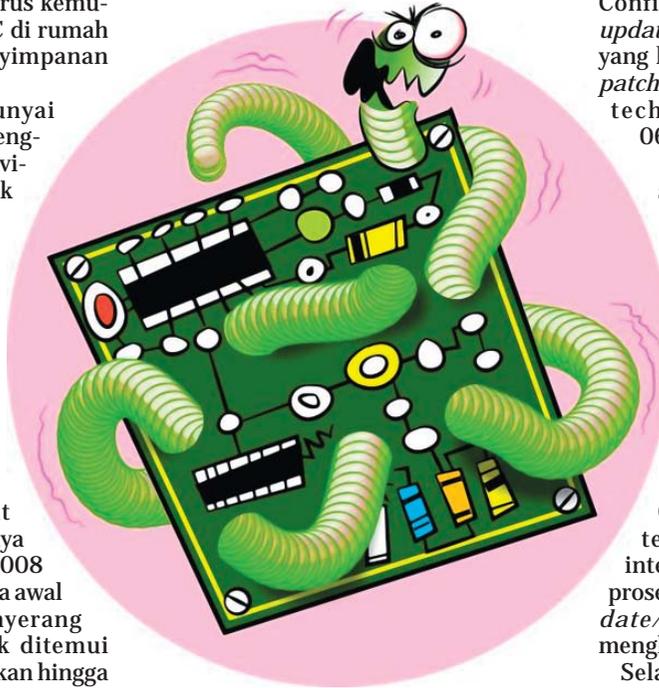
Bagi mereka yang mempunyai koneksi internet dan rajin meng-*update* aplikasi antivirusnya, virus-virus tersebut mungkin tidak berkutik. Namun, lain halnya dengan pengguna komputer kebanyakan yang belum mempunyai akses internet. Sekali terkena virus, isi perut komputer diabrak-abrik dan membuat susah penggunaannya. Setidaknya ada dua virus yang kini sangat populer di dunia yakni Conficker dan Sality.

Conficker (juga disebut Downadup dan Kido) sebenarnya sudah muncul sejak Oktober 2008 dan mulai merebak di Indonesia awal tahun 2009. Conficker menyerang Windows dan paling banyak ditemui dalam Windows XP. Diperkirakan hingga April 2009, sudah puluhan juta PC di dunia terinfeksi Conficker. Sebagai respon lanjutan atas pergerakan Conficker, industri besar seperti Microsoft, Symantec dan lainnya sudah membentuk tim untuk bertarung melawan Conficker, Worm dan sejenisnya. Microsoft juga menawarkan hadiah US\$250.000 bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi terpercaya tentang siapa pembuat virus ini. Hadiah ini tersedia bagi warga negara manapun.

Dari cara kerjanya, Conficker diketahui dapat mengeksploitasi celah keamanan seluruh sistem operasi Microsoft seperti Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000/2003/2008 Server bahkan Windows 7 yang masih dalam versi Beta. Yang dieksploitasi adalah celah keamanan RPC Dcom yang memungkinkan Conficker menyebar secara otomatis ke seluruh komputer dalam jaringan tanpa user perlu mengklik apapun.

Sekali komputer terinfeksi, Conficker akan menjalankan banyak rutin untuk mempertahankan dirinya di jaringan seperti mengeksploitasi *Default Share* (CS, DS), serta melakukan *brute force* pada *user account Active Directory* dalam rangka mendapatkan akses administrator. Dampak sampingannya juga sangat mengganggu seperti mengunci *account*

Awas! Duet dua virus, Conficker dan Sality, kini merongrong komputer-komputer di Indonesia.



login user-user dalam Active Directory secara otomatis, memblokir akses ke situs-situs antivirus dan Microsoft, dan yang paling canggih, Conficker mengunci dirinya pada proses svchost. Fungsi svchost sebenarnya tidak terinfeksi namun kalau kita tidak hati-hati dan svchost terhapus saat berusaha membasmi Conficker, komputer akan langsung restart.

Celakanya, pembuat Conficker tidak mudah puas dengan "prestasinya" dimana varian A dan B berhasil menginfeksi belasan juta komputer di seluruh dunia. Terakhir muncul Conficker.C, Conficker.D, dan Conficker.E yang memberikan ancaman baru bagi pengguna

komputer. Varian Conficker ini makin cerdas berkelit dari antivirus manapun bahkan ada yang sanggup secara serentak menghubungi 50.000 situs di internet untuk meng-*update* dirinya.

Sebagai langkah awal untuk mencegah Conficker beraksi, Anda harus meng-*update* antivirus dan Windows ke versi yang lebih baru atau dengan melakukan *patch* MS 08-067 (www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS08-067.msp).

Kalau komputer sudah terjangkit, silakan Anda Googling dengan memasukkan kata kunci "conficker removal tool". Google akan menampilkan halaman-halaman web yang menyediakan panduan dan aplikasi gratis untuk membasmi Conficker. Solusi lain, Anda bisa mencoba antivirus lokal bernama PCMAV atau PCMAV Express for Conficker yang dibuat secara khusus untuk membasmi dan mengenali Conficker. Pastikan komputer tidak terhubung ke jaringan maupun internet selama proses scan. Setelah proses *scan* dan *clean* selesai, segera *update/patch* komputer Anda untuk menghindari infeksi ulang.

Selain Conficker, ada satu lagi virus yang bikin sakit kepala di awal 2009 ini yang disinyalir berasal dari China/Taiwan bernama Sality. Kalau Conficker memiliki spesialisasi mengganggu lalu lintas data di jaringan dengan cara mengeksploitasi celah keamanan, Sality membuat kerusakan yang lebih hebat.

Selain karena penyebarannya yang sangat luas, Sality menginfeksi semua file eksekusi seperti .exe, .com, .scr. Akibatnya, komputer yang sudah terjangkit Sality, tidak ada cara lain, harus di-*install* ulang. Sality juga melakukan beberapa aksi canggih seperti memblokir program antivirus dan *software* sekuriti, blokir akses ke situs-situs antivirus dan sekuriti, mengubah seting Windows Firewall guna mempermudah menyebarkan dirinya, memblokir akses ke SafeMode dan mampu meng-*update* dirinya (seperti antivirus) ke situs-situs yang telah ditentukan.

Bila komputer Anda sudah terjangkit Sality, tidak ada jalan lain selain komputer harus di-*install* ulang atau di-*restore*. Kalau komputer belum terjangkit Sality, ada baiknya melakukan pencegahan dengan menginstal program antivirus dan rajin meng-*update*-nya. Rutin meng-*update* Windows juga wajib hukumnya agar komputer terhindar dari siksaan virus yang datang silih berganti. ■ ROY

Janji Merangkul Dua D



PM Najib Rajak (kanan) dan pendahulunya Abdullah Ahmad Badawi

PM Malaysia yang baru, Najib Rajak berjanji akan merangkul seluruh golongan. Upaya mewujudkan visi Satu Malaysia akan terganjal politik etnis - Melayu dan non Melayu - yang sudah mendarah daging di Malaysia.

Najib Rajak diambil sumpah di hadapan Yang Dipertuan Agung sebagai Perdana Menteri (PM) baru Malaysia, Jumat (3/4). Perpindahan kekuasaan di Malaysia ini menyusul pengunduran diri secara resmi Abdullah Ahmad Badawi sebagai PM pada Kamis (2/4). Badawi mundur karena gagal memenuhi janji-janjinya selama enam tahun menjabat. Kegagalan Badawi ditandai dengan laju inflasi yang terus meninggi, meluasnya kesenjangan sosial, dan membesarnya praktik kronisme.

Badawi juga dinilai gagal memenuhi janji yang diucapkan dalam kampanye Pemilu 2004, yaitu memerangi korupsi hingga ke akar-akarnya. Program Na-

tional Integrity Plan yang diluncurkan Badawi ternyata tidak diikuti tindakan-tindakan tegas dan terarah dalam pemberantasan korupsi. Dilihat dari Corruption Perception Index (CPI), posisi Malaysia turun dari urutan ke-24 pada tahun 1995 menjadi urutan ke-34 pada tahun 2004 dan 2005, dan terus menurun ke urutan ke-44 pada tahun 2006. Tekanan agar Badawi mundur makin memuncak setelah kegagalan koalisi Barisan dalam pemilu Maret 2008. Saat itu, untuk pertama kalinya, sejak 1969, UMNO gagal meraih dua pertiga mayoritas suara atau 140 dari 222 kursi di parlemen.

Sebagai PM baru, Najib Rajak berusaha menampilkan citra positif. Dalam pidato

perdananya sebagai PM, Najib berjanji merangkul semua golongan dan memanfaatkan seluruh sumber daya itu. Hal itu sesuai dengan visi Satu Malaysia yang ia muat di situs resminya dan diumumkan usai pelantikan.

“Dalam beberapa pekan ke depan, saya akan berkonsultasi dengan rakyat di seluruh negeri. Kita harus merangkul seluruh golongan di Malaysia, seluruh masyarakat kita yang beragam. Untuk mencapai tujuan nasional, kita tidak boleh pernah meninggalkan siapa pun. Kita harus merangkul mereka yang terpengaruh dan kebingungan oleh permainan politik, tipu daya, dan keangkuhan,” tutur Najib.

Ia juga mengumumkan dicabutnya penangguhan terbit 2 koran oposisi, membebaskan 13 tahanan dari penjara Internal Security Act (ASA), dan akan meninjau ulang secara menyeluruh undang-undang keamanan yang keras itu. Namun begitu, seluruh warga harus tetap waspada terhadap ancaman-ancaman keamanan yang terus dihadapi negara.

Dukungan dan Tantangan

Terpilihnya Najib Rajak sebagai PM diikuti dengan bergabungnya kembali mantan perdana menteri sekaligus politikus veteran Mahathir Mohamad di perpolitikan UMNO. Mahathir bukan hanya bergabung kembali dengan UMNO, tetapi secara jelas juga mendukung Najib. Menurut Mahathir, pemerintahan di bawah Najib akan merakyat dan memperjuangkan rakyat tanpa pandang ras dan agama.

Pernyataan Mahathir itu sekaligus menjadi kekuatan dan tantangan bagi Najib. Mahathir yang pernah 22 tahun berkuasa di Malaysia harus diakui sampai kini tetaplah tokoh utama negeri itu. Karena itu, masuknya kembali Mahathir ke UMNO dan dukungan kepada Najib merupakan modal awal bagi perdana menteri baru.

Meski demikian, sejumlah kalangan ada yang merasa skeptis dengan kepemimpinan Najib. Meski lebih “energik” dan taktis dibandingkan Badawi, latar belakang kehidupan Najib dinilai tidak membentuknya sebagai sosok pembaru yang

unia

punya kepekaan mendalam terhadap sejumlah persoalan yang berkembang di tingkat “akar rumput”.

Najib adalah putra PM kedua Malaysia, Abdul Razak Hussein, dan keponakan PM ketiga Malaysia, Husein Onn. Jelas, Najib adalah sosok “darah biru” dalam politik Malaysia, yang merasakan banyak kemandahan politik dari latar belakang keluarganya. Latar belakang ini memunculkan tanda tanya apakah Najib cukup bisa berempati terhadap kesulitan ekonomi yang diperkirakan akan makin dirasakan rakyat Malaysia akibat tekanan krisis global.

Dalam konteks ini, pihak oposisi Anwar Ibrahim yang berasal dari kalangan “rakyat biasa” jelas lebih punya citra populis dan artikulatif dibandingkan Najib. Anwar telah berupaya mengakomodasi kegelisahan etnis non-Melayu yang memandang NEP (New Economic Policy) yang memprioritaskan ekonomi etnis Melayu sebagai kebijakan yang sudah waktunya diakhiri.

Sekitar 30 persen dari rakyat Malaysia yang hidup saat ini lahir setelah kerusuhan rasial tahun 1969, yang melatarbelakangi dikeluarkannya kebijakan NEP oleh PM Razak Hussein (ayah Najib). Ironisnya, wacana yang kini kian berkembang luas adalah tuntutan agar Najib segera mencabut kebijakan NEP yang diluncurkan ayahnya sendiri.

Persoalannya, identifikasi sosial dan politik berdasarkan garis etnis sudah menjadi sesuatu yang mendarah daging dalam sistem politik Malaysia. Partai-partai yang ada kebanyakan dibentuk berdasarkan garis etnis. Dalam rangka mempertahankan dukungan etnis Melayu yang merupakan basis konstituennya inilah mayoritas politisi UMNO masih tetap berkeinginan untuk mempertahankan NEP.

Dengan demikian, ada kesenjangan besar antara realitas dan idealitas dalam politik Malaysia. Karena itu, secara visioner dapat dikatakan, tantangan terbesar bagi kepemimpinan politik Malaysia dewasa ini adalah bagaimana memelopori transformasi dari politik etnis yang cenderung rasialis kepada “politik kebangsaan” yang inklusif. ■ **LOR**



Najib Rajak

‘Darah Biru’ Politik Malaysia

Dato Sri Mohamad Najib bin Tun Haji Abdul Razak lahir pada 23 Juli 1953 di Kuala Lipis, Pahang, Malaysia. Ia adalah anak tertua dari enam bersaudara berayahkan Abdul Razak Hussein, PM kedua Malaysia, dan keponakan Hussein Onn, PM ketiga Malaysia. Bapakinya dihormati karena berhasil menyelamatkan negara dari ambang bencana, menyusul kerusuhan rasial pada 1969 dan meletakkan dasar bagi Malaysia modern.

Abdul Razak juga memperluas koalisi berkuasa dan menciptakan apa yang kini dikenal sebagai koalisi Barisan Nasional (BN). Dia juga memperkenalkan Kebijakan Ekonomi Baru yang memprioritaskan etnis Melayu di lapangan pekerjaan, pendidikan, dan bisnis, demi menipiskan jurang antara orang miskin Melayu dengan minoritas Tiongkok yang kaya.

Sang anak, Najib termasuk orang termuda di Malaysia yang terpilih sebagai anggota parlemen. Ia menggantikan kursi bapaknya di Pekan dalam pemilu pada 1976 di usia 22 tahun, setelah bapaknya meninggal karena leukemia. Ia dapat mempertahankan posisi itu selama enam pemilu berturut-turut. Ia juga pernah menjadi menteri kepala di Negara Bagian Pahang.

Saat pertama masuk ke parlemen, Malaysia dipimpin oleh Mahathir Mohamad, yang pernah mengatakan

berutang budi kepada Abdul Razak karena mendukungnya hingga sampai ke posisi PM.

Najib dipandang sebagai ‘darah biru’ dalam politik Malaysia. Di Pahang, ia memegang gelar Orang Kaya Inderapura Shahbandar Pahang Darul Makmur.

Najib tamat sekolah dasar dan menengah di John’s Institution Kuala Lumpur, lalu melanjutkan studi ke Malvern College di Worcestershire Inggris dan Universitas Nottingham. Najib lulus sarjana ekonomi industri pada 1974.

Ia pertama kali menikah dengan Tengku Puteri Zainah Tengku Eskandar. Sekarang ia beristrikan Datin Sri Rosmah Mansor. Ia dikarunai tiga putra serta dua putri.

Kiprah politiknya berkibar sejak 1980-an saat memimpin sayap muda Organisasi Kebangsaan Melayu Bersama (UMNO). Sayap itu antara lain dikenal saat meminta darah orang Tiongkok di keris Melayu.

Setelah resmi disumpah menjadi PM keenam, Jumat (3/4), Najib berjanji menyatukan seluruh etnis dan mendesak seluruh rakyat Malaysia untuk bersatu.

Najib yang gemar bermain golf ini memiliki jaringan pertemanan dan pendukung dari lingkaran elite bisnis Malaysia. Adiknya, Nazir Razak, saat ini memimpin CIMB, bank terbesar kedua di Malaysia. ■

Selama Thaksin Masih Hidup

Perpecahan di Thailand masih tetap membayangi dan kelompok Kaus Merah tetap menuntut digelarnya pemilu dini.

Slepas Thaksin Shinawatra dikudeta oleh militer sehingga harus melepaskan jabatannya sebagai perdana menteri pada 2006, pemerintahan di Thailand tak pernah tenang. Pemilihan umum Desember 2007 kemudian digelar untuk memilih Perdana Menteri (PM) menggantikan rezim militer Thailand yang berfungsi sebagai rezim transisi pascakudeta. Yang menang partai pendukung Thaksin, Partai Kekuatan Rakyat (PPP). Partai itu lalu memilih Samak Sundaravej sebagai perdana menteri. Tapi sejak Mei 2008, pendukung People's Alliance for Democracy (PAD) terus menerus mendemo sampai Samak mundur pada September 2008.

Partai Kekuatan Rakyat Party mengajukan Somchai Wongsawat sebagai pengganti Samak. PM Somchai pun terus menerus digoyang demonstrasi pendukung PAD sampai dia turun pada Desember 2008. Demonstrasi saat itu sangat rusuh. Para demonstran memblokir semua jalan ke kantor PM, melumpuhkan bandara di Bangkok selama beberapa hari pada akhir November 2008.

Pada dasarnya, PAD, yang pada 2006 diyakini mendorong terjadinya kudeta militer terhadap Thaksin, tidak sudi dipimpin oleh pemerintahan boneka Thaksin, yang merupakan perpanjangan tangan Thaksin. Massa kelompok ini

ditandai dengan kaos kuningnya.

PAD sendiri merupakan kelompok yang didukung oleh kelas menengah, pebisnis, dan warga perkotaan yang dipimpin oleh pengusaha media, Sondhi Limthongkul dan Chamiong Srimuang, mantan jenderal. Chamiong sendiri memiliki hubungan erat dengan Prem Tinsulanonda, penasihat Raja Bhumibol Adulyadej.

Posisi Somchai Wongsawat kemudian digantikan oleh Abhisit Vejjajiva dari Partai Demokrat pada 15 Desember 2008. Atmosfer politik di Thailand kembali memanas. Giliran massa yang tergabung dalam United Front for Democracy Against Dictatorship (UDD) – demonstran pro-Thaksin - melakukan 'aksi balasan' dengan turun ke jalan. "Kini, giliran pendukung Thaksin yang akan turun ke jalan," kata Sukhum Nuansakul, pengamat politik dari Ramkhamhaeng University, Desember silam, usai parlemen memberikan 235 dari 437 suara yang mengantarkan Abhisit menjadi perdana menteri.

Demo pro-Thaksin pun sama nekatnya dengan demo pendukung PAD. Massa UDD yang ditandai dengan kaos kuningnya mengepung kantor PM dan menutup akses masuk ke parlemen dengan menggunakan barikade baja. Mereka memecahkan kaca-kaca mobil anggota parlemen yang memberikan dukungan pada

Abhisit. Puncaknya, mereka mengacaukan KTT ASEAN serta KTT Asia Timur di Pattaya (11/4).

Pemimpin negara-negara ASEAN, tiga negara Asia Timur, dan PM Australia terpaksa pulang karena pertemuan dibatalkan. Semua media massa meluit pembatalan itu dan mengirimkan pesan bahwa sedang terjadi krisis politik di Thailand dan pemerintah Thailand gagal dalam menguasai keadaan.

Massa UDD juga punya alasan menggelar demonstrasi. Mereka tidak percaya pada pemerintahan Abhisit yang dianggap mencapai kekuasaan melalui cara yang tidak sah. Abhisit juga diyakini memiliki kaitan dengan rival mereka, PAD, yang pada 2006 diyakini mendorong terjadinya kudeta militer terhadap Thaksin. Meski menurut situs BBC, Abhisit adalah orang yang menentang kudeta militer tersebut.

Thaksin sendiri dianggap sebagai tokoh penggerak demonstrasi UDD selama tiga pekan itu. Dari pengasingan, Thaksin terus mendorong massa pendukungnya terus menyampaikan tuntutan agar Abhisit mundur. Dalam wawancara dengan stasiun televisi BBC, Senin (13/4), Thaksin mengatakan dirinya bukan penyebab rakyat turun ke jalan menentang pemerintah. "Saya hanya memberikan dukungan moral. Mereka berdemonstrasi atas kehendak mereka sendiri secara damai. Mereka hanya menginginkan demokrasi sejati. Setelah merasakan ketidakadilan selama tiga tahun, mereka sudah tidak bisa menanggungnya lagi," ujarnya.

Saat ditanya apakah dia memberikan

Ironi Kudeta di Negeri Gajah Putih



Thaksin Shinawatra
Terpilih melalui pemilu paling demokratis pada 1997. Pada 19 September 2006, militer melancarkan kudeta.



Jenderal Surayud Chulanont
Mengusung pemerintahan dewan jenderal. Mengadakan pemilu demokratis pada 23 Desember 2007.



Samak Sundaravej
Merupakan Ketua People's Power Party pada September 2008, keputusan MK soal jabatan rangkap membuatnya lengser.



Somchai Wongsawat
Adik ipar mantan PM Thaksin memerintah pada 2 Desember 2008. MK melengserkan karena terbukti curang pada Pemilihan 2007.



Massa pendukung Thaksin (UDD) menuntut PM Abhisit turun karena dianggap terpilih secara tidak sah

dukungan dana bagi pemrotes, Thaksin membantah. "Saya bisa jamin bahwa mereka datang atas kehendak sendiri. Mereka memiliki hati demokrasi. Jangan anggap orang miskin tidak memahami politik," tuturnya.

Ketidakpuasan Thaksin dan massa pendukungnya mungkin bisa dipahami. Ketika dikudeta oleh militer pada September 2006, Thaksin masih mendapat mandat dari rakyat karena partainya menang pemilu. Namun dengan dalih korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, Thaksin dijatuhkan. Begitu pula dengan Samak dan Somchai. Keduanya dijatuhkan dengan berbagai alasan lewat putusan pengadilan. Samak jatuh karena menerima honor tampil di stasiun TV. Somchai jatuh karena tuduhan kecurangan pemilu. Sejumlah pengamat menilai, pengadilan

sudah bersifat politis. Padahal PM yang mereka vonis 'bersalah' itu mendapat posisinya karena mendapat dukungan dari rakyat melalui pemilihan umum. Elit politik Thailand mengabaikan suara rakyat dan membuat berbagai rekayasa politik sampai tujuan mereka tercapai.

Meski demonstrasi massa UDD akhirnya berakhir 14 April, situasi politik Thailand masih belum tenang. Otoritas Thailand, Rabu (15/4), menyatakan telah mencabut paspor mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Thaksin dinilai menghasut para pendukungnya untuk melakukan kekacauan yang menyebabkan pertemuan puncak Asia Timur di Pattaya dibatalkan. Kini, Thaksin tengah diburu polisi yang telah mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap dirinya dan 13 pemimpin protes antipemerintah lainnya.

Abhisit juga memperingatkan bahwa ancaman pemrotes antipemerintah, yang dikenal sebagai kelompok Kaus Merah, belum selesai. "Masih ada pemrotes di beberapa wilayah. Bedanya, kini mereka tidak mengenakan kaus merah lagi," ujarnya.

Analisis juga mengungkapkan hal serupa. Meskipun kekuatan Thaksin menurun dengan berakhirnya protes, Thaksin tidak benar-benar kalah. Problem sosial dan perpecahan masyarakat masih berlanjut sehingga Thaksin dinilai menjadi salah satu "penyelamat".

"Banyak orang kini akan menganggap Thaksin benar-benar tidak bisa diterima. Namun, saya kira itu tidak menghilangkan pentingnya Thaksin bagi para pendukungnya," kata Chris Baker, penulis biografi Thaksin. Miliarder itu masih menjadi figur yang menentukan di Thailand, yang dicintai rakyat miskin karena kebijakannya yang populis, dan yang dikecam lawan-lawannya karena korup dan otoriter. Para pendukung Thaksin tetap merasa hak demokratik mereka dirampas.

Menurut analisis, skenario yang paling mungkin terjadi setelah ini adalah Abhisit tetap berkuasa dengan perpecahan yang tetap membayangi dan kelompok Kaus Merah tetap menuntut digelarnya pemilu dini.

Kapan pun pemilu baru digelar, partai-partai pro-Thaksin bisa kembali berkuasa dengan dukungan yang dimiliki dari warga pedesaan. Kubu rival, yang menamakan diri Kaus Kuning dan pro-kerajaan, sekali lagi akan bergerak menurukan pemerintahan pro-Thaksin. Salah satu solusi kunci, menurut Kristina Kazmi dari lembaga IHS Global Insight, adalah Abhisit harus mampu merangkul kaum miskin pedesaan guna mengonsolidasi basis kekuasaannya.

■ LOR



Abhisit Vejjajiva
Diangkat pada 17 Desember 2008 sebagai PM ke-27. Kini posisinya digoyang kelompok pro-Thaksin.

Pemerintahan Raja Penduduk Luas Rekor Pemerintahan Rekor terakhir

: Monarki Konstitusional
: Bhumibol Adulyadej
: 64.700.000 (sensus 2006)
: 514.000 km2
: 18 kudeta militer sejak 1930
: Empat PM lengser dalam tempo 15 bulan

Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva yang lahir di Newcastle, Inggris, pada 1964, berasal dari keluarga Cina-Thailand yang kaya. Ayah dan ibunya, merupakan profesor di bidang medis. Ia meraih gelar di bidang politik, filsafat, dan ekonomi di Oxford University.

Pada 1992, Abhisit bergabung dengan partai tertua di Thailand, Partai Demokrat. Di usia 27 tahun, ia berhasil meraih kursi di parlemen sebagai anggota parlemen termuda. Selain muda dan fotogenik, ia juga dikenal sebagai politisi bersih.

Sebelum menjadi anggota parlemen, Abhisit meniti karier akademis. Ia menjadi dosen di Chulachomk Royal Military Academy. Ia kemudian kembali ke Oxford untuk meraih gelar master. Setelah itu, ia mengajar ekonomi di Thammasat University.

Kiprah dan pengalamannya politiknya di parlemen, mendorongnya bersaing untuk mencapai posisi puncak di Partai Demokrat. Pada 2001, ia bertarung namun ia gagal memimpin partai. Empat tahun kemudian, ia berhasil menjadi pemimpin Partai Demokrat.

Selama ini, Abhisit mendapat

dukungan dari kalangan menengah terdidik dan dari wilayah selatan Thailand. Namun ia masih belum berhasil meraih dukungan dari kelas pekerja dan warga pedesaan yang merupakan pendukung mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra.

Setelah menjadi perdana menteri, Abhisit mengupayakan peningkatan kehidupan ekonomi. Ia juga mengupayakan pelayanan kesehatan gratis, peningkatan upah buruh, dan pendidikan gratis. Ia juga mendorong pemberantasan korupsi. ■



Stasiun Pulo Brayan-Medan track jenis R42, R25 dan bantalan kayu

Memacu Pembangunan Perkeretaapian

Membangun perkeretaapian di Sumatera Utara, dan Kota Medan khususnya, menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Dirjen Perkeretaapian.

Sebagai salah satu dari tiga kota terbesar di Indonesia, Medan memiliki tingkat kemacetan seperti kota-kota besar lain di Indonesia. Tindakan antisipasi mengurai tingkat kepadatan jalan raya perlu dilakukan. Kereta api sebagai angkutan massal dan intermoda, memiliki peran yang semakin strategis di masa depan.

Untuk itu, Direktorat Dirjen Perkeretaapian pun seakan berpacu dengan waktu dan situasi untuk meningkatkan perkeretaapian di daerah ini. Untuk mengetahui lebih jelas sejauh mana prioritas yang diberikan Direktorat ke daerah ini, *Berita Indonesia* sengaja berkunjung ke Medan.

Saat *Berita Indonesia* berkunjung ke stasiun Medan dan berbagai stasiun lain di Sumatera Utara, sejauh mata memandang terbentang rel dengan jenis R25 yang masih layak digunakan. Di antara rel jenis itu, dalam skala yang kecil terdapat juga rel jenis R42. Namun, sayangnya rel jenis R54 belum satupun yang terlihat.

Menurut Edward Silaen, anggota satuan kerja (Satker) Perkeretaapian Sumatera Utara, sejauh ini pembangunan infrastruktur perkeretaapian diarahkan untuk peningkatan jalan rel (R) dari R25 ke R42 dan peningkatan bantalan dari kayu ke beton. Di samping memperkecil kelambatan laju kereta, seperti lintas Medan -



Edward Silaen (Satker Perkeretaapian Sumatera Utara)

Rantau Prapat, kecepatan kereta api mampu dipacu antara 70-80 km/jam, dari sebelumnya hanya berkisar 40-50 km/jam.

Dengan meningkatnya prasarana menjadi lebih baik, diharapkan tingkat kenyamanan pengguna jasa kereta api juga makin meningkat, waktu tempuh perjalanan lebih cepat dan keamanan perjalanan kereta lebih terjamin.

“Adanya pembangunan prasarana yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Direktorat Dirjen Perkeretaapian, masyarakat Medan khususnya makin merasakan derap pembangunan, terutama masyarakat di sepanjang jalur perkeretaapian yang sedang diperbaiki. Selain itu, dinamika pembangunan prasarana perkeretaapian mampu menyerap tenaga kerja yang lumayan besar sebagai solusi masalah tenaga kerja,” ungkap Edward.

Pada tahun 2007 sepanjang 22 km prasarana diperbaiki, sementara, melalui anggaran 2008 sepanjang 17 km kondisi prasarana ditingkatkan. Tahun 2009, melalui DIPA reguler dan sebagian diusulkan melalui APBN direncanakan rehabilitasi prasarana sepanjang 20,6 km dan pembangunan sistem persinyalan serta telekomunikasi di stasiun Medan. Dan melalui anggaran 2009-2010 diharapkan persinyalan dan telekomunikasi di Medan setara dengan di Jawa.

Seperti diketahui, kata Edward, sejak persinyalan dipasang sekitar tahun 90-an sampai sekarang, belum ada yang baru. Semuanya sebatas perawatan. Kami berharap pembangunan persinyalan dan telekomunikasi di stasiun Medan akan berkembang ke stasiun lain di Sumatera Utara. Disamping itu wesel-wesel tipis yang kecil dan sudah tua diadakan penyesuaian dengan kondisi track agar menjamin keselamatan perjalanan kereta.

Berdasar yang pernah kami dengar, kata dia, dulu (semasa Perkeretaapian di bawah Dirjen Perhubungan Darat) ada kesepakatan, bila di Jawa penggantian rel dari R42 ke R54, rel bekas bongkarannya digunakan ke Sumatera Utara.

“Di samping R42, penggunaan rel R54 dan jalur ganda nantinya bisa dinikmati oleh pengguna jasa kereta api di Medan dan Sumatera Utara, sehingga perjalanan kereta semakin lancar dan optimal. Saat ini kedua hal itu belum terpasang di Perkeretaapian Sumatera Utara, kami berharap suatu saat kemajuan prasarana di Jawa berkembang di Sumut,” ujarnya.

Dengan adanya Direktorat Jenderal Perkeretaapian, peningkatan pembangunan prasarana di Sumatera Utara diakui semakin terasa, baik pembangunan fisik maupun pelayanannya yang dampaknya dirasakan pengguna jasa kereta api.

Pembangunan prasarana KA memiliki arti strategis, mendukung percepatan lalu lintas perekonomian masyarakat antar kota di satu daerah, antar daerah dan antar propinsi.

Diakui, saat ini perhatian baru di lintas utama yang berhubungan dengan pengguna jasa yang jauh lebih banyak. Tapi secara bertahap akan berkembang ke lintas lain. “Program diarahkan dalam skala prioritas dan bersifat strategis, sesuai kebijakan regulator yang harus diaplikasikan dengan tepat,” tutur Edward. ■ RI

“Outlet” Pelayanan Jemput Bola

Berbagai terobosan dilakukan Jasa Raharja dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan membuat outlet di beberapa kota untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Di wilayah Jawa Timur misalnya, menurut Kepala Cabang Jasa Raharja Jawa Timur H. Sutadji, ada 6 outlet pelayanan santunan korban kecelakaan yang tersebar di enam daerah. Di antaranya, di Mojokerto untuk melayani masyarakat daerah Gresik, Sidoarjo dan Jombang. Di Probolinggo untuk melayani daerah Pasuruan dan Lamongan. Di Banyuwangi untuk melayani daerah Situbondo dan Bondowoso. Kemudian di Ponorogo untuk melayani masyarakat Ngawi dan Pacitan. Di Tuban untuk melayani daerah Lamongan dan Bojonegoro, dan di Tulungagung untuk melayani Trenggalek, Nganjuk dan Blitar.

“Keberadaan outlet merupakan pelayanan jemput bola dari Jasa Raharja. Saat ini kehadiran outlet itu telah dirasakan oleh masyarakat dan menjadikan korban kecelakaan mendapatkan akses lebih cepat. Selain itu outlet ini merupakan

tempat proses pelayanan santunan yang bersifat lebih dekat kepada korban kecelakaan. Sehingga masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh dan ahli waris tidak perlu keluar biaya banyak saat ingin melaksanakan proses pengurusan santunan. Mereka cukup datang ke outlet yang sudah ditunjuk,” ungkap Sutadji, saat diwawancara Senin (20/4).

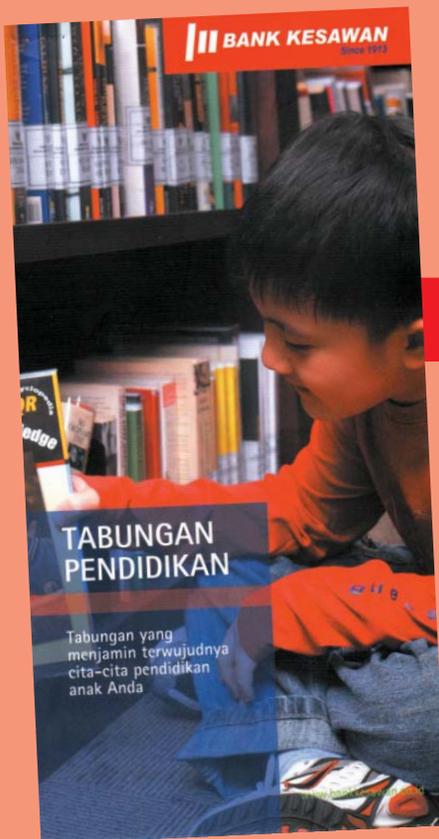
Sebelum outlet ini hadir, pelayanan proses pembayaran santunan dilakukan di perwakilan cabang Jasa Raharja setempat. Perwakilan itu tersebar di kabupaten/kota di Jawa Timur yakni, Surabaya, Malang, Bojonegoro, Jember, Kediri, Pamekasan. “Selain itu, kami mengoperasikan pula 6 unit mobil pelayanan yang selalu memonitor perkembangan, kemungkinan terjadi kecelakaan di seputar wilayah itu langsung ditangani lebih cepat. Hal itu sesuai dengan motto kami: Satukan tekad raih kemajuan perusaha-

an,” katanya.

Menyinggung santunan yang telah dibayarkan, orang pertama Jasa Raharja di cabang Jawa Timur itu mengungkapkan, tahun 2008 telah dibayarkan Rp 179 miliar lebih. Menurutnya, perubahan besarnya adalah perubahan besaran santunan PT Jasa Raharja (Persero) yang tadinya Rp 10 juta menjadi Rp 25 juta per 28 Maret, sesuai keputusan Menteri Keuangan, menjadikan pembayaran santunan pada 2008 lalu tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Dari data uang santunan pembayaran per akhir November 2008 saja jumlah santunan sudah mencapai Rp 179.082.016.325. Sebagai pembandingan, jumlah pembayaran santunan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 105 miliar, sementara tahun 2006 sebesar Rp 93 miliar, sedang pada tahun 2005 sebesar Rp 193 miliar, dan tahun 2004 sebesar Rp 103.477.688.627.

Peningkatan santunan pada 2008, selain naiknya nilai jaminan kematian, juga dipengaruhi meningkatnya jumlah kendaraan yang mencapai 100%. “Kecelakaan masih didominasi kecelakaan di darat sekitar 75 persen, sisanya di laut dan udara,” ungkapnya. ■ **RI**



Guna melengkapi kebutuhan nasabah yang kian beragam dalam perencanaan biaya pendidikan, Bank Kesawan meluncurkan produk baru Tabungan Pendidikan. Penandatanganan MOU Kerjasama antara Bank Kesawan dengan Asuransi Mega Life di Jakarta tanggal 21 Juni 2008.

Business Director Bank Kesawan - Entjik S.Djafar menjelaskan, melalui Tabungan Pendidikan diharapkan nasabah dapat **merencanakan biaya pendidikan** anak lebih baik. Jangka waktu yang diberikan sangat fleksibel yaitu mulai dari **1 tahun sampai 20 tahun** dan usia penabung pada saat jatuh tempo adalah 65 tahun, dan setoran rutin setiap bulan besarnya **mulai dari Rp. 100.000,- atau kelipatannya dengan maksimum sampai dengan Rp5 juta**. Mudah melakukan setoran rutin karena secara otomatis Bank Kesawan akan mendebet rekening Tabungan atau Giro setiap bulannya.

Bank Kesawan Luncurkan Tabungan Pendidikan

Selain kemudahan-kemudahan di atas, Tabungan Pendidikan Bank Kesawan juga memberikan perlindungan **asuransi jiwa**. Dalam hal ini apabila penabung meninggal dunia maka setoran rutin bulannya akan diteruskan oleh Asuransi Mega Life. Jika nasabah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap atau meninggal dunia maka ahli waris akan mendapatkan **santunan duka sebesar 250%** dari kumulatif saldo tabungan atau maksimum Rp500 juta, dan manfaat santunan rawat jalan/inap sebesar biaya rumah sakit atau maksimum 25% dari saldo Tabungan Pendidikan.

Sesuai dengan visi Bank Kesawan untuk menjadi Bank terdepan di kelasnya, kini lebih memantapkan posisi dalam kancah persaingan perbankan nasional. Hal ini didukung oleh 32 jaringan layanan yang tersebar di 10 kota di Indonesia dan ATM Kesawan yang siap untuk memberikan pelayanan selama 24 jam sehari serta **bebas biaya transaksi ATM** untuk info saldo, tarik tunai dan transfer antar rekening Bank Kesawan. Akses jaringan ATM Kesawan tersebar di lebih dari **12.000 mesin ATM** yang berlogokan ATM Bersama di seluruh Indonesia.

Informasi lebih lanjut mengenai Tabungan Pendidikan Bank Kesawan, dapat menghubungi Customer Service kami yang terdekat di kota Anda:

JAKARTA: 021-350.8888; MEDAN: 061-415.2929; BANDUNG: 022-422.0618; SURABAYA: 031-568.7530; DENPASAR: 0361-233.777; PEKANBARU: 0761-33308; BATAM: 0778-456.112; TANJUNG BALAI: 0623-92688 dan PEMATANG SIANTAR: 0622-29666.



KOMPAK: Bupati Purwakarta Dedy Mulyadi SH dan Sekda Drs. Rosaman, KM., MM

Jangan Alergi Terhadap Wartawan

Keberadaan media yang sudah diatur dalam undang-undang diperlukan untuk mempublikasikan program dan kinerja pemerintah.

Bupati sudah memberikan komitmennya terhadap pers dan itu juga sudah jelas diatur dalam UU Pers No 40 tahun 1999. Jadi sebaiknya pejabat harus tanggap atas kepentingan berita yang dibutuhkan wartawan." Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat Drs. Maman Rosaman KM., MM menjawab pertanyaan wartawan *Berita Indonesia* ketika diminta penjelasannya mengenai bagaimana sebenarnya keberadaan pemberitaan media di mata pejabat Pemda Purwakarta terutama pejabat di lingkungan dinas dan kantor yang dibawah Maman. Apakah masih dibutuhkan dalam mempublikasikan program?

Pertanyaan itu sendiri sengaja *Berita Indonesia* lemparkan kepada Sekda dalam kesempatan bincang-bincang di Kantor Pemda Purwakarta mengingat adanya gejala 'alergi' atau kurang responnya beberapa pejabat bawahannya terhadap kehadiran wartawan dalam memburu berita.

Sekadar contoh, perlakuan yang dialami wartawan *Berita Indonesia* dari Ir. Martono, MM yang baru dilantik sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Kabupaten Purwakarta beberapa waktu yang lalu. Pasca pengambilan sumpah Martono ketika itu, *Berita Indonesia* mencoba meminta konfirmasi seputar langkah atau metode yang akan dia lakukan dalam menjabarkan atau merealisasikan amanat bupati saat itu, tapi permintaan tersebut tidak mendapat tanggapan dari sang Kadis.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi SH seperti disampaikan Kahumas Pemkab Purwakarta Ade Zaenudin SH kepada pers sesaat setelah pelantikan Martono, menyampaikan pesan dan harapan besar kepada Kadis Cipta Karya yang baru itu. Beliau mengatakan, kalau tahun 2009 adalah tahun peningkatan infrastruktur jalan maka target tahun 2010 adalah tahun air bersih. Tahun itu diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang kekurangan air bersih. Selanjutnya, Cipta Karya harus melakukan intervensi terhadap tata ruang Kabupaten Purwakarta dengan membuat desain kota yang memadai. Ke depan pembangunan kota harus atas dasar pikiran para ahli.

Kembali ke masalah 'alergi'-nya Martono terhadap pers. *Berita Indonesia* yang hingga dua hari berturut-turut meminta waktunya hanya untuk menanyakan

metodenya merealisasikan pesan bupati tadi, tetap tidak bersedia dengan alasan yang tidak menyenangkan. Dia hanya berlalu tanpa peduli walau sudah ditunggu berjam-jam.

Padahal, sebagaimana diutarakan Sekda Maman Rosaman, sebagai Sekda dia sudah berulang kali memaparkan kepada jajaran di bawahnya agar selalu bekerja secara sistematis yang diurainya dalam P4, yaitu *Polo, Pola, Pele, dan Palu*.

Polo, Maman artikan sebagai kemampuan untuk memikirkan terlebih dahulu secara objektif. Ketika kemampuan itu ternyata sudah dimiliki, kemudian perlu *Pola*, yaitu merancang segala sesuatu menjadi terencana dan terkonsep. Setelah itu, masalah pada *Pele*, yang dipinjam dari nama legenda sepak bola si kaki emas yang dikenal sangat taat pada aturan main. Artinya, semua kegiatan penting mengutamakan *team work*. Dan yang terakhir adalah *Palu*. Melambungkan ketegasan yang harus dilakukan dalam mencapai keberhasilan.

Kepada jajarannya, putra Purwakarta kelahiran 7 Juni 1953 yang sebelum menjabat Sekda telah sukses mengelola berbagai dinas seperti Kadis Pariwisata, Kepala Bapeda, dan Kadis Cipta Karya ini selalu menekankan agar berdisiplin pada setiap aturan yang berlaku. Menurut alumni Sarjana Ekonomi UNPAD 1976 ini, disiplin tidak berarti kaku. Tetapi juga bisa luwes.

Putra pasangan H. A. Anan dan Hj. Oman Komariah, ini juga menginginkan setiap jajaran di bawahnya memiliki kreativitas dan prakarsa dalam melaksanakan pekerjaan termasuk pentingnya keberadaan media.

Suami dari Hj. Ela Nurlela, ini memimpin jajaran pemerintah yang bertindak profesional. Menurutnya, profesionalitas di jajaran pemerintah bisa terukur dari tiga aspek. Pertama, dari aspek pengetahuan atau pendidikan. Kedua, aspek keahlian yang dicapai melalui mekanisme berjenjang. Dan ketiga, aspek perilaku.

Dari pengalaman di beberapa SKPD, ayah dua orang putra ini mendapati sifat pekerjaannya nyaris sama, yaitu pada tatanan teknis, sebagai Sekda dia bertanggung jawab memberikan perhatian pada seluruh tatanan.

Melihat pola pikir yang ditanamkan Maman Rosaman kepada bawahannya, tidak munafik apabila dia berprinsip bahwa jabatan bukanlah tujuan utamanya. Dia juga hanya ingin melakukan istikomah, yakni terus berbuat yang terbaik dalam posisi apa dan di mana pun jabatan yang didudukinya. Makanya, jabatan menjadi Manager Kabupaten Purwakarta (Sekda) pun baru diterimanya tahun 2006 padahal permintaan itu sudah diusulkan beberapa pihak terkait kepadanya sejak tahun 2004. ■ BND

Menyedot Lumpur Sungai Kayan

Pengerukan Sungai Kayan Kabupaten Bulungan dituding tidak berhasil. Peralatan yang digunakan ditengarai sebagai penyebab. Padahal, proyek ini sudah menelan biaya puluhan milyar rupiah.

Siapa bilang analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) untuk mengerjakan proyek pemerintah tidak diperlukan. Amdal memang, bukanlah segala-galanya. Tapi, jika terbukti suatu pekerjaan tidak sesuai dengan yang diharapkan, tak ada tawar menawar, pelaksanaan sebuah proyek harus dikaji ulang. Itulah agaknya, yang kini menimpa proyek pengerukan Dasar Alur Sungai (DAS) Sungai Kayan, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur.

Proyek penyedotan lumpur yang dianggarkan tahun 2006/2007 telah menelan biaya sebesar Rp 48.884.000.000,- sehingga dinilai beberapa pihak hanya menghambur-hamburkan uang saja. Ini lantaran, menurut pengamatan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Tanjung Selor, kapal penyedot lumpur yang digunakan kontraktor pelaksana sepertinya asal ada. "Kalau benar ada lumpur yang disedot, dibuang ke mana? Sepanjang pinggir sungai yang dikerjakan tidak ada bekas dan kalau pun ada, jumlahnya tidak maksimal," kata Djamal Godal, pengurus LSM Nurani Bangsa Wilayah Utara Kaltim, di Tanjung Selor.

Proyek pengerukan itu sendiri, dilakukan

PT Permata Hati Samarinda. Areal pengerukan berada di 12 titik atau sepanjang 21 kilometer (km) menyusur alur sungai, dari muara Sungai Kayan sampai di Tanjung Selor. Dan kelak, jika proyek ini selesai, diharapkan alur pelayaran kapal akan lancar dari dan ke ibukota Kabupaten Bulungan. Tentu tidak itu saja, kota tua bekas Kesultanan Bulungan ini pun akan terhindar dari banjir setiap hujan lebat di hulu.

Gubernur Kalimantan Timur sendiri rupanya tanggap dengan kondisi sungai yang dulunya dapat dilayari kapal-kapal besar ini. Oleh karena itu, pelaksana dan konsultan proyek langsung ditunjuk untuk membenahi dasar sungai yang bermasalah dengan pendangkalan ini. Hanya saja, yang mengherankan, PT Permata Hati yang ditunjuk - sebelum mengerjakan proyek besar itu dipercaya mengerjakan proyek pengerukan lumpur di Sungai Buaya di sekitar lokasi PDAM Tanjung Selor. "Anggarannya Rp 1 milyar lebih. Padahal, belum selesai sudah ditinggal," ujar seorang kontraktor lokal yang tidak mau disebut nama, menyelaskan.

Pengusaha setempat juga diliputi keheheranan. Banyak kalangan menilai penggunaan alat sedot lumpur yang diper-

gunakan kontraktor pelaksana tidak maksimal. "Sudah peralatan tidak cocok, *dump area* (lahan pembuangan, Red) juga jadi masalah," kata seorang kontraktor asal Pulau Bunyu. Menurut pengusaha yang pernah mengerjakan pengerukan DAS sungai untuk dijadikan pelabuhan khusus Pertamina Bunyu ini, sebenarnya ingin memberikan masukan kepada Bupati Bulungan. Namun, urung dengan berbagai pertimbangan.

Permasalahannya sudah jelas, dan penyebabnya pun tidak perlu dicari-cari. Sebab, sejak proyek itu dikerjakan 1 Desember 2006 hingga sekarang belum juga rampung. Tapi, jika keterlambatan ini disebut akibat peralatan, tidaklah benar. Menurut *Site Manager* PT Permata Hati, Opang Abdul Kohar, dari koordinat yang ditentukan, ada perubahan *design* dari pihak Perhubungan. Baik dari kualitas maupun kuantitasnya. "Beberapa titik sudah kami kerjakan. Hanya saja, kami terbentur pembuangan lumpur. Masyarakat pemilik tanah keberatan jika lahannya dijadikan tempat pembuangan lumpur. Itu saja sebenarnya masalahnya," katanya kepada S. Leonard Pohan dari *Berita Indonesia* Biro Tarakan.

Di luar urusan mengenai peralatan yang digunakan pelaksana proyek Pengerukan DAS Sungai Kayan, ada pernyataan menarik dari Asisten Dua Pemerintah Kabupaten Bulungan, dr Burhanudin, M.Si. Menurutnya, dana yang dibutuhkan cukup besar sekitar Rp 80 milyar, sementara dari Provinsi Kaltim hanya Rp 48 milyar. Itu pun diberikan secara bertahap. "Untuk pengerukan di bagian muara kita butuh dana lagi sebesar Rp 61 milyar. Kita sudah melakukan survei di daerah pasang surut alur pelayaran. Sementara untuk pembuangan tanah, amdal dalam proyek ini belum ada," katanya.

Lantas, sejauh mana kebenaran ketidakmauan masyarakat pemilik lahan di pinggir sungai yang disebut sebagai kendala? Menurut Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan Pengerukan Sungai Kayan, akan dilihat dari NJOP. "Sebagian masyarakat mungkin keberatan jika ganti rugi berdasarkan NJOP karena lahan tambak yang sudah menghasilkan. Masalah ini sudah kita ajukan penambahan biaya, dan sudah disetujui," katanya.

Nah, biaya pembebasan lahan sudah ada. Sekarang, tinggal kesiapan kontraktor pelaksana. Atau apakah masih ada kendala yang dapat dijadikan dalih menunda pekerjaan raksasa ini. Dan, yang pasti masyarakat tidak mungkin menghalangi jalannya proyek. ■ SLP



Kapal penyedot lumpur di Sungai Kayan, Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Bulungan



Perempuan Melukis Perempuan

Jelang seperempat abad, Ikatan Wanita Pelukis Indonesia (IWPI) meretas ke negeri jiran dengan keindahan Indonesia.

Musim bunga telah tiba. Kabar itulah yang tersirat lewat sejumlah lukisan dalam tajuk pameran "Exotic Indonesia in Colour" di Kuala Lumpur medio bulan silam. Sejumlah lukisan bercorak bunga, dari iris, dahlia, mawar, anggrek bulan, serta lili merona beraneka warna.

Ada juga beberapa lukisan pemandangan yang eksotis. Sudah barang tentu pasti ada Bali. Selain itu juga ada pemandangan bukit Baliem, sungai Musi, persawahan Ciawi, panorama pedesaan, sungai, danau, dan suasana pasar terapung. Begitulah nuansa keindahan Indonesia direkam dalam 100 lukisan dari 38 pelukis yang tergabung dalam IWPI di gedung Soka Gakkai Malaysia yang terselenggara atas kerjasama Kedutaan Indonesia untuk Malaysia dan lembaga nir-laba, Soka Gakkai Malaysia.

Profesional

Laiknya lini bidang seni lainnya, seni rupa juga menyimpan gejala gender di antara para pelakunya. Dalam sejarah awal seni rupa modern Indonesia, nama perempuan pelukis Indonesia masih terbilang langka. Baru di era 30-an, nama pelukis Emiria Sunassa, yang menjadi satu dari segelintir seniman yang tergabung dalam PERSAGI (Persatuan Ahli Gambar Indonesia). Barulah di era 60-an, sejumlah nama pelukis perempuan mulai merebak di kancah seni rupa Indonesia, sekadar menyebut beberapa nama semacam Umi Dachlan, Kartika Affandi, Rulijati, dan Kustijah.

Hingga era 80-an dan yang paling mutakhir, keberadaan perempuan dalam seni rupa terkhusus seni lukis sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Terlebih lagi sudah begitu banyaknya organisasi sebagai wadah perkumpulan, juga sejumlah

kantung budaya yang kerap menjadi penyaluran karya seni mereka.

Satu di antara yang meretas di era 80-an adalah paguyuban yang dibesut empat orang perempuan pelukis Dewa Retno, Sri Yunnah, Yuriah Tanzil, dan Sri Robustina. Mereka berembuk ide di pertengahan Agustus 1985 hingga terbentuklah Ikatan Pelukis Wanita Indonesia (IPWI) yang akhirnya kemudian menjadi Ikatan Wanita Pelukis Indonesia (IWPI).

Jika tahun-tahun pertama pendiriannya dulu baru menampung segelintir ibu-ibu sasuk, kini anggota sudah mencapai 200 orang lebih yang tersebar di sejumlah kota besar di Indonesia, dari yang termuda berusia 18 tahun hingga yang sepuh di usia 80-an.

"Dengan berdirinya IWPI para perempuan pelukis berbagi informasi, dan terutama wadah untuk menampung kreativitas. Dulu kita perempuan yang melukis sering kebingungan, mau cari informasi ke mana, bagaimana kalau mau ikutan pameran..." ungkap Kartini Sabetki, salah satu penggiat di IWPI.

Pada September 1985, IWPI langsung mengadakan pameran perdana di gedung Lingkar Mitra Budaya yang acaranya langsung diresmikan oleh Ida Sukaman (alm.) sebagai wakil dari Menteri Negara Urusan Peranan Wanita. Dan setelah itu meretaslah puluhan pameran bersama hingga menjelang usia seperempat abad ini.

Kartini mengungkapkan keberadaan IWPI bertujuan mengkalibrasi kemam-

KREATIF: Ikatan Wanita Pelukis Indonesia (IWPI) rutin mengadakan seminar, workshop, tour melukis ke sejumlah kota

puan perempuan menjadi pelukis profesional. Katanya, "Dalam wadah ini kami mengkondisikan diri sebagai pelukis profesional. Belajar melukis dengan benar, sesuai ilmunya. Ada guru khusus yang membimbing. Selain itu juga rutin mengadakan seminar, *workshop*, tour melukis ke sejumlah kota dan punya jadwal melukis yang tetap. Setidaknya perempuan pelukis itu tidak hanya menjadi *sunday painters*."

Subyek dan Obyek

Yang dimaksud "sunday painters" adalah anggapan bahwa kaum perempuan yang melukis itu hanya di hari minggu. Konotasinya, melukis hanya untuk mengisi waktu luang. Pertemuan saban pekan untuk sekadar ngumpul-ngumpul, membunuh waktu senggang daripada sekadar arisan atau bergunjing. "Kami sangat profesional. Bukan hanya melukis untuk indah, tapi yang layak dipamerkan, dan layak jual," tambah Kartini.

Sebagai contoh, dalam pameran di negeri jiran yang baru saja lewat, sejumlah lukisan terjual dan sebagian lainnya disumbangkan untuk malam amal (*charity*). Seperti ada keinginan yang kuat bagi IWPI untuk menepis anggapan miring tentang perempuan yang melukis.

Siapa yang pernah melupakan sindiran pelukis besar, Basoeki Abdullah yang mengatakan bahwa, "Perempuan itu lebih cocok untuk dilukis daripada sebagai pelukis." Pernyataan tadi berangkat dari mitos dan sekaligus telah dijadikan mitos tentang perempuan yang melukis.

Dari sekitar 100 lukisan yang dipamerkan, "keindahan" perempuan benar-benar terungkap secara jelas. "Perempuan memang menyukai keindahan, jadi tidak bisa dipungkiri banyak lukisan bertema bunga. Karena jelas, pelukis itu akan melukis obyek apa yang dia senangi..." ungkap Kartini yang pernah menjabat sebagai Konjen (Konsulat Jendral) Indonesia di Vancouver, Kanada itu.

Selain lukisan tentang bunga dan pemandangan, juga terdapat sejumlah manusia dan aktivitasnya. Misalnya potret seorang penenun songket, penari ronggeng Bali, sekumpulan ibu tani di sawah, pasar tradisional, seorang perempuan yang sedang berdoa, ibu yang mengajari anaknya dan lain sebagainya. Gaya realis - naturalis sangat mendominasi. Sehingga sosok perempuan yang muncul begitu jelas kentara. Sulit untuk menolak anggapan bahwa perempuan memang terlalu indah untuk dilukiskan.

Bedanya sekarang mitos bahwa "Perempuan itu lebih cocok untuk dilukis daripada sebagai pelukis" harus sedikit diluruskan. Setidaknya 38 pelukis dengan 100 lukisan yang dipamerkan di dunia internasional itu sudah membuktikannya. ■ CHUS

Olok-olok Pemanasan Global

Michael Crichton menghadirkan isu pemanasan global dalam fiksi. Novel yang terbit tahun 2004 ini telah mendapat kecaman sejumlah ilmuwan pendukung teori pemanasan global.

Novel *State of Fear* (2004) karya Michael Crichton terbit hanya berjarak dua pekan sebelum tsunami berkekuatan 9,3 skala Richter yang menerjang Asia Tenggara-Afrika, 26 Desember 2004 silam. Rilis novel di pekan pertama Desember 2004 itu menjadi sejarah paling mutakhir tentang perdebatan seru antara isu pemanasan global dan sebuah karya fiksi.

Crichton dalam novelnya mempertanyakan kembali keberadaan teori

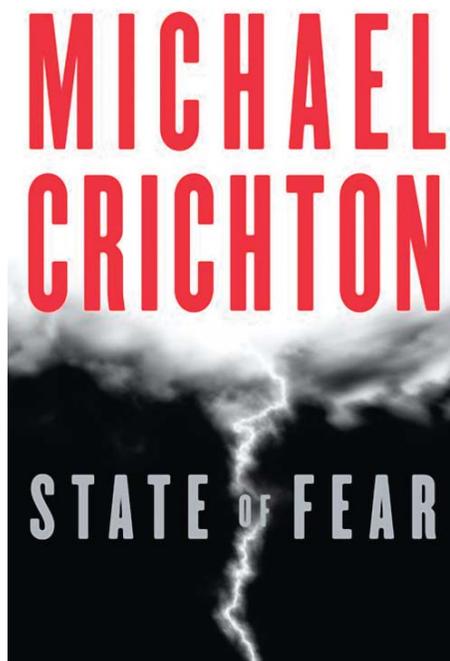
p e m a n a s a n global yang me-rebak sejak era milenium dimulai. Dunia akademis dan p e n d u k u n g teori itu menya-mbutnya dengan polemik. Beberapa waktu berse-lang hening, lantaran cerita fiksi dalam novel tentang tsunami yang melanda Florida itu menjadi aktual saat ka-wasan Aceh-Sri Lanka-India-Thailand, bahkan hingga Ma-ladewa dan So-malia (Afrika) diterjang ge-lombang tsunami terbesar selama 24 tahun terakhir. Lalu perdebatan antara pendukung teori pemanasan global menghangat kembali. Bahkan Al Gore dalam pidato di depan Komite Gedung Putih, 21 Maret 2007 sempat menyindir novel *State of Fear*. Inilah kekuatan sebuah novel yang kini telah diter-

jemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Kondisi Ketakutan* (GPU, 2009).

Century City, Senin, 27 September jam 09.45. Sudah hampir dua minggu Evans tak mendapatkan kabar dari Morton. Seingatnya dia belum pernah hilang kontak dengan kliennya sampai begitu lama (hal. 130). Dari sinilah "rasa" fiksi novel *State of Fear* bermula. Sejak mula halaman, Crichton meyakinkan pembaca inilah karya *sci-*

ence fiction (SF) yang "memeriahkan" isu p e m a n a s a n global. Dan sejak itu pula, narasi dalam sejumlah fakta, data, asumsi dan peristiwa yang berkaitan dengan isu paling hangat se-paruh abad ini. Dalam halaman 54-55, misalnya, terdapat percakapan tiga tokoh yang membicarakan tentang perubahan suhu di paruh pertama abad 20 di Islandia. Tiba-tiba me-lentinglah kali-

mat salah satu tokohnya, "semua itu bohong." Lalu bergulir pada penjelasan tokoh lain, "kita mengamati fenomena pemanasan global yang disebabkan gas-gas yang berasal dari rumah kaca. Padahal kita mengamati pola iklim lokal yang secara khas hanya terjadi di Islandia dan tak ada sang-



kut-pautnya dengan iklim global' (hal. 55).

Maka hadirilah sejumlah rujukan peristiwa semisal Konferensi Tingkat Tinggi Penyelamatan Bumi (Johannesburg, 2003), temuan topik kelompok penyelam, pemanasan global di lapisan es di Greenland, grafik anomali suhu udara di Amerika (tahun 1880-2000) dan lain sebagainya. Cerita merambat pelan di awal. Tapi *snapshot* sejumlah fakta melesat begitu cepat. Sejumlah asumsi dan perangai data dikendarai sebagai konflik. Lalu dikenalkanlah kita pada tokoh utama, pengacara muda Peter Evans yang tengah digandeng George Morton, seorang pengusaha yang punya semangat filantropi. Kedua orang inilah yang menjadi sumbu cerita dari novel bergenre *thriller* ini.

Barulah kita sadar, sejumlah fakta, asumsi, kiraan teori dan data (lengkap dengan catatan kaki dan 165 rujukan daftar pustaka) yang berserakkan dalam novel ini sengaja dihadirkan untuk memperkuat fiksi yang aktual. Dunia Barat menyebut novel ini sebagai salah satu *techno-thriller* yang lahir karena

kondisi yang krusial.

Morton yang menjadi donatur terbesar kelompok lingkungan National Environmental Resource Fund (NERF) mencium gelagat tak beres. Nicholas Drake, yang menjabat direktur NERF diduga telah menyelewengkan dana yang telah digelontorkan Morton. Tindakan Drake inilah yang kelak akan membawa petualangan duo Evans-Morton ke sejumlah tempat di Antartika demi membuktikan dugaan atas penyelewengan dana tersebut.

Novel ini menjadi menarik bukan hanya karena provokasi pembuktian isu pemanasan global. Crichton memberikan kemungkinan-kemungkinan baru dalam isu yang sudah terlanjur menglobal semacam lingkungan ini. Perang-kat teori pemanasan global dijadikan isu yang sengaja dihembuskan oleh para aktivis lingkungan. Mereka hanya ingin mengejar keuntungan dari "bencana" yang mereka ciptakan. Dan yang terlebih mengejutkan adalah bagaimana bencana alam itu hanyalah semata-mata *treatment* untuk menimbulkan kondisi

yang menakutkan dalam masyarakat.

Layaknya sebuah *thriller*, novel *State of Fear* berhasil menyuguhkan jalinan cerita yang menegangkan. Perburuan Evans-Morton, serta John Kenner, seorang agen rahasia yang menyamar sebagai seorang peneliti, dan terutama yang menyedot perhatian adalah kelakuan para teroris berkedok cinta lingkungan (*eco terrorists*) yang berusaha menghentikan mereka.

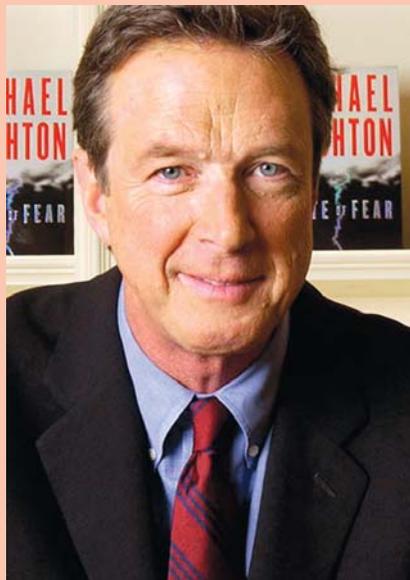
Usaha Crichton memfiksikan pemanasan global terbilang lihai. Kendati banyak dituding hanya mencuri momen untuk mengejar popularitas novelnya, tapi *toh* akhirnya karyanya yang bicara. Jika Anda teliti dan mau menyilet sejumlah teraan daftar pustaka dan catatan kaki dalam novel ini, niscaya, kita akan menemukan lagi mengapa orang begitu yakin kalau pemanasan global sebuah kemutlakan hegemoni yang rasanya tak pantas didebat lagi. Barangkali atas nama sains para penganut pemanasan global bicara. Di sudut lain Crichton mendebatnya, meski lewat fiksi semata. ■ CHUS

Micheal Crichton yang tak Pernah Jeri

Layaknya seorang kreator, pemilik nama lengkap John Michael Crichton selalu dianggap mengusung nilai baru dalam setiap karyanya. Selain kerap memberi kejutan, kelihaiannya dalam mengeksplorasi karya dilandasi pesan moral yang kuat.

Crichton lahir di Illinois, Chicago 23 Oktober 1942 dari keluarga yang gemar melahap buku. Kecintaannya terhadap dunia sains tak membendung rasa rakusnya terhadap bacaan sastra. Penggemar George Orwell, Edgar Allan Poe dan Mark Twain ini meneruskan studi kedokteran di Harvard College dan menggondol gelar MD dengan predikat *summa cum laude* hingga ke jenjang Pascadoktoral sebagai Peneliti Utama bidang biologi di Institute Salk. Katanya, "dunia sains sama indahnya dengan dunia sastra, apalagi jika keduanya saling melibatkan diri..."

Dari sinilah ia kemudian mempunyai bekal saat menggarap serial televisi *E.R* (*Emergency Room*) yang mengundang banyak pujian. Serial *E.R* dianggap sebagai potret paling nyata di ruang gawat darurat. Pesona fiksi telah melibatkan totalitas emosi para pemainnya. "Inilah kisah yang berpegang dari kisah nyata di dunia medis," katanya melanjut, "banyak akurasi peristiwa saintifik yang kasat mata tapi sebenar-



nya banyak melibatkan peristiwa psikis." E.R tidak akan pernah melepaskan dari tali kekang sains dan direkatkan dengan formulasi fiksi yang kental. Itulah rahasia resep keberhasilan Crichton yang mengawinkan *science* dengan *fiction* dalam setiap karyanya.

Orang tak akan pernah melupakan bagaimana ia menghidupkan kembali imaji dinosaurus dalam novel spektakulernya, *Jurassic Park* (1990). Sejumlah

novel istimewa yang lain telah mengobarkan semangat perdebatan dalam sudut pandang sains seperti *Congo* (1980), *Sphere* (1987), *Rising Sun* (1992), dan *Disclosure* (1994). Setelah di abad sebelumnya telah tercetak Isac Asimov, kini dunia memberi tempat tertinggi bagi Crichton sebagai bapak *science fiction* mutakhir.

Novel *State of Fear* (2004) terbilang istimewa sepanjang karier kepenulisan-nya karena telah menyulut api silang pendapat dan dianggap "menyesatkan" oleh penganut teori pemanasan global. Di penghujung hidupnya, Crichton masih melanjutkan novel terakhirnya, *Next* (2006). Di tengah serangan kanker yang mengganas, akhirnya Crichton istirahat untuk yang terakhir kalinya di California pada 4 November 2008. Bapak novel *techno-thriller* itu telah wafat di usia ke-66 tahun, tak tampak jeri penanya menatap pujian sekaligus sangkaan. Saat ia menelurkan karya, ia selalu meyakini, "menulis adalah keindahan realita," katanya suatu ketika dulu.

Kini Crichton telah tiada. Dengan 23 novel ia mewariskan pondasi yang kuat bagi khazanah novel berbasis sains. Itulah sebuah keindahan tanpa rasa jeri.

■ GALLUS

TokohINDONESIA



MAJALAH BERBASIS WEBSITE

www.tokohindonesia.com

THE EXCELLENT BIOGRAPHY



Al-Zaytun



KARSA



PARAMADINA

BUDHY MUNAWAR-RACHMAN

ENSIKLOPEDI

Nurcholish Madjid

ENSIKLOPEDI

Nurcholish Madjid

Disunting oleh:

BUDHY MUNAWAR RACHMAN



**Untuk Pemesanan
Hubungi:**

**Mahad Al-Zaytun
(0234) 742815**

**Majalah Berita Indonesia
(021) 8292735**